

KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



2019

INFORMASI
STATISTIK



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

SAMBUTAN

KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2019 dapat diselesaikan. Adapun buku ini merupakan perwujudan tugas Pusdatin dalam pembinaan, pengembangan, pengelolaan, dan penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen kementerian, dan sebagai sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan data, penyajian data, dan informasi statistik infrastruktur PUPR dan Sistem Informasi Statistik PUPR.

Sumber data dalam Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2019 diperoleh dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Data yang disajikan dalam satuan tingkat nasional dengan rincian agregat merupakan provinsi serta analisis statistik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberikan kontribusi baik data dan informasi maupun saran dan arahan yang positif dalam penyusunan buku ini. Kami menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu kritik dan saran perbaikan dari semua pihak/pembaca senantiasa diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan datang.

Jakarta, Desember 2019
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Ir. Nicodemus Daud, M.Si



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	1
BAB II GAMBARAN UMUM INDONESIA	
A. Geografi Wilayah	2
B. Administrasi Wilayah	5
C. Demografi Wilayah	9
D. Ekonomi Wilayah	14
E. Alokasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	24
BAB III STATISTIK INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR	
A. Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai	26
B. Bendungan/Waduk	31
C. Bendung	49
D. Embung	50
E. Pengaman Pantai	51
F. Sabo Dam	53
G. Air Tanah	55
BAB IV STATISTIK INFRASTRUKTUR BINA MARGA	
A. Jalan Nasional	57
B. Jalan Tol	60
C. Jembatan Nasional	75
D. Jalan Daerah	77
D.1. Jalan Provinsi	78
D.2. Jalan Kota	79
D.3. Jalan Kabupaten	81

BAB V STATISTIK INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA

A. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	84
A.1. Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan	84
A.2. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	94
B. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP)	95
B.1. Persampahan	95
B.2. Pengelolaan Air Limbah	97
C. Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP)	101
C.1. Kawasan Permukiman Perkotaan	102
C.2. Kawasan Permukiman Perdesaan	104
C.3. Kawasan Permukiman Khusus	104
D. Bina Penataan Bangunan (BPB)	109
D.1. Pengembangan Kota Hijau	109
D.2. Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka	110

BAB VI STATISTIK INFRASTRUKTUR PERUMAHAN

A. Rumah Susun (Rusun)	112
B. Rumah Khusus	115
C. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	117
D. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rumah Umum	119
E. Fasilitas Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP)	121

BAB VII STATISTIK BINA KONSTRUKSI

A. Badan Usaha Jasa Konstruksi	123
B. Tenaga Kerja	126

BAB VIII STATISTIK SDM KEMENTERIAN PUPR

A. Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PUPR	131
B. Pengarusutamaan Gender	135

BAB IX PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Berdasarkan Provinsi	4
Tabel 2.2	Jumlah Kabupaten dan Kota Berdasarkan Provinsi Tahun 2015-2018.....	6
Tabel 2.3	Jumlah Kecamatan dan Desa Berdasarkan Provinsi Tahun 2015-2018.....	7
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2010 dan 2018.....	9
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Provinsi	10
Tabel 2.6	Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Provinsi	12
Tabel 2.7	PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018.....	15
Tabel 2.8	PDB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018.....	16
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Kumulatif PDB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2018	17
Tabel 2.10	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2018	18
Tabel 2.11	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2018	20
Tabel 2.12	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2018.....	22
Tabel 2.13	APBN Kementerian PUPR Tahun 2014-2018.....	24
Tabel 2.14	APBN Kementerian PUPR Tahun 2018 menurut Jenis Belanja	25
Tabel 3.1	Wilayah Sungai Lintas Negara	26
Tabel 3.2	Wilayah Sungai Lintas Provinsi	27
Tabel 3.3	Wilayah Sungai Strategis Nasional	28
Tabel 3.4	Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	29
Tabel 3.5	Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten/Kota.....	30
Tabel 3.6	Program Pembangunan Bendungan 2014-2018.....	31
Tabel 3.7	Daftar 65 Bendungan Rencana di Indonesia.....	32
Tabel 3.8	Daftar Bendungan Eksisting di Indonesia.....	33
Tabel 3.9	Daftar Bendungan Eksisting di Indonesia (lanjutan).....	41
Tabel 3.10	Jumlah Bendung di Indonesia Tahun 2018	49
Tabel 3.11	Embung di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018	50

Tabel 3.12	Jumlah Pengaman Pantai di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018	52
Tabel 3.13	Jumlah Sabo Dam di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018	54
Tabel 3.14	Jumlah Pengaman Pantai di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018	55
Tabel 4.1	Kondisi Panjang Jalan Nasional Tahun 2018 Semester 2	58
Tabel 4.2	Jalan Tol Beroperasi	60
Tabel 4.3	Jalan Tol Trans Jawa dalam Pembangunan	63
Tabel 4.4	Jalan Tol Jabodetabek dalam Pembangunan	66
Tabel 4.5	Jalan Tol Non Trans Jawa dalam Pembangunan	70
Tabel 4.6	Jalan Tol Trans Sumatera dalam Pembangunan	73
Tabel 4.7	Jalan Tol dalam Perencanaan	75
Tabel 4.8	Kondisi Jembatan Nasional Tahun 2018	76
Tabel 4.9	Kondisi Panjang Jalan Provinsi Tahun 2018	78
Tabel 4.10	Kondisi Panjang Jalan Kota Tahun 2018	80
Tabel 4.11	Kondisi Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2018	82
Tabel 5.1	Data Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	84
Tabel 5.2	Data Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (Lanjutan)	85
Tabel 5.3	Data Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum	87
Tabel 5.4	Data Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (Lanjutan)	88
Tabel 5.5	Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2012-2018	89
Tabel 5.6	Kinerja PDAM di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2018	91
Tabel 5.7	Kapasitas dan Layanan PDAM di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2018	92
Tabel 5.8	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	94
Tabel 5.9	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	96
Tabel 5.10	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	97
Tabel 5.11	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	100
Tabel 5.12	Data Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	103
Tabel 5.13	Pos Lintas Batas Negara	105
Tabel 5.14	Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perbatasan	105
Tabel 5.15	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas	107
Tabel 5.16	Kawasan Permukiman Nelayan/Tepi Air Percontohan	108
Tabel 5.17	Data Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018	110
Tabel 5.18	Data Penataan Kawasan Kota Pusaka	111
Tabel 6.1	Jumlah Rumah Susun Menurut Provinsi Tahun 2016-2018	113

Tabel 6.2	Jumlah Rumah Susun berdasarkan Kegiatan Tahun 2018 (Semester 2)	114
Tabel 6.3	Jumlah Rumah Khusus menurut Provinsi Tahun 2016-2018.....	116
Tabel 6.4	Jumlah Rumah Khusus Menurut Kegiatan Tahun 2018 (Semester 2)	117
Tabel 6.5	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menurut Provinsi Tahun 2016-2018.....	118
Tabel 6.6	Jumlah Pembangunan PSU Rumah Umum Tahun 2016-2018	120
Tabel 6.7	Data Penyaluran KPR Sejahtera FLPP Rumah Tapak dan Rumah Susun Menurut Provinsi Tahun 2010-2019.....	121
Tabel 7.1	Persebaran Badan Usaha Jasa Konsultan	124
Tabel 7.2	Persebaran Badan Usaha Jasa Konsultan (Lanjutan)	125
Tabel 7.3	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi.....	127
Tabel 7.4	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi	129
Tabel 8.1	Jumlah SDM Kementerian PUPR tahun 2012-2019	132
Tabel 8.2	Jumlah SDM Kementerian PUPR berdasarkan Unit Organisasi Tahun 2019.....	132
Tabel 8.3	Jumlah SDM menurut Golongan Tahun 2019.....	134
Tabel 8.4	Jumlah SDM menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019.....	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Indonesia	2
Gambar 2.2	Persentase Luas Wilayah berdasarkan Pulau Terbesar Tahun 2018.....	3
Gambar 2.3	Rekapitulasi Wilayah Administrasi Indonesia berdasarkan Pulau Terbesar Tahun 2018	8
Gambar 2.4	Persentase Sebaran Penduduk Indonesia berdasarkan Pulau Terbesar Tahun 2018	12
Gambar 2.5	Persentase Kepadatan Penduduk Berdasarkan Provinsi Tahun 2018	14
Gambar 2.6	PDB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018	17
Gambar 2.7	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2018.....	20
Gambar 2.8	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2018	23
Gambar 2.9	Persentase APBN Kementerian PUPR menurut Jenis Belanja	25
Gambar 4.1	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan tahun 2018	58
Gambar 4.2	Persentase Kondisi Jembatan Nasional Tahun 2018.....	76
Gambar 4.3	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2018.....	78
Gambar 4.4	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Kota Tahun 2018	80
Gambar 4.5	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2018	82
Gambar 5.1	Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2012-2018	90
Gambar 5.2	Persentase PDAM Dalam Kondisi Sehat Tahun 2012-2018	90
Gambar 5.3	Persentase Kinerja PDAM di Indonesia Tahun 2018	92
Gambar 6.1	Persentase Rumah Susun berdasarkan Kegiatan Tahun 2018	114
Gambar 6.2	Jumlah Rumah Khusus Tahun 2016-2018	115
Gambar 6.3	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016-2018	118
Gambar 7.1	Persentase Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.....	124
Gambar 7.2	Persentase Kualifikasi Tenaga Ahli Konstruksi.....	127
Gambar 7.3	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	129
Gambar 8.1	Perkembangan Jumlah SDM Kementerian PUPR Tahun 2012-2018	131
Gambar 8.2	Persentase Jumlah SDM Kementerian PUPR Berdasarkan Golongan Tahun 2019	134

Gambar 8.3	Persentase pegawai Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	136
Gambar 8.4	Jumlah Pegawai Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2019	137
Gambar 8.5	Jumlah Pegawai Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2019 (Lanjutan).....	137



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**



BAB I

INFORMASI STATISTIK
PEKERJAAN UMUM &
PERUMAHAN RAKYAT
2019

PENDAHULUAN



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Program pembangunan infrastruktur adalah bagian dari pendukung program di sektor lain. Dengan adanya pembangunan maka dapat memacu pertumbuhan ekonomi, serta terciptanya lapangan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh. Kementerian PUPR sebagai penyelenggara program pembangunan infrastruktur bertanggung jawab atas pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, keciptakarya, serta perumahan.

Proses pembangunan infrastruktur perlu adanya informasi literal dan kestatistikan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program dan pemanfaatan pembangunan. Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) memiliki fungsi salah satunya yaitu sebagai unit pengelola serta penyedia data baik literal maupun spasial, yaitu unit kerja Bidang Data dan Peta Informasi Infrastruktur (BDPII). BDPII memiliki tugas penyusunan informasi literal dan kestatistikan di bidang PUPR, dan penyediaan data infrastruktur bidang PUPR beserta pendukungnya yang dituangkan dalam Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan pembangunan infrastruktur secara menyeluruh, agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik.

Secara garis besar Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan gambaran tentang hasil pembangunan infrastruktur PUPR yang disajikan melalui data agregat menurut provinsi. Data tersebut terkait bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, perumahan, serta data sektor pendukung lainnya.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini adalah untuk menyajikan data dan informasi statistik terkait infrastruktur bidang PUPR. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR, instansi lainnya, serta masyarakat umum.



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**



BAB II

INFORMASI STATISTIK
PEKERJAAN UMUM &
PERUMAHAN RAKYAT
2019

**GAMBARAN
UMUM
INDONESIA**



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

A. Geografi Wilayah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 34 provinsi yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan. Luas wilayah Indonesia yaitu **1.916.862,20 km²**. Secara astronomi Indonesia terletak antara **6° 04' 30" Lintang Utara** dan **11° 00' 36" Lintang Selatan** dan antara **94° 58' 21" Bujur Timur - 141° 01' 10" Bujur Timur**. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilalui oleh garis khatulistiwa.



Gambar 2.1
Peta Indonesia

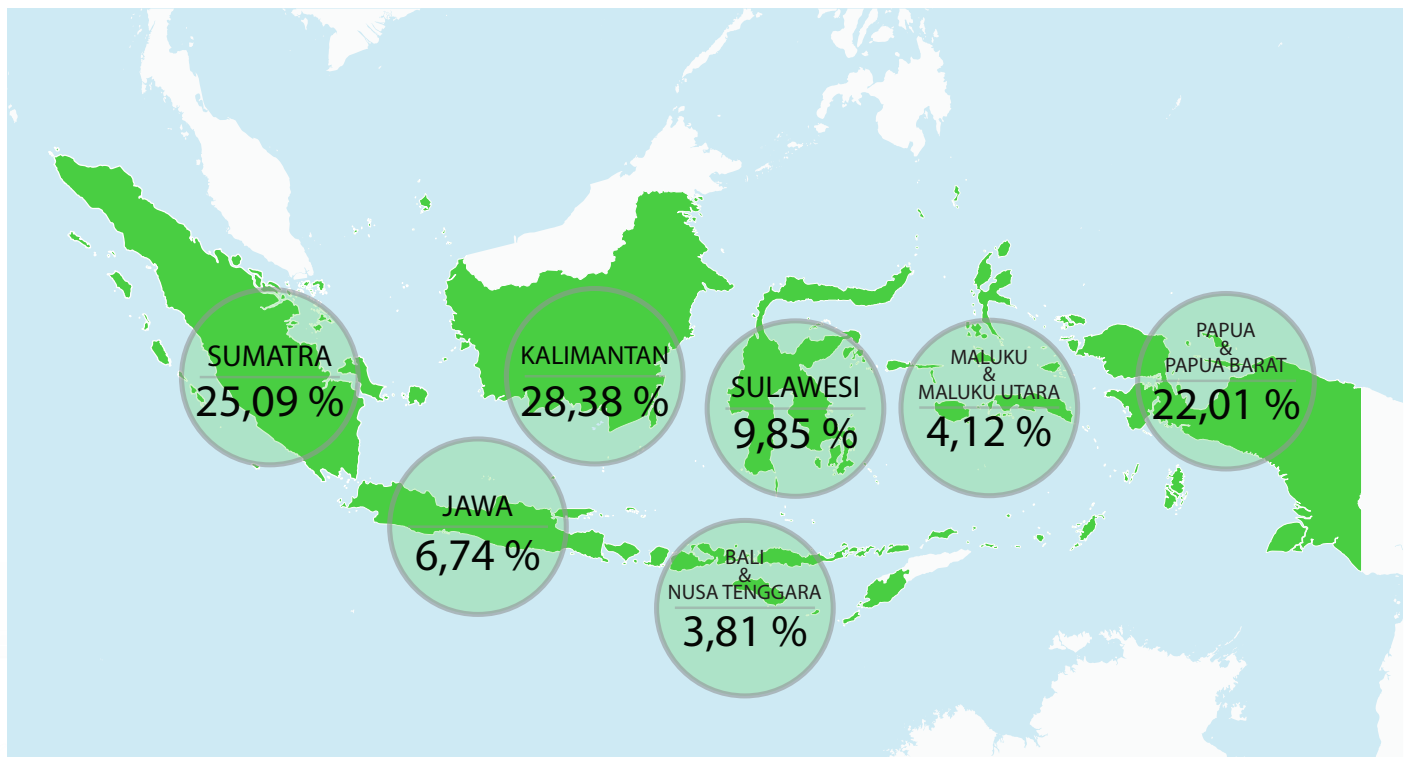
Batas-batas negara Indonesia yaitu sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Negara Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Thailand, Palau, dan Laut Cina Selatan
Sebelah Selatan	: Negara Australia, Timor Leste, dan Samudera Hindia
Sebelah Barat	: Samudera Hindia
Sebelah Timur	: Negara Papua Nugini dan Samudera Pasifik

Secara geografis Indonesia memiliki posisi yang strategis yang terletak diantara dua benua, Asia dan Australia serta diapit oleh dua Samudera, Hindia dan Pasifik. Dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu jalur lintas perdagangan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta kebudayaan masyarakat Indonesia. Jika dibentangkan dari Samudera Hindia hingga Samudera Pasifik, wilayah Indonesia berada disepanjang **3.977 mil** diantara kedua samudera tersebut. Sirkum Mediterania, Sirkum Pasifik, Sirkum Lingkar Australia merupakan 3 sirkum gunung api yang terletak di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu negara yang memiliki hasil alam yang sangat besar, namun juga berpotensi rawan bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan lainnya.

Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia. Pada **Gambar 2.2** dapat dilihat persentase luas Pulau Kalimantan sebesar **28,44%** dari luas Indonesia atau setara dengan **544.150,07 km²**. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland dan Pulau Papua (termasuk negara Papua Nugini).

Wilayah terluas berdasarkan provinsi adalah Provinsi Papua, dengan luas wilayah **319.036,05 km²** atau sekitar **16,64%**, hal ini dapat dilihat pada **Tabel 2.1**. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat provinsi yang memiliki jumlah pulau terbanyak yaitu Provinsi Papua Barat sebanyak **4.108 pulau**.



Gambar 2.2
Persentase Luas Indonesia berdasarkan Pulau Terbesar Tahun 2018

Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Luas ⁽¹⁾ (km ²)	Persentase Terhadap Luas Indonesia	Jumlah Pulau ⁽²⁾
Aceh	Banda Aceh	57.956,00	3,02	331
Sumatera Utara	Medan	72.981,23	3,81	232
Sumatera Barat	Padang	42.012,89	2,19	211
Riau	Pekanbaru	87.023,66	4,54	161
Jambi	Jambi	50.058,16	2,61	15
Sumatera Selatan	Palembang	91.592,43	4,78	23
Bengkulu	Bengkulu	19.919,33	1,04	10
Lampung Bandar	Lampung	34.623,80	1,81	132
Kep. Bangka Belitung	Pangkal Pinang	16.424,06	0,86	556
Kepulauan Riau	Tanjung Pinang	8.201,72	0,43	1.994
DKI Jakarta	Jakarta	664,01	0,03	110
Jawa Barat	Bandung	35.377,76	1,85	30
Jawa Tengah	Semarang	32.800,69	1,71	72
D.I. Yogyakarta	Yogyakarta	3.133,15	0,16	33
Jawa Timur	Surabaya	47.799,75	2,49	431
Banten	Serang	9.662,92	0,5	81
Bali	Denpasar	5.780,06	0,3	33
Nusa Tenggara Barat	Mataram	18.572,32	0,97	407
Nusa Tenggara Timur	Kupang	48.718,10	2,54	532
Kalimantan Barat	Pontianak	147.307,00	7,68	243
Kalimantan Tengah	Palangka Raya	153.564,50	8,01	64
Kalimantan Selatan	Banjarmasin	38.744,23	2,02	172
Kalimantan Timur	Samarinda	129.066,64	6,73	419
Kalimantan Utara	Bulungan	75.467,70	3,94	34
Sulawesi Utara	Manado	13.851,64	0,72	287
Sulawesi Tengah	Palu	61.841,29	3,23	1.632
Sulawesi Selatan	Makassar	46.717,48	2,44	314
Sulawesi Tenggara	Kendari	38.067,70	1,99	527
Gorontalo	Gorontalo	11.257,07	0,59	123
Sulawesi Barat	Mamuju	16.787,18	0,88	41

Provinsi	Ibu Kota Provinsi	Luas ⁽¹⁾ (km ²)	Persentase Terhadap Luas Indonesia	Jumlah Pulau ⁽²⁾
Maluku	Ambon	46.914,03	2,45	1.286
Maluku Utara	Ternate	31.982,50	1,67	856
Papua Barat	Manokwari	102.955,15	5,37	4.108
Papua	Jayapura	319.036,05	16,64	556
Indonesia		1.916.862,20	100,00	16.056

Sumber : Kementerian Dalam Negeri - Statistik Indonesia 2019

Catatan :

¹⁾ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017

²⁾ Berdasarkan informasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018

B. Administrasi Wilayah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia adalah presidensial dengan presiden sebagai kepala negara. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih secara langsung melalui pemilihan umum (Pemilu) setiap 5 tahun sekali. Setiap provinsi di Indonesia dipimpin oleh Gubernur dan memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Wilayah kabupaten dipimpin oleh Bupati dan memiliki DPRD Kabupaten. Sedangkan kota dipimpin oleh wali kota dan memiliki DPRD Kota.

Indonesia memiliki **34 provinsi**, setelah Kalimantan Utara ditetapkan menjadi provinsi pada tahun 2012. Di Indonesia terdapat **5 provinsi** yang memiliki status otonomi khusus yaitu Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Kelima daerah ini memiliki hak istimewa legislator dan tingkat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain.

Provinsi Aceh memiliki hak istimewa untuk menerapkan hukum syariah sejak tahun 2003. DKI Jakarta diberi status khusus sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selain itu DKI Jakarta memiliki peran dan fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI sebagai daerah otonom. Sedangkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat status khusus sebagai pengakuan terhadap perannya dalam mendukung Indonesia pada masa revolusi. Provinsi Papua yang semula bernama Irian Jaya mendapat status otonomi khusus pada tahun 2001. Sama halnya dengan Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat yang dahulu bernama Irian Jaya Barat mendapat status otonomi khusus pada tahun 2001.

Tahun 2018 Indonesia tercatat memiliki **416 kabupaten dan 98 kota**. Pada kabupaten dan kota tersebut memiliki **7.240 kecamatan dan 83.706 desa**. Dapat dilihat pada **Tabel 2.2** dan **Tabel 2.3**, bahwa Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah kabupaten terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak **29 kabupaten**. Sedangkan untuk provinsi yang memiliki kota terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur, masing-masing sebanyak 9 kota.

Jumlah kecamatan dan desa di Indonesia sejak tahun 2015-2018 selalu bertambah. Dapat dilihat pada **Tabel 2.3**, jumlah total kecamatan tahun 2018 mencapai **7.240 kecamatan**, dan jumlah desa mencapai **83.706 desa**.

Tabel 2.2
Jumlah Kabupaten dan Kota Berdasarkan Provinsi Tahun 2015-2018

Provinsi	Jumlah Kabupaten				Jumlah Kota			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Aceh	18	18	18	18	5	5	5	5
Sumatera Utara	25	25	25	25	8	8	8	8
Sumatera Barat	12	12	12	12	7	7	7	7
Riau	10	10	10	10	2	2	2	2
Jambi	9	9	9	9	2	2	2	2
Sumatera Selatan	13	13	13	13	4	4	4	4
Bengkulu	9	9	9	9	1	1	1	1
Lampung	13	13	13	13	2	2	2	2
Kep. Bangka Belitung	6	6	6	6	1	1	1	1
Kepulauan Riau	5	5	5	5	2	2	2	2
DKI Jakarta	1	1	1	1	5	5	5	5
Jawa Barat	18	18	18	18	9	9	9	9
Jawa Tengah	29	29	29	29	6	6	6	6
D.I. Yogyakarta	4	4	4	4	1	1	1	1
Jawa Timur	29	29	29	29	9	9	9	9
Banten	4	4	4	4	4	4	4	4
Bali	8	8	8	8	1	1	1	1
Nusa Tenggara Barat	8	8	8	8	2	2	2	2
Nusa Tenggara Timur	21	21	21	21	1	1	1	1
Kalimantan Barat	12	12	12	12	2	2	2	2
Kalimantan Tengah	13	13	13	13	1	1	1	1
Kalimantan Selatan	11	11	11	11	2	2	2	2
Kalimantan Timur	7	7	7	7	3	3	3	3
Kalimantan Utara	4	4	4	4	1	1	1	1
Sulawesi Utara	11	11	11	11	4	4	4	4
Sulawesi Tengah	12	12	12	12	1	1	1	1
Sulawesi Selatan	21	21	21	21	3	3	3	3
Sulawesi Tenggara	15	15	15	15	2	2	2	2
Gorontalo	5	5	5	5	1	1	1	1
Sulawesi Barat	6	6	6	6	0	0	0	0
Maluku	9	9	9	9	2	2	2	2
Maluku Utara	8	8	8	8	2	2	2	2
Papua Barat	12	12	12	12	1	1	1	1
Papua	28	28	28	28	1	1	1	1
Indonesia	416	416	416	416	98	98	98	98

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017
Statistik Indonesia 2017

Tabel 2.3
Jumlah Kecamatan dan Desa⁽¹⁾ Berdasarkan Provinsi Tahun 2015-2018

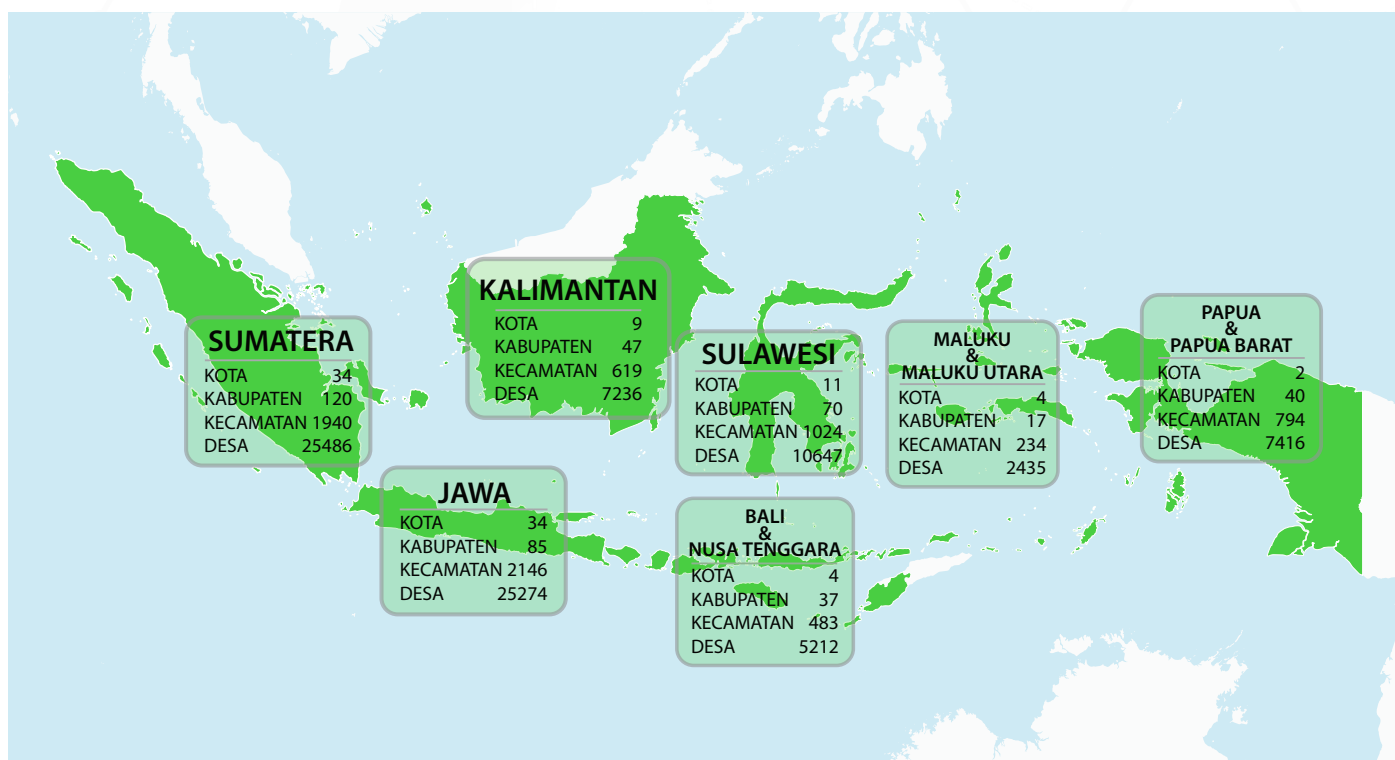
Provinsi	Jumlah Kecamatan				Jumlah Desa			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Aceh	289	289	289	289	6.513	6.513	6.509	6.514
Sumatera Utara	440	443	449	450	6.112	6.113	6.113	6.136
Sumatera Barat	179	179	179	179	1.131	1.117	1.160	1.159
Riau	166	166	169	169	1.847	1.847	1.876	1.875
Jambi	138	141	141	141	1.562	1.562	1.562	1.562
Sumatera Selatan	232	232	236	239	3.265	3.261	3.263	3.266
Bengkulu	129	129	128	128	1.524	1.520	1.515	1.514
Lampung	227	228	228	228	2.643	2.643	2.643	2.653
Kep. Bangka Belitung	47	47	47	47	387	387	391	391
Kepulauan Riau	66	70	70	70	416	416	416	416
DKI Jakarta	44	44	44	44	267	267	267	267
Jawa Barat	626	627	627	627	5.962	5.962	5.963	5.957
Jawa Tengah	573	573	573	576	8.559	8.559	8.559	8.559
D.I. Yogyakarta	78	78	78	78	438	438	438	438
Jawa Timur	664	665	666	666	8.501	8.501	8.501	8.501
Banten	155	155	155	155	1.551	1.551	1.552	1.552
Bali	57	57	57	57	716	716	716	716
Nusa Tenggara Barat	116	116	116	117	1.141	1.141	1.141	1.143
Nusa Tenggara Timur	306	307	307	309	3.270	3.279	3.323	3.353
Kalimantan Barat	174	174	174	174	2.005	2.072	2.132	2.132
Kalimantan Tengah	136	136	136	136	1.574	1.574	1.574	1.576
Kalimantan Selatan	152	152	152	153	2.009	2.008	2.008	2.008
Kalimantan Timur	103	103	103	103	1.032	1.032	1.032	1.038
Kalimantan Utara	50	53	53	53	479	482	482	482
Sulawesi Utara	168	171	171	171	1.832	1.838	1.838	1.838
Sulawesi Tengah	175	175	175	175	2.013	2.018	2.019	2.020
Sulawesi Selatan	306	306	307	310	3.033	3.033	3.054	3.049
Sulawesi Tenggara	216	220	222	222	2.292	2.328	2.336	2.356
Gorontalo	77	77	77	77	735	735	735	734
Sulawesi Barat	69	69	69	69	648	650	650	650
Maluku	118	118	118	118	1.224	1.235	1.238	1.240

Provinsi	Jumlah Kecamatan				Jumlah Desa			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Maluku Utara	115	115	116	116	1.196	1.196	1.196	1.195
Papua Barat	181	189	217	218	1.614	1.614	1.825	1.878
Papua	499	541	568	576	4.445	4.787	5.317	5.538
Indonesia	7.071	7.145	7.217	7.240	81.936	82.395	83.344	83.706

Sumber : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 6 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 90 Tahun 2018 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2018

Catatan :

(¹) Termasuk Kelurahan dan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)



Gambar 2.3

Rekapitulasi Wilayah Administrasi Indonesia berdasarkan Pulau Terbesar Tahun 2018

C. Demografi Wilayah

Indonesia merupakan negara majemuk. Sebagai negara kesatuan kemajemukan tak lantas membuat Indonesia menjadi terkotak-kotak. Sebagai mana semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam namun tetap satu. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat yang dimiliki Indonesia.

Menurut data BPS terdapat sekitar **1.300 suku bangsa** di Indonesia. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia, dengan jumlah populasinya sebesar **95,2 juta jiwa** atau sekitar **40%** dari populasi Indonesia. Terdapat sebanyak **2.500 bahasa daerah** yang digunakan di Indonesia, jumlah ini melebihi jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2010 dan 2018

Provinsi	Penduduk (ribu jiwa)		
	2010 ⁽¹⁾	2010 ⁽²⁾	2018 ⁽²⁾
Aceh	4.494,4	4.523,1	5.281,3
Sumatera Utara	12.982,2	13.028,7	14.415,4
Sumatera Barat	4.846,9	4.865,3	5.382,1
Riau	5.538,4	5.574,9	6.814,9
Jambi	3.092,3	3.107,6	3.570,3
Sumatera Selatan	7.450,4	7.481,6	8.370,3
Bengkulu	1.715,5	1.722,1	1.963,3
Lampung	7.608,4	7.634,0	8.370,3
Kepulauan Bangka Belitung	1.223,3	1.230,2	1.459,9
Kepulauan Riau	1.679,2	1.692,8	2.136,5
DKI Jakarta	9.607,8	9.640,4	10.467,6
Jawa Barat	43.053,7	43.227,1	48.683,7
Jawa Tengah	32.382,7	32.443,9	34.490,8
D.I. Yogyakarta	3.457,5	3.467,5	3.802,9
Jawa Timur	37.476,8	37.565,8	39.500,9
Banten	10.632,2	10.688,6	12.689,7
Bali	3.890,8	3.907,4	4.292,2
Nusa Tenggara Barat	4.500,2	4.516,1	5.013,7
Nusa Tenggara Timur	4.683,8	4.706,2	5.371,5
Kalimantan Barat	4.396,0	4.411,4	5.001,7
Kalimantan Tengah	2.212,1	2.220,8	2.660,2
Kalimantan Selatan	3.626,6	3.642,6	4.182,7
Kalimantan Timur	3.553,1	3.047,5	3.648,8
Kalimantan Utara	-	528,6	716,4
Sulawesi Utara	2.270,6	2.277,7	2.484,4
Sulawesi Tengah	2.635,0	2.646,0	3.010,4

Provinsi	Penduduk (ribu jiwa)		
	2010 ⁽¹⁾	2010 ⁽²⁾	2018 ⁽²⁾
Sulawesi Selatan	8.034,8	8.060,4	8.772,0
Sulawesi Tenggara	2.232,6	2.243,6	2.653,7
Gorontalo	1.040,2	1.044,8	1.185,5
Sulawesi Barat	1.158,6	1.164,6	1.355,6
Maluku	1.533,5	1.541,9	1.773,8
Maluku Utara	1.038,1	1.043,3	1.232,6
Papua Barat	760,4	765,3	937,5
Papua	2.833,4	2.857,0	3.322,5
Indonesia	237.641,3	238.518,8	265.015,3

Sumber : Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS RI

Catatan :

⁽¹⁾ Hasil Sensus Penduduk 2010, Status Mei

⁽²⁾ Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035, Status Juni

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 (bulan Mei) adalah **237.641,3 jiwa**. Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 adalah **265.015,3 jiwa**. **Tabel 2.4** menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak **48.683,7 jiwa**, diikuti dengan Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak **39.500,9 jiwa**. Pada **Tabel 2.5** dapat dilihat laju pertumbuhan penduduk hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2018 adalah sebesar **1,33%**.

Tabel 2.5

Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Provinsi

Provinsi	Laju Pertumbuhan penduduk per tahun		Rasio Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	
	2000-2010	2010-2018 ⁽²⁾	2010 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾
Aceh	2,36 ⁽³⁾	1,96	99,4	99,8
Sumatera Utara	1,10	1,27	99,4	99,6
Sumatera Barat	1,34	1,27	98,1	99,3
Riau	3,58	2,54	105,9	105,3
Jambi	2,56	1,75	104,2	104,1
Sumatera Selatan	1,85	1,41	103,3	103,3
Bengkulu	1,67	1,65	104,2	103,9
Lampung	1,24	1,16	105,7	105
Kepulauan Bangka Belitung	3,14	2,16	107,6	108,4
Kepulauan Riau	4,95	2,95	105,2	104
DKI Jakarta	1,41	1,03	102,5	100,4
Jawa Barat	1,90	1,50	103,2	102,6
Jawa Tengah	0,37	0,77	98,4	98,3

Provinsi	Laju Pertumbuhan penduduk per tahun		Rasio Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	
	2000-2010	2010-2018 ⁽²⁾	2010 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾
D.I. Yogyakarta	1,04	1,16	97,4	97,9
Jawa Timur	0,76	0,63	97,2	97,5
Banten	2,78	2,17	104,4	103,9
Bali	2,15	1,18	101,3	101,4
Nusa Tenggara Barat	1,17	1,32	93,9	94,3
Nusa Tenggara Timur	2,07	1,67	98,3	98,1
Kalimantan Barat	0,91	1,58	104,3	103,6
Kalimantan Tengah	1,79	2,28	108,6	109,6
Kalimantan Selatan	1,99	1,74	102,2	103
Kalimantan Timur	3,81	2,28	110,9	110,2
Kalimantan Utara	0	3,87	0	113
Sulawesi Utara	1,28	1,09	104,1	104,2
Sulawesi Tengah	1,95	1,63	104,8	104,2
Sulawesi Selatan	1,17	1,06	95,1	95,6
Sulawesi Tenggara	2,08	2,12	100,6	101,2
Gorontalo	2,26	1,59	100,3	100,4
Sulawesi Barat	2,68	1,92	100,4	100,8
Maluku	2,80	1,77	101,9	101,7
Maluku Utara	2,47	2,11	104,5	104,1
Papua Barat	3,71	2,57	112,0	111,1
Papua	5,39	1,90	113,0	110,9
Indonesia	1,49	1,33	101,0	101,0

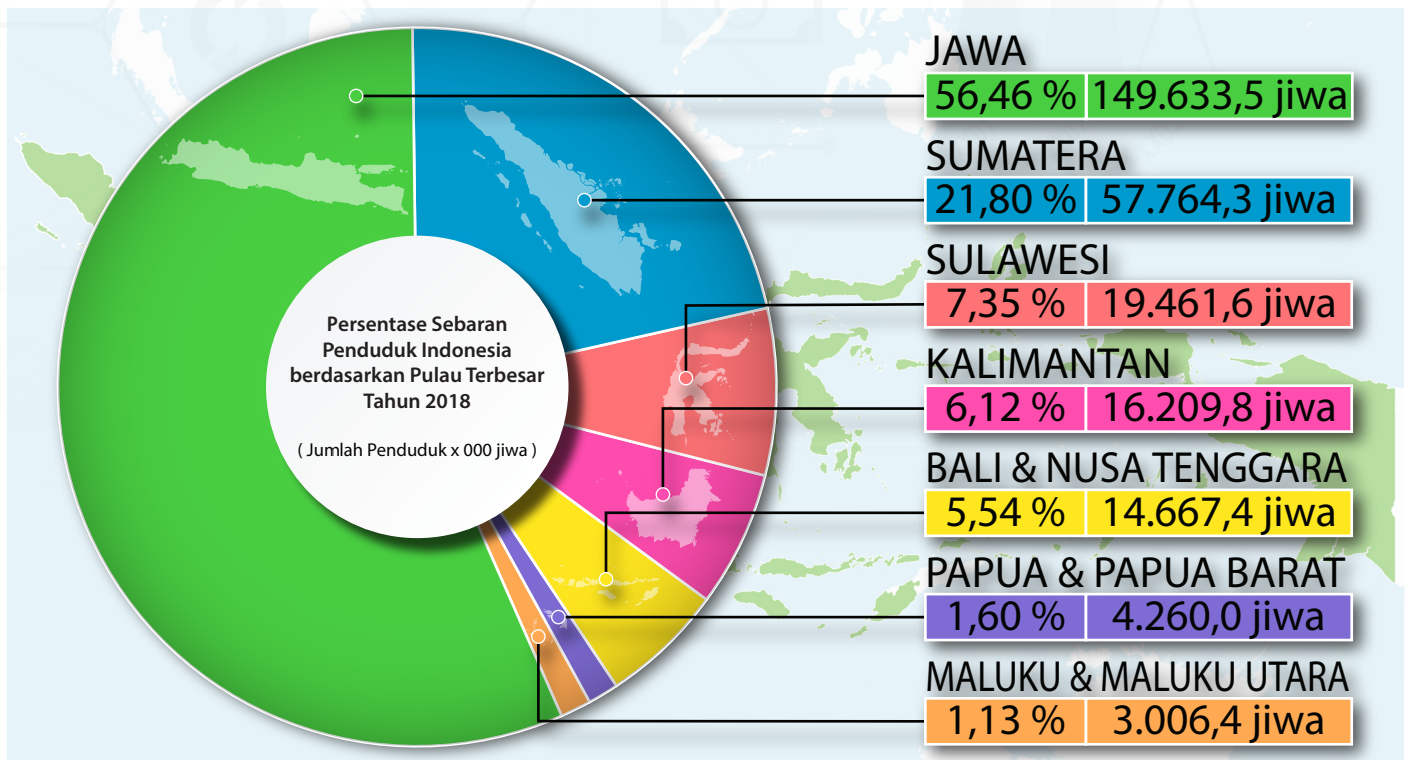
Sumber : Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS :

Catatan :

(1) Hasil SP 2010, Status Mei

(2) Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035 (pertengahan tahun/juni).

(3) Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2000-2010 untuk Aceh dihitung menggunakan data Sensus Penduduk Aceh Nias (SPAN) 2005 dan SP2010



Gambar 2.4

Persentase Sebaran Penduduk Indonesia berdasarkan Pulau Terbesar Tahun 2018

Sebaran penduduk di Indonesia tidak merata ditiap pulau dan provinsi. Hal ini dapat dilihat pada **Gambar 2.7**, sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni sebesar **56,46%** dari total jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah penduduk mencapai **149.635,6 jiwa** menjadikan Pulau Jawa sebagai pulau terpadat di Indonesia.

Kepadatan penduduk di Pulau Jawa dapat terlihat dari angka kepadatan penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 yang mencapai **15.764 jiwa/km²**, angka ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Persentase penduduk yang terbesar pada tahun 2018 adalah provinsi Jawa Barat, sebesar **18,37%** dari keseluruhan penduduk Indonesia.

Tabel 2.6

Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Provinsi Tahun 2018

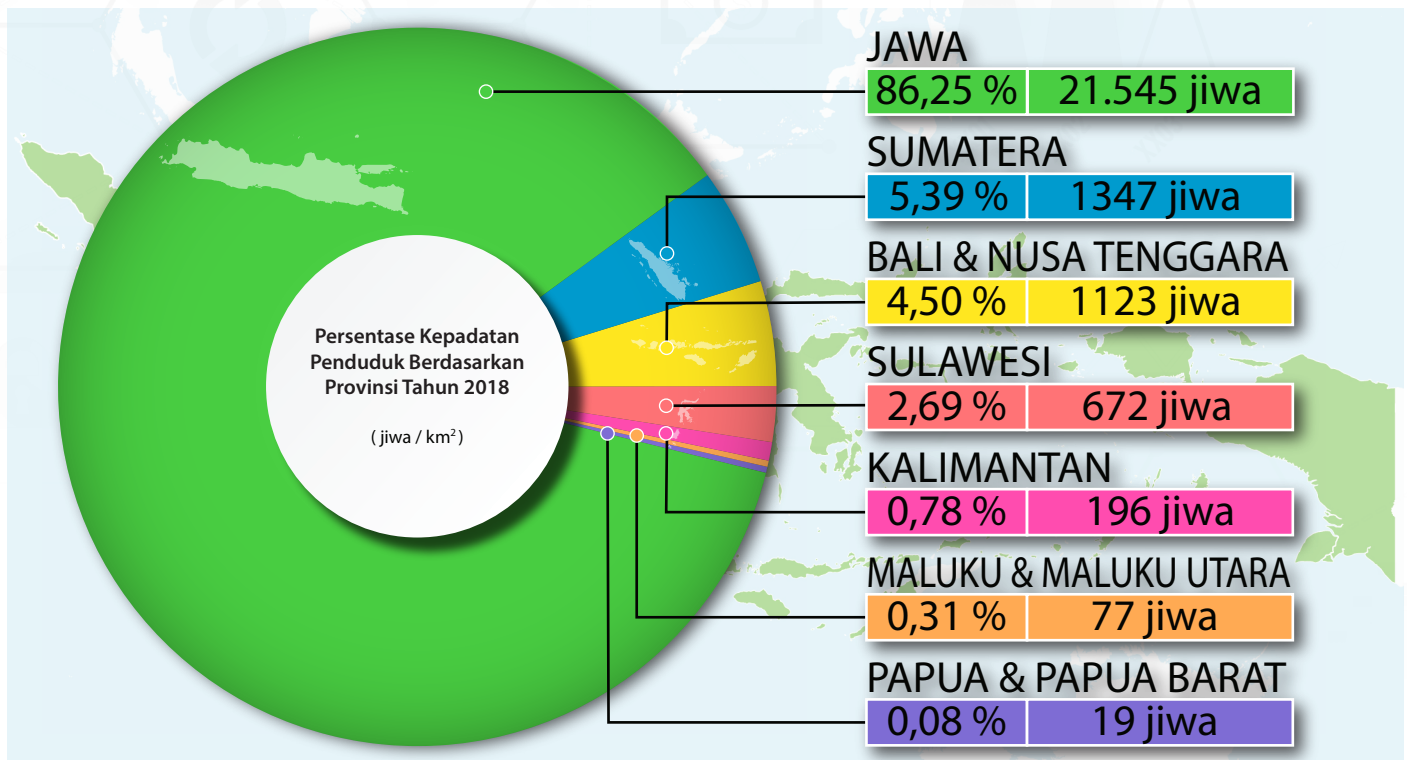
Provinsi	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	
	2010 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾	2010 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾
Aceh	1,90	1,99	78	91
Sumatera Utara	5,46	5,44	179	198
Sumatera Barat	2,04	2,03	116	128
Riau	2,34	2,57	64	78
Jambi	1,30	1,35	62	71
Sumatera Selatan	3,14	3,16	82	91
Bengkulu	0,72	0,74	86	99

Provinsi	Persentase Penduduk		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	
	2010 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾	2010 ⁽¹⁾	2018 ⁽²⁾
Lampung	3,20	3,16	220	242
Kepulauan Bangka Belitung	0,52	0,55	75	89
Kepulauan Riau	0,71	0,81	206	260
DKI Jakarta	4,04	3,95	14.518	15.764
Jawa Barat	18,12	18,37	1.222	1.376
Jawa Tengah	13,6	13,01	989	1.052
D.I. Yogyakarta	1,45	1,43	1.107	1.214
Jawa Timur	15,75	14,91	786	826
Banten	4,48	4,79	1.106	1.313
Bali	1,64	1,62	676	743
Nusa Tenggara Barat	1,89	1,89	243	270
Nusa Tenggara Timur	1,97	2,03	97	110
Kalimantan Barat	1,85	1,89	30	34
Kalimantan Tengah	0,93	1,00	14	17
Kalimantan Selatan	1,53	1,58	94	108
Kalimantan Timur	1,50	1,38	17	28
Kalimantan Utara	0	0,27	0	9
Sulawesi Utara	0,95	0,94	164	179
Sulawesi Tengah	1,11	1,14	43	49
Sulawesi Selatan	3,38	3,31	173	188
Sulawesi Tenggara	0,94	1,00	59	70
Gorontalo	0,44	0,45	93	105
Sulawesi Barat	0,49	0,51	69	81
Maluku	0,65	0,67	33	38
Maluku Utara	0,44	0,46	33	39
PapuaBarat	0,32	0,35	8	9
Papua	1,20	1,25	9	10
Indonesia	100	100	124	138

Sumber : Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS

Catatan :

- (1) Hasil SP 2010, Status Mei
- (2) Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010-2035 (pertengahan tahun/juni).
- (3) Rata-Rata Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2000-2010 untuk Aceh dihitung menggunakan data Sensus Penduduk Aceh Nias (SPAN) 2005 dan SP2010.



Gambar 2.5
Persentase Kepadatan Penduduk Berdasarkan Provinsi Tahun 2018

D. Ekonomi Wilayah

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara dalam suatu periode tertentu, sedangkan pada tingkat regional (provinsi) kondisi ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDB dan PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDB merupakan nilai akhir dari keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut.

Perhitungan nilai PDB dan PDRB dapat dilakukan dengan dua cara yaitu atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Nilai PDB dan PDRB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan nilai PDB dan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada satu tahun tertentu yang kemudian dijadikan dasar. PDB dan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi pada tahun tersebut, sedangkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun dapat dilihat dari nilai PDB dan PDRB atas dasar harga konstan.

Industri pengolahan merupakan lapangan usaha dengan nilai PDB atas dasar harga konstan paling tinggi sejak tahun 2016-2018. Pada tahun 2016 sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar yaitu **21,38%** terhadap pertumbuhan ekonomi nasional atau sebesar **2.016.876,90 miliar rupiah**. Angka tersebut meningkat menjadi **2.193.266,40 miliar rupiah** pada tahun 2018 atau sekitar **21,04%**. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor tertinggi kedua yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016-2018 yaitu **13,21%** atau sebesar **1.376.937,40 miliar rupiah**.

Tabel 2.7

PDB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDB Atas Dasar Harga Konstan (miliar rupiah)		
	2016	2017*	2018**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.210.955,50	1.257.875,50	1.307.025,70
Pertambangan dan Penggalian	774.593,10	779.678,40	796.505,00
Industri Pengolahan	2.016.876,90	2.103.466,10	2.193.266,40
Pengadaan Listrik dan Gas	100.009,90	101.551,30	107.108,60
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.634,60	7.986,10	8.421,80
Konstruksi	925.040,30	987.924,90	1.048.082,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.255.760,80	1.311.762,50	1.376.937,40
Transportasi dan Pergudangan	374.843,40	406.679,40	435.185,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	282.823,40	298.079,40	314.955,20
Informasi dan Komunikasi	459.208,10	503.420,80	538.874,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	378.279,40	398.959,30	415.579,10
Real Estate	279.500,50	289.730,40	300.106,70
Jasa Perusahaan	159.321,70	172.763,80	187.691,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	319.965,00	326.570,70	349.506,60
Jasa Pendidikan	293.887,60	304.762,10	321.083,60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.490,20	109.504,10	117.314,90
Jasa lainnya	156.507,50	170.177,30	185.468,90
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	9.097.697,90	9.530.892,10	10.003.113,70
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	336.915,50	381.811,50	422.202,60
Produk Domestik Bruto	9.434.613,40	9.912.703,60	10.425.316,30

Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Catatan: didasarkan pada berbagai sensus, survei dan sumber lainnya

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa selama tiga tahun sektor industri pengolahan memiliki nilai PDB atas dasar harga berlaku tertinggi. Pada tahun 2016 nilai PDB atas dasar harga berlaku pada sektor industri pengolahan sebesar **2.545.203,60 miliar rupiah** atau sebesar **20,52%**, tahun 2018 sebesar **2.947.299,20 miliar rupiah** atau sebesar **19,86%**. Sektor kedua yang berkontribusi besar terhadap struktur ekonomi nasional yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar **1.900.348,50 miliar rupiah** atau **12,81%**.

Tabel 2.8
PDB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018

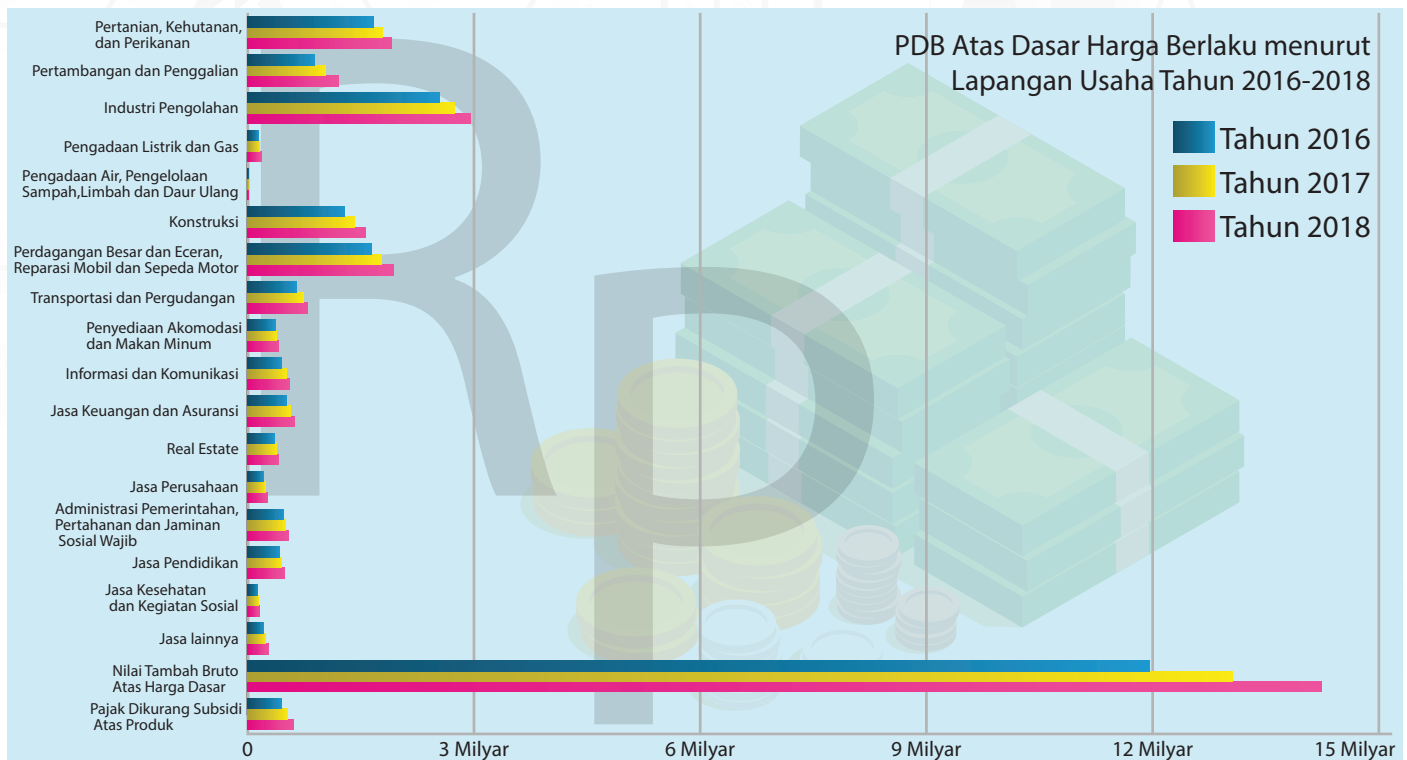
PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	PDB Atas Dasar Harga Berlaku (miliar rupiah)		
	2016	2017*	2018**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.671.597,80	1.787.285,20	1.900.348,50
Pertambangan dan Penggalian	890.868,30	1.029.554,60	1.198.987,10
Industri Pengolahan	2.545.203,60	2.739.711,90	2.947.299,20
Pengadaan Listrik dan Gas	142.344,40	162.339,90	176.346,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.909,40	9.439,60	10.015,50
Konstruksi	1.287.600,80	1.410.513,60	1.562.297,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.635.410,40	1.768.896,10	1.931.911,30
Transportasi dan Pergudangan	644.993,90	735.229,60	797.281,10
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	363.055,50	386.937,00	412.523,10
Informasi dan Komunikasi	449.188,70	513.715,80	559.054,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	520.206,80	571.185,90	616.252,80
Real Estate	350.488,20	382.474,10	406.635,50
Jasa Perusahaan	211.623,60	238.217,00	267.094,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	476.490,90	498.490,90	541.741,20
Jasa Pendidikan	417.344,80	446.254,50	482.134,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	132.100,50	144.621,90	157.923,00
Jasa lainnya	211.427,90	239.259,00	268.632,70
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	11.958.855,50	13.063.868,70	14.236.476,80
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	442.873,00	523.343,90	600.880,70
Produk Domestik Bruto	12.401.728,50	13.587.212,60	14.837.357,50

Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Catatan: didasarkan pada berbagai sensus, survei dan sumber lainnya

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Gambar 2.6.0

PDB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2018

Laju pertumbuhan PDB dapat digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil, dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan, dasar pembuatan prakiraan bisnis khususnya persamaan penjualan. Perkembangan laju pertumbuhan kumulatif PDB Indonesia sangat fluktuatif, tahun 2016 hingga tahun 2017 terjadi peningkatan dari **5,03%** menjadi **5,07%**, sebesar **0,04%**. Sedangkan pada tahun 2018 laju pertumbuhan kumulatif PDB sebesar **5,17%**. Selama tahun 2018 komponen konstruksi mengalami laju pertumbuhan tertinggi diantara komponen PDB menurut pengeluaran. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 2.10** dibawah ini.

Tabel 2.9

Laju Pertumbuhan Kumulatif PDB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2018

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Laju Pertumbuhan Kumulatif (%)		
	2016	2017*	2018**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,37	3,87	3,91
Pertambangan dan Penggalian	0,95	0,66	2,16
Industri Pengolahan	4,26	4,29	4,27
Pengadaan Listrik dan Gas	5,39	1,54	5,47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,6	4,6	5,46
Konstruksi	5,22	6,8	6,09
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,03	4,46	4,97

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Laju Pertumbuhan Kumulatif (%)		
	2016	2017*	2018**
Transportasi dan Pergudangan	7,45	8,49	7,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,17	5,39	5,66
Informasi dan Komunikasi	8,88	9,63	7,04
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,93	5,47	4,17
Real Estate	4,69	3,66	3,58
Jasa Perusahaan	7,36	8,44	8,64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,2	2,06	7,02
Jasa Pendidikan	3,84	3,7	5,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,16	6,84	7,13
Jasa lainnya	8,01	8,73	8,99
Nilai Tambah Bruto Atas Harga Dasar	4,58	4,76	4,95
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	19,06	13,33	10,58
Produk Domestik Bruto	5,03	5,07	5,17

Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Catatan : Didasarkan pada berbagai sensus, survei dan sumber lainnya

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Indikator ekonomi makro di suatu provinsi salah satunya adalah PDRB. PDRB dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan dalam lingkup provinsi. Berdasarkan pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Berdasarkan **Tabel 2.10** tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan yang paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya yaitu sebesar **2.599.174 miliar rupiah** dan **1.736.196 miliar rupiah**. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan terendah adalah Provinsi Maluku Utara, masing-masing sebesar **36.498 miliar rupiah** dan **25.050 miliar rupiah**.

Tabel 2.10
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2018

Provinsi	Nilai PDRB (miliar rupiah)		
	2016	2017*	2018**
Aceh	136.844	145.807	155.912
Sumatera Utara	626.063	684.275	741.193
Sumatera Barat	196.099	213.890	230.529
Riau	681.699	704.798	755.274
Jambi	171.199	1.289.868	208.379
Sumatera Selatan	353.867	382.886	419.723
Bengkulu	55.384	60.658	66.413

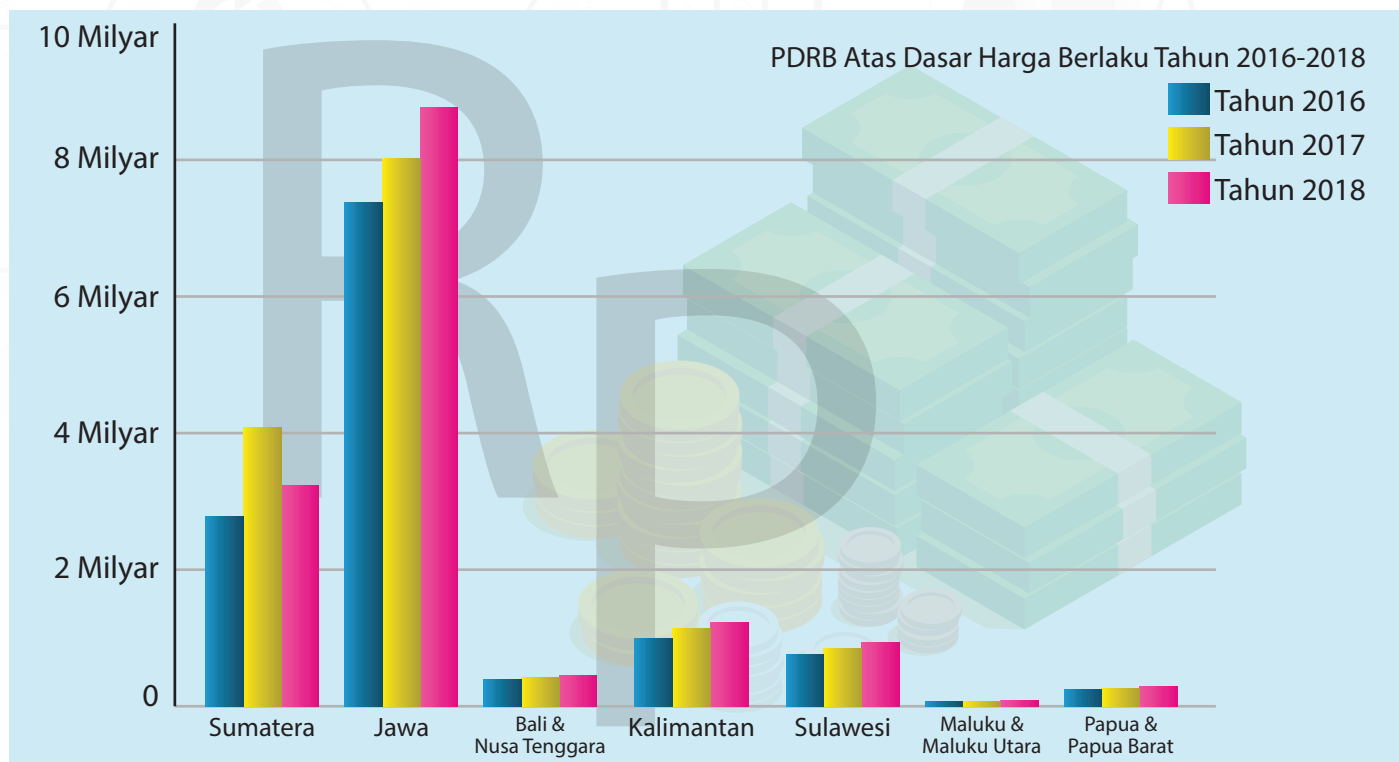
Provinsi	Nilai PDRB (miliar rupiah)		
	2016	2017*	2018**
Lampung	279.418	306.700	333.681
Kepulauan Bangka Belitung	65.048	69.861	73.069
Kepulauan Riau	216.008	227.763	249.077
DKI Jakarta	2.159.074	2.365.363	2.599.174
Jawa Barat	1.653.238	1.788.381	1.962.232
Jawa Tengah	1.087.317	1.172.400	1.268.701
D.I. Yogyakarta	109.962	119.131	129.877
Jawa Timur	1.855.738	2.012.918	2.189.784
Banten	517.898	563.463	614.907
Bali	194.090	213.550	234.431
Nusa Tenggara Barat	116.465	123.862	123.872
Nusa Tenggara Timur	83.743	90.758	99.087
Kalimantan Barat	161.364	177.491	194.033
Kalimantan Tengah	111.967	125.824	138.741
Kalimantan Selatan	146.090	159.181	171.936
Kalimantan Timur	508.880	592.280	638.117
Kalimantan Utara	66.042	76.928	86.059
Sulawesi Utara	100.514	110.121	119.544
Sulawesi Tengah	120.030	133.951	150.636
Sulawesi Selatan	377.109	415.745	462.342
Sulawesi Tenggara	96.995	107.424	118.093
Gorontalo	31.698	34.538	37.736
Sulawesi Barat	35.945	39.584	43.545
Maluku	37.054	39.882	43.065
Maluku Utara	29.151	32.273	36.498
Papua Barat	66.631	71.791	79.644
Papua	173.209	188.945	210.660
Indonesia	12.621.833	13.742.287	14.985.962

Sumber : Badan Pusat Statistik RI dan Sumber Lainnya

Catatan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Gambar 2.7

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2018

Tabel 2.11

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2018

Provinsi	Nilai PDRB (miliar rupiah)		
	2016	2017*	2018**
Aceh	116.374	121.241	126.824
Sumatera Utara	463.775	487.531	512.766
Sumatera Barat	148.134	155.976	163.995
Riau	458.769	471.082	482.087
Jambi	130.501	136.557	142.995
Sumatera Selatan	266.857	281.571	298.569
Bengkulu	40.077	42.074	44.171
Lampung	209.794	220.626	232.214
Kepulauan Bangka Belitung	47.848	49.987	52.212
Kepulauan Riau	162.853	166.111	173.689
DKI Jakarta	1.539.917	1.635.367	1.736.196
Jawa Barat	1.275.619	1.343.864	1.419.689
Jawa Tengah	849.099	893.750	941.283
D.I. Yogyakarta	87.686	92.302	98.027
Jawa Timur	1.405.564	1.482.300	1.563.756
Banten	387.835	410.046	433.884
Bali	137.296	144.945	154.151

Provinsi	Nilai PDRB (miliar rupiah)		
	2016	2017*	2018**
Nusa Tenggara Barat	94.524	94.640	90.323
Nusa Tenggara Timur	59.678	62.725	65.941
Kalimantan Barat	118.183	124.294	130.584
Kalimantan Tengah	83.900	89.541	94.596
Kalimantan Selatan	115.744	121.856	128.106
Kalimantan Timur	439.004	452.742	464.823
Kalimantan Utara	51.165	54.535	57.826
Sulawesi Utara	74.765	79.485	84.259
Sulawesi Tengah	91.015	97.475	103.618
Sulawesi Selatan	269.401	288.814	309.244
Sulawesi Tenggara	77.746	83.002	88.329
Gorontalo	23.507	25.090	26.723
Sulawesi Barat	27.525	29.347	31.177
Maluku	26.284	27.814	29.465
Maluku Utara	21.557	23.211	25.050
Papua Barat	54.711	56.903	60.454
Papua	142.225	148.823	159.729
Indonesia	9.498.833	9.995.625	10.526.756

Sumber : Badan Pusat Statistik RI dan Sumber Lainnya

Catatan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan pada 3 tahun terakhir yakni dimulai tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar konstan tahun 2016 mencapai **5,16%** meningkat menjadi **5,23%** tahun 2017 dan **5,31%** pada tahun 2018. Sampai dengan tahun 2018 terdapat 3 provinsi yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan PDRB yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Papua masing-masing sebesar **2,56 %**, **2,23%**, dan **2,59%**. Sedangkan 3 provinsi yang mengalami penurunan laju pertumbuhan PDRB yang cukup signifikan yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Penurunan laju pertumbuhan PDRB yang paling mencolok adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar **4,68 %**.

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2018

Provinsi	Laju Pertumbuhan (%)		
	2016	2017*	2018**
Aceh	3,29	4,18	4,61
Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18
Sumatera Barat	5,27	5,29	5,14
Riau	2,18	2,68	2,34
Jambi	4,37	4,64	4,71
Sumatera Selatan	5,04	5,51	6,04
Bengkulu	5,28	4,98	4,99
Lampung	5,14	5,16	5,25
Kepulauan Bangka Belitung	4,10	4,47	4,45
Kepulauan Riau	4,98	2,00	4,56
DKI Jakarta	5,87	6,20	6,17
Jawa Barat	5,66	5,35	5,64
Jawa Tengah	5,25	5,26	5,32
D.I. Yogyakarta	5,05	5,26	6,20
Jawa Timur	5,57	5,46	5,50
Banten	5,28	5,73	5,81
Bali	6,33	5,57	6,35
Nusa Tenggara Barat	5,81	0,12	-4,56
Nusa Tenggara Timur	5,12	5,11	5,13
Kalimantan Barat	5,20	5,17	5,06
Kalimantan Tengah	6,35	6,72	5,64
Kalimantan Selatan	4,40	5,28	5,13
Kalimantan Timur	-0,38	3,13	2,67
Kalimantan Utara	3,75	6,59	6,04
Sulawesi Utara	6,16	6,31	6,01
Sulawesi Tengah	9,94	7,10	6,30
Sulawesi Selatan	7,42	7,21	7,07
Sulawesi Tenggara	6,51	6,76	6,42
Gorontalo	6,52	6,73	6,51
Sulawesi Barat	6,01	6,62	6,23

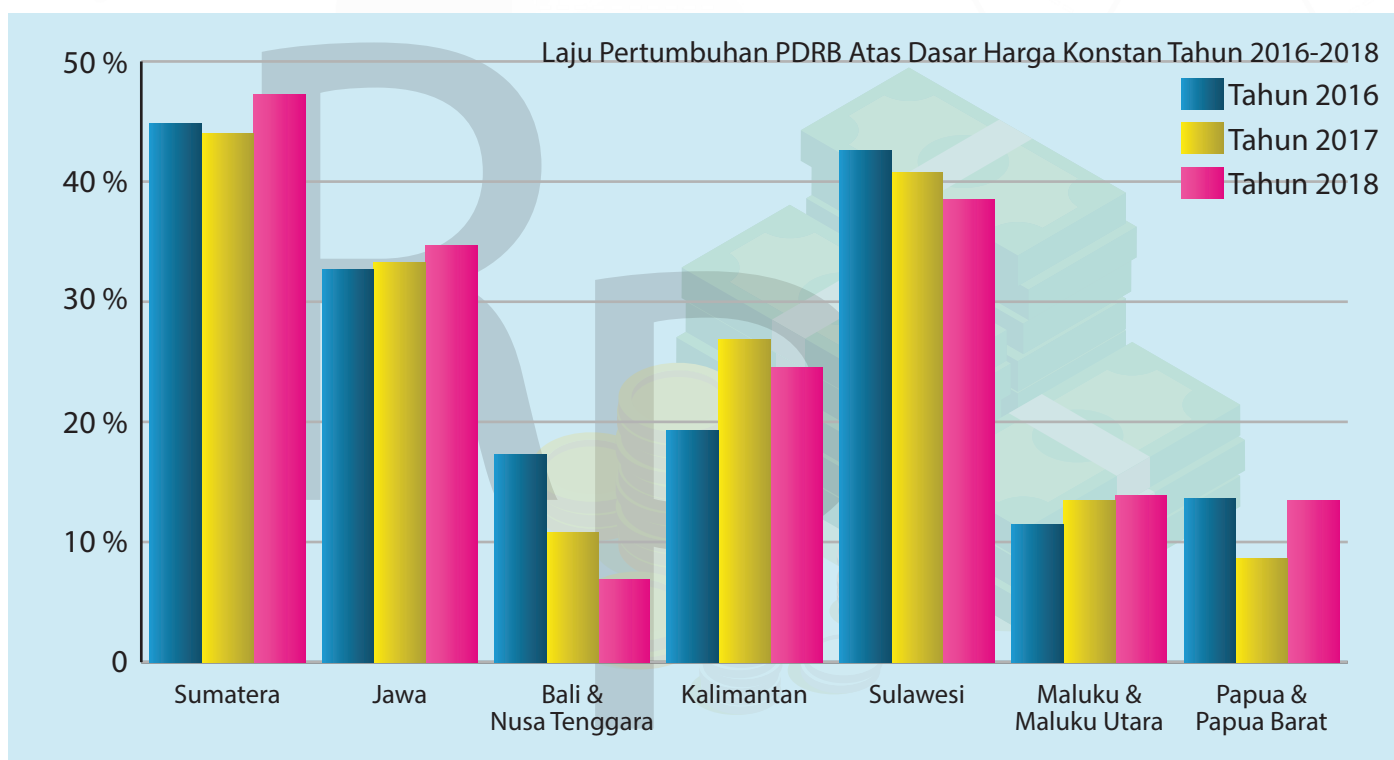
Provinsi	Laju Pertumbuhan (%)		
	2016	2017*	2018**
Maluku	5,73	5,82	5,94
Maluku Utara	5,77	7,67	7,92
Papua Barat	4,52	4,01	6,24
Papua	9,14	4,64	7,23
Indonesia	5,16	5,23	5,31

Sumber : Statistik Indonesia 2019

Catatan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara



Gambar 2.8

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2018

E. Alokasi Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting dalam proses pertumbuhan suatu bangsa baik pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertanian, dan sektor-sektor lainnya. Peran aktif pemerintah, swasta, serta masyarakat sangat dibutuhkan guna terlaksananya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur adalah dengan pengalokasian anggaran untuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, termasuk infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

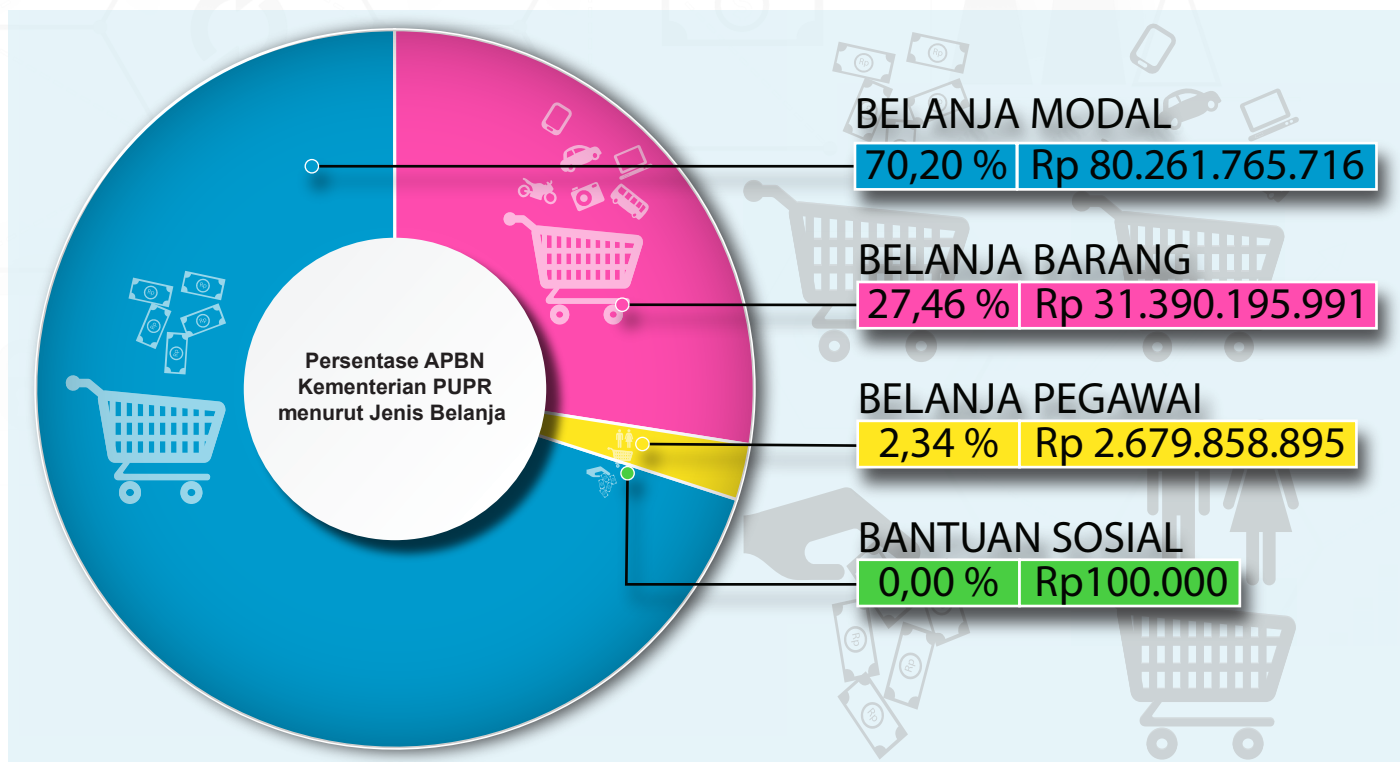
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu kementerian lembaga yang menerima alokasi APBN terbesar. **Tabel 2.13** menampilkan besaran alokasi APBN Kementerian PUPR sejak tahun 2014-2018. Pada tahun 2018 Kementerian PUPR mendapat APBN sebesar **114.331,9 miliar rupiah**. Besarnya anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian PUPR digunakan untuk menjalankan program pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan dan jembatan, pengembangan perumahan dan permukiman serta program pembangunan infrastruktur lainnya.

Tabel 2.13
APBN Kementerian PUPR Tahun 2014-2018

Tahun	APBN Kementerian PUPR (ribu rupiah)
2014	76.323.290.338
2015	119.689.427.065
2016	98.191.487.770
2017	104.343.326.735
2018	114.331.920.602

Sumber: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri

Berdasarkan jenis belanja APBN dibagi menjadi 3 yaitu belanja pegawai, barang, dan modal. Persentase belanja modal merupakan yang terbesar yaitu sebesar **70,20%** atau sebesar **80.261,8 miliar rupiah**. Belanja barang memiliki persentase sebesar **27,46%** atau sebesar **31.390,2 miliar rupiah**, dan sebesar **2,34%** sisanya dialokasikan untuk belanja pegawai senilai **2.679,9 miliar rupiah**.



Gambar 2.9
Persentase APBN Kementerian PUPR menurut Jenis Belanja

Tabel 2.14
APBN Kementerian PUPR Tahun 2018 menurut Jenis Belanja

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (ribu rupiah)
Pegawai	2.679.858.895
Barang	31.390.195.991
Modal	80.261.765.716
Bantuan Sosial	100.000
Total	114.331.920.602

Sumber: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri

BAB III

INFORMASI STATISTIK
PEKERJAAN UMUM &
PERUMAHAN RAKYAT
2019

**STATISTIK
INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR**



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

A. Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai

Dalam **Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008** tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dijelaskan bahwa wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan **2.000 km²**. Sedangkan daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Berdasarkan **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015** tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, wilayah sungai terdiri dari satu atau lebih Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau pulau-pulau kecil, yang meliputi:

1. Wilayah sungai lintas negara;
2. Wilayah sungai lintas provinsi;
3. Wilayah sungai strategis nasional;
4. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
5. Wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

Tabel 3.1 sampai dengan **Tabel 3.5** menyajikan data wilayah sungai berdasarkan statusnya serta jumlah daerah aliran sungai yang terdapat pada wilayah sungai tersebut. Jumlah daerah aliran sungai tersebut merupakan hasil rekapitulasi **Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015**.

Tabel 3.1
Wilayah Sungai Lintas Negara

Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Lokasi
03.07.A1	Benanain	NTT - Timor Leste
03.08.A1	Noelmina	NTT - Timor Leste
04.17.A1	Sesayap	Kalimantan Utara - Serawak (Malaysia)
07.04.A1	Mamberamo - Tami - Apauvar	Papua - Papua Nugini
07.05.A1	Einlanden - Digul - Bikuma	Papua - Papua Nugini

Sumber : Lampiran I.1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

Tabel 3.2
Wilayah Sungai Lintas Provinsi

Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi
01.09.A2	Alas - Singkil	Aceh - Sumatera Utara
01.18.A2	Batang Natal - Batang Batahan	Sumatera Utara - Sumatera Barat
01.23.A2	Rokan	Sumatera Utara - Riau - Sumatera Barat
01.27.A2	Kampar	Riau - Sumatera Barat
01.29.A2	Indragiri - Akuaman	Riau - Sumatera Barat
01.34.A2	Batanghari	Jambi - Sumatera Barat
01.35.A2	Teramang - Muar	Bengkulu - Jambi
01.39.A2	Nasal - Padang Guci	Bengkulu - Sumatera Selatan - Lampung
01.40.A2	Musi - Sugihan - Banyuasin - Lemau	Sumatera Selatan - Jambi - Bengkulu - Lampung
01.43.A2	Mesuji - Tulang Bawang	Lampung - Sumatera Selatan
02.03.A2	Cidanau - Ciujung - Cidurian *	Banten - Jawa Barat
02.05.A2	Ciliwung - Cisadane *	DKI Jakarta - Banten - Jawa Barat
02.09.A2	Cimanuk - Cisanggarung	Jawa Barat - Jawa Tengah
02.10.A2	Citanduy	Jawa Barat - Jawa Tengah
02.17.A2	Progo - Opak - Serang	D.I. Yogyakarta - Jawa Tengah
02.18.A2	Bengawan Solo	Jawa Timur - Jawa Tengah
04.05.A2	Jelai - Kendawangan	Kalimantan Tengah - Kalimantan Barat
04.09.A2	Barito	Kalimantan Tengah - Kalimantan Selatan
04.13.A2	Mahakam	Kalimantan Timur - Kalimantan Utara
04.15.A2	Berau - Kelayi	Kalimantan Timur - Kalimantan Utara
05.03.A2	Dumoga - Sangkub	Sulawesi Utara - Gorontalo
05.04.A2	Limboto - Bolango - Bone	Gorontalo - Sulawesi Utara
05.06.A2	Randangan	Gorontalo - Sulawesi Tengah
05.08.A2	Palu - Lariang	Sulawesi Tengah - Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan
05.09.A2	Parigi - Poso	Sulawesi Tengah - Sulawesi Selatan
05.13.A2	Kalukku - Karama	Sulawesi Barat - Sulawesi Selatan - Sulawesi Tengah
05.14.A2	Pompeangan - Larona	Sulawesi Selatan - Sulawesi Tenggara

Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi
05.15.A2	Saddang	Sulawesi Selatan - Sulawesi Barat
05.18.A2	Towari - Lasusua	Sulawesi Tenggara - Sulawesi Selatan
05.19.A2	Lasolo - Konawe	Sulawesi Tenggara - Sulawesi Tengah
07.02.A2	Omba	Papua Barat - Papua

Sumber : Lampiran I.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Catatan :

* Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai tersebut dengan tetap menjamin kebutuhan air baku Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tabel 3.3
Wilayah Sungai Strategis Nasional

Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi
01.01.A3	Aceh - Meureudu	Aceh
01.04.A3	Woyla - Bateue	Aceh
01.05.A3	Jambo Aye	Aceh
01.11.A3	Belawan - Ular - Padang	Sumatera Utara
01.13.A3	Toba - Asahan	Sumatera Utara
01.25.A3	Siak	Riau
01.32.A3	Kepulauan Riau	Kepulauan Riau
01.41.A3	Bangka	Kepulauan Bangka Belitung
01.45.A3	Seputih - Sekampung	Lampung
02.06.A3	Citarum *	Jawa Barat
02.10.A3	Serayu - Bogowonto	Jawa Tengah
02.14.A3	Jratunseluna	Jawa Tengah
02.17.A3	Brantas	Jawa Timur
03.01.A3	Lombok	Nusa Tenggara Barat
03.02.A3	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
03.03.A3	Flores	Nusa Tenggara Timur
03.05.A3	Kapuas	Kalimantan Barat
04.03.A3	Mentaya - Katingan	Kalimantan Tengah
04.07.A3	Tondano - Sangihe - Talaud - Miangas	Sulawesi Utara
05.01.A3	Paguyaman	Gorontalo
05.05.A3	Walanae - Cenranae	Sulawesi Selatan
05.16.A3	Jeneberang	Sulawesi Selatan
05.17.A3	Halmahera Utara	Maluku Utara
06.01.A3	Halmahera Selatan	Maluku Utara

Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi
06.02.A3	Ambon - Seram	Maluku
06.05.A3	Kepulauan Yamdena - Wetar	Maluku
06.07.A3	Bali - Penida	Bali
07.01.A3	Kamundan - Sebyar	Papua Barat

Sumber : Lampiran I.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Tabel 3.4
Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota

Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi
01.02.B	Teunom - Lambeuso	Aceh
01.03.B	Pase - Peusangan	Aceh
01.06.B	Tamiang - Langsa	Aceh
01.07.B	Baru - Kluet	Aceh
01.10.B	Wampu - Besitang	Sumatera Utara
01.12.B	Bah Bolon	Sumatera Utara
01.14.B	Nias	Sumatera Utara
01.15.B	Sibundong - Batang Toru	Sumatera Utara
01.16.B	Barumun - Kualuh	Sumatera Utara
01.17.B	Batang Angkola - Batang Gadis	Sumatera Utara
01.19.B	Masang - Pasaman	Sumatera Barat
01.21.B	Silaut - Tarusan	Sumatera Barat
01.30.B	Rete	Riau
01.31.B	Bengkalis - Meranti	Riau
01.33.B	Pengabuan - Lagan	Jambi
01.36.B	Sebelat - Ketahun - Lais	Bengkulu
01.37.B	Bengkulu - Alas - Talo	Bengkulu
01.42.B	Belitung	Kepulauan Bangka Belitung
01.44.B	Semangka	Lampung
02.01.B	Cibaliung - Cisawarna	Banten
02.02.B	Ciliman - Cibungur	Banten
02.05.B	Cisadea - Cibareno	Jawa Barat
02.06.B	Ciwulan - Cilaki	Jawa Barat
02.09.B	Pemali - Comal	Jawa Tengah
02.11.B	Bodri - Kuto	Jawa Tengah
02.18.B	Welang - Rejoso	Jawa Timur
02.19.B	Madura - Bawean	Jawa Timur
02.20.B	Bondoyudo - Bedadung	Jawa Timur
02.21.B	Pekalen - Sampean	Jawa Timur

Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi
02.22.B	Baru - Bajulmati	Jawa Timur
03.04.B	Sumba	Nusa Tenggara Timur
03.06.B	Flotim Kepulauan - Lembata - Alor	Nusa Tenggara Timur
04.01.B	Sambas	Kalimantan Barat
04.02.B	Mempawah	Kalimantan Barat
04.04.B	Pawan	Kalimantan Barat
04.06.B	Seruyan	Kalimantan Tengah
04.08.B	Kahayan	Kalimantan Tengah
04.10.B	Cengal - Batulicin	Kalimantan Selatan
04.14.B	Karangan	Kalimantan Timur
04.16.B	Kayan	Kalimantan Utara
05.02.B	Poigar - Ranoyapo	Sulawesi Utara
05.07.B	Lambunu - Buol	Sulawesi Tengah
05.10.B	Bongka - Mentawa	Sulawesi Tengah
05.11.B	Kepulauan Banggai	Sulawesi Tengah
05.12.B	Laa - Tambalako	Sulawesi Tengah
05.20.B	Poleang - Roraya	Sulawesi Tenggara
05.21.B	Muna	Sulawesi Tenggara
05.22.B	Buton	Sulawesi Tenggara
06.03.B	Kepulauan Sula - Obi	Maluku Utara
06.04.B	Buru	Maluku
06.06.B	Kepulauan Kei - Aru	Maluku
07.03.B	Wapoga - Mimika	Papua

Sumber : Lampiran I.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Tabel 3.5
Wilayah Sungai dalam Satu Kabupaten/Kota

Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Kabupaten/Kota
01.08.C	Simeulue	Aceh	Simeuleu
01.20.C	Siberut - Pagai - Sipora	Sumatera Barat	Mentawai
01.22.C	Kubu	Riau	Rokan Hilir
01.24.C	Bukit Batu	Riau	Bengkalis
01.26.C	Rawa	Riau	Siak
01.28.C	Guntung - Kateman	Riau	Indragiri Hilir
01.38.C	Enggano	Bengkulu	Bengkulu Utara
02.04.C*	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	Kepulauan Seribu

Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Provinsi	Kabupaten/Kota
02.12.C	Kepulauan Karimunjawa	Jawa Tengah	Jepara
02.13.C	Wiso - Gelis	Jawa Tengah	Jepara
04.12.C	Pulau Laut	Kalimantan Selatan	Kota Baru
04.12.C	Kendilo	Kalimantan Timur	Paser

Sumber : Lampiran I.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

B. Bendungan/Waduk

Pengertian bendungan sebagaimana yang tercantum dalam **Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010** tentang Bendungan, yaitu bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Sedangkan waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. Tujuan pembangunan bendungan antara lain adalah untuk meningkatkan manfaat serta fungsi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, fungsi pengamanan tampungan limbah tambang (*tailing*) atau tampungan lumpur.

Tak hanya itu bendungan juga dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air, dan tempat berwisata. Manfaat pembangunan bendungan ada dua yaitu *single purpose dam* dan *multi purpose dam*. *Single purpose dam* merupakan bendungan yang dibangun dengan tujuan khusus, misal hanya sebagai penyedia air irigasi atau pengendali banjir. *Multi purpose dam* dibangun dengan manfaat beragam seperti penyedia air irigasi, air baku atau air minum, sebagai pembangkit listrik, dan tempat wisata disaat yang bersamaan. Hal penting dalam pemeliharaan bendungan adalah ketersediaan air, bendungan dibangun untuk membendung air sungai sebagai cadangan air. Penanggung jawab pembangunan serta pemeliharaan bendungan adalah pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, atau badan usaha.

Tabel 3.6
Program Pembangunan Bendungan 2014-2019

No.	Pulau	Volume (juta m ³)	Manfaat				Jumlah (buah)
			Irigasi (ha)	Reduksi Banjir (m ³ /det)	Air Baku (m ³ /det)	Listrik (MW)	
1	Sumatera	775,2	130.582	1.889	10	58	10
2	Jawa	2.188,21	198.438	5.008	30	152	24
3	Kalimantan	921,96	28.679	1.120	14	21	5
4	Bali	24,22	2.375	-	3	3	3
5	Nusa Tenggara Barat	149,29	13.646	1.044	1	10	5

No.	Pulau	Volume (juta m³)	Manfaat				Jumlah (buah)
			Irigasi (ha)	Reduksi Banjir (m³/det)	Air Baku (m³/det)	Listrik (MW)	
6	Nusa Tenggara Timur	146,5	14.377	1.859	1	4	7
7	Sulawesi	1.292,94	80.017	1.596	11	47	9
8	Maluku	57	10.000	471	1	6	1
9	Papua	153,37	5.500	-	-	65	1
Total		5.708,69	483.614	12.986,48	70,48	365,01	65

Sumber : Subdit Data dan Informasi Ditjen Sumber Daya Air, Status 2018

Tabel 3.7
Daftar 65 Bendungan Rencana di Indonesia

No	Nama Bendungan	Lokasi	Volume (juta m³)	Manfaat			
				Irigasi (ha)	Reduksi Banjir (m³/det)	Air Baku (m³/det)	Listrik (MW)
Konstruksi 2018							
1	Sidan	Bali	3,82	-	-	1,75	0,65
2	Komering II/ Tigadihadji	Sumatera Selatan	130	18.219	-	1	40
3	Bener	Jawa Tengah	90,39	15.519	210	1,5	6
4	Randugunting	Jawa Tengah	14,42	630	-	0,15	-
5	Jlantah	Jawa Tengah	11,96	1.493	-	0,15	0,25
6	Sadawarna	Jawa Barat	67,94	4.500	1.039	4,5	-
7	Beringin Sila	Nusa Tenggara Barat	46,45	3.500	-	0,076	1,44
8	Manikin	Nusa Tenggara Timur	28,2	310	600	0,7	0,1
9	Bulango Ulu	Gorontalo	117	4.194	-	1,16	2,7
10	Bagong	Jawa Timur	17,4	854	-	0,465	0,5
11	Meninting	Nusa Tenggara Barat	12,16	1.519	-	0,15	0,8
12	Rukoh	Aceh	128,66	11.950	390	0,85	1,2
13	Tamblang	Bali	7,4	581	-	0,41	0,38
Total Bendungan Konstruksi 2018			675,8	63.269	2.239	12,86	54,02
Konstruksi 2019							
1	Mbay	Nusat Tenggara Timur	34,14	6.378	-	0,234	0,2
2	Jenelata	Sulawesi Selatan	224,72	23.240	475	3,12	10,9
3	Pelosika	Sulawesi Tenggara	590	22.000	647	0,808	20
4	Kolhua	Nusa Tenggara Timur	6,65	-	-	0,15	0,04

No	Nama Bendungan	Lokasi	Volume (juta m ³)	Manfaat			
				Irigasi (ha)	Reduksi Banjir (m ³ /det)	Air Baku (m ³ /det)	Listrik (MW)
5	Lambakan	Kalimantan Timur	718	20.000	215	12	15
6	Jragung	Jawa Tengah	129	6.435	-	2	6
7	Riam Kiwa	Kalimantan Selatan	110,57	1.700	797	1	0,9
8	Tiro	Aceh	41,44	6.330	350	0,85	2
9	Digoel	Papua	153,37	5.500	-	0,01	65
Total Bendungan Konstruksi 2019			2.007,89	91.583	2.484	20,17	120,04

Sumber : Subdit Data dan Informasi Ditjen Sumber Daya Air, Status 2018

Tabel 3.8
Daftar Bendungan Eksisting di Indonesia

No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
1	Sianjo - anjo	WS Alas-Singkil	DAS Singkil	Aceh	Aceh Singkil
2	Keuliling		DAS Aceh	Aceh	Aceh Besar
3	Rajui	WS Aceh-Meureudu	DAS Batee	Aceh	Pidie
4	Leubok	WS Aceh-Meureudu	DAS Aceh	Aceh	Aceh Besar
5	Paya Seunara	WS Aceh-Meureudu	DAS Sabang	Aceh	Sabang
6	Sipansihaporas	WS Sibudong-Batang Toru	DAS Woyla	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah
7	Siruar	WS Toba-Asahan	DAS Asahan	Sumatera Utara	Toba Samosir
8	Martabe	WS Sibudong-Batang Toru	DAS Batang Toru	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan
9	Sigura-gura	WS Toba-Asahan	DAS Asahan	Sumatera Utara	Toba Samosir
10	Tangga	WS Toba-Asahan	DAS Asahan	Sumatera Utara	Toba Samosir
11	Kotapanjang	WS Kampar	DAS Kampar	Riau	Kampar
12	Musi	WS Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau	DAS Musi	Bengkulu	Kepahiang
13	Batu Tegi	WS Seputih-Sekampung	DAS Sekampung	Lampung	Talang Padang
14	Way Jepara	WS Seputih-Sekampung	DAS Jepara	Lampung	Metro
15	Way Rarem	WS Mesuji-Tulangbawang	DAS Tulang Bawang	Lampung	Kotabumi
16	Way Linggo	WS Semangka	DAS Semangka	Lampung	Lampung Barat
17	Duriangkang	WS Kepulauan Batam-Bintan	DAS Balo	Kepulauan Riau	Batam
18	Muka Kuning	WS Kepulauan Batam-Bintan	DAS Tiban Lama	Kepulauan Riau	Batam

No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
19	Sei Harapan	WS Kepulauan Batam-Bintan	DAS Ladi	Kepulauan Riau	Batam
20	Lagoi	WS Kepulauan Batam-Bintan	DAS Bintan	Kepulauan Riau	Bintan
21	Ladi	WS Kepulauan Batam-Bintan	DAS Tiban Lama	Kepulauan Riau	Batam
22	Darma	WS Cimanuk-Cisanggarung	DAS Cisanggarung	Jawa Barat	Kuningan
23	Situ Sedong	WS Cimanuk-Cisanggarung	DAS Cikalapu	Jawa Barat	Cirebon
24	Jatigede		DAS Cimanuk	Jawa Barat	Sumedang
25	Situ Ciburuy	WS Citarum	DAS Citarum	Jawa Barat	Bandung
26	Situ Patok	WS Cimanuk-Cisanggarung	DAS Kenari	Jawa Barat	Cirebon
27	Situ Lembang	WS Citarum	DAS Citarum	Jawa Barat	Bandung
28	Situ Ranca Beureum	WS Cimanuk-Cisanggarung	DAS Cibuaya	Jawa Barat	Majalengka
29	Situ Bolang	WS Cimanuk-Cisanggarung	DAS Cibuaya	Jawa Barat	Indramayu
30	Jatiluhur / Djuanda		DAS Citarum	Jawa Barat	Purwakarta
31	Cipancuh	WS Citarum	DAS Cibodas	Jawa Barat	Indramayu
32	Situ Kamojing	WS Citarum	DAS Cikarokrok	Jawa Barat	Karawang
33	Pongkor	WS Ciliwung-Cisadane	DAS Cisadane	Jawa Barat	Bogor
34	Cileunca	WS Citarum	DAS Citarum	Jawa Barat	Bogor
35	Cipanunjang	WS Citarum	DAS Citarum	Jawa Barat	Bandung
36	Cirata	WS Citarum	DAS Citarum	Jawa Barat	Purakarta
37	Saguling	WS Citarum	DAS Citarum	Jawa Barat	Bandung Barat
38	Garung	WS Serayu-Bogowonto	DAS Serayu	Jawa Tengah	Wonosobo
39	Mrica	WS Serayu-Bogowonto	DAS Serayu	Jawa Tengah	Banjarnegara
40	Nawangan	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri
41	Song Putri	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri
42	Ngancar	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri
43	Plumbon	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri
44	Parang Joho	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri
45	Kedung Uling	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri
46	Wonogiri / Gajah Mungkur	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri

No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
47	Krisak	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Wonogiri
48	Mulur	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Sukoharjo
49	Lalung	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Karanganyar
50	Wadas Lintang	WS Serayu-Bogowonto	DAS Wawar	Jawa Tengah	Kebumen
51	Delingan	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Karanganyar
52	Sempor	WS Serayu-Bogowonto	DAS Telomoyo	Jawa Tengah	Kebumen
53	Botok	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Sragen
54	Cengklik	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Boyolali
55	Gebyar	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Sragen/Solo
56	Kembangan	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Sragen
57	vvv	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Sragen
58	Klego	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Tengah	Boyolali
59	Penjalin	WS Pemali-Comal	DAS Pemali	Jawa Tengah	Brebes
60	Kedung Ombo	WS Jratun Seluna	DAS Serang	Jawa Tengah	Boyolali
61	Simo	WS Jratun Seluna	DAS Serang	Jawa Tengah	Grobogan
62	Butak	WS Jratun Seluna	DAS Serang	Jawa Tengah	Grobogan
63	Nglangon	WS Jratun Seluna	DAS Serang	Jawa Tengah	Purwodadi
64	Sanggeh	WS Jratun Seluna	DAS Serang	Jawa Tengah	Grobogan
65	Jati Barang	WS Jratun Seluna	DAS K.Garang	Jawa Tengah	Semarang
66	Malahayu	WS Cimanuk-Cisanggarung	DAS Kabuyutan	Jawa Tengah	Brebes
67	Cacaban	WS Pemali-Comal	DAS Cacaban	Jawa Tengah	Tegal
68	Greneng	WS Jratun Seluna	DAS Serang	Jawa Tengah	Blora
69	Tempuran	WS Jratun Seluna	DAS Serang	Jawa Tengah	Blora
70	Panohan	WS Jratun Seluna	DAS K.Grubugan	Jawa Tengah	Rembang
71	Lodan	WS Bengawan Solo	DAS Kesambi	Jawa Tengah	Rembang
72	Grawan	WS Jratun Seluna	DAS Babadan	Jawa Tengah	Rembang
73	Banyukuwung	WS Jratun Seluna	DAS Babadan	Jawa Tengah	Rembang
74	Gembong	WS Jratun Seluna	DAS K.Juwana	Jawa Tengah	Kudus
75	Gunung Rowo	WS Jratun Seluna	DAS K.Juwana	Jawa Tengah	Pati
76	Sermo	WS Progo-Opak-Serang	Serang	D.I. Yogyakarta	Kulon Progo
77	Sengguruh		DAS Brantas	Jawa Timur	Malang

No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
78	Karang Kates / Sutami		DAS Brantas	Jawa Timur	Malang
79	Lahor		DAS Brantas	Jawa Timur	Malang
80	Wlingi		DAS Brantas	Jawa Timur	Blitar
81	Ngepeh		DAS Brantas	Jawa Timur	Trenggalek
82	Wonorejo		DAS Brantas	Jawa Timur	Tulung Agung
83	Bajulmati	WS Baru-Bajulmati	DAS BAJULMATI	Jawa Timur	Situbondo
84	Selorejo		DAS Brantas	Jawa Timur	Malang
85	Sampean Baru	WS Pekalen-Sampean	DAS Sampean	Jawa Timur	Bondowoso
86	Tlogo Ngebel	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Timur	Ponorogo
87	Gonggang	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Timur	Magetan
88	Oro - Oro Ombo		DAS Brantas	Jawa Timur	Nganjuk
89	Telaga Pasir / Sarangan	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Timur	Magetan
90	Dawuhan	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Timur	Madiun
91	Saradan	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Timur	Madiun
92	Bening / Widas		DAS Brantas	Jawa Timur	Nganjuk
93	Kedung Sengon		DAS Brantas	Jawa Timur	Nganjuk
94	Sumber Kepuh	WS Brantas	DAS Brantas	Jawa Timur	Nganjuk
95	Notopuro	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Timur	Madiun
96	Wr. Jenggot / Grojokan	WS Brantas	DAS Brantas	Jawa Timur	Jombang
97	Kedung Brubus	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Timur	Madiun
98	Sangiran	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Timur	Ngawi
99	Pondok	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Timur	Ngawi
100	Kedung Bendo	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Timur	Madiun
101	Pacal	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Timur	Bojonegoro
102	Nglambangan	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Timur	Bojonegoro
103	Prijetan	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Timur	Bojonegoro
104	Gondang	WS Bengawan Solo	DAS Corong	Jawa Timur	Lamongan
105	Canggih	WS Bengawan Solo	DAS Corong	Jawa Timur	Lamongan

No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
106	Klampis	WS Kepulauan Madura	DAS Blega	Jawa Timur	Sampang
107	Manyar	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Timur	Lamongan
108	Cungkup	WS Bengawan Solo	DAS Bengawan Solo	Jawa Timur	Lamongan
109	Nipah	WS Kepulauan Madura	DAS Nipah	Jawa Timur	Sampang
110	Gintung	WS Ciliwung-Cisadane	DAS Angke	Banten	Tangerang Selatan
111	Krenceng	WS Cidanau-Ciujung-Cidurian	DAS Cikebeletes	Banten	Cilegon
112	Telaga Tunjung	WS Bali-Penida	DAS Yeh Ho	Bali	Tabanan
113	Benel	WS Bali-Penida	DAS Aya Barat	Bali	Jembrana
114	Palasari	WS Bali-Penida	DAS Sangianggede	Bali	Jembrana
115	Titab	WS Bali-Penida	DAS Saba	Bali	Buleleng
116	Grokgak	WS Bali-Penida	DAS Gerokgak	Bali	Buleleng
117	Pancor	WS Lombok	DAS Tampah	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
118	Batu Bokah	WS Lombok	DAS Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
119	Labangka	WS Sumbawa	DAS Labangka	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
120	Sepit	WS Lombok	DAS Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Mataram
121	Jangkih Jawe	WS Lombok	DAS Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
122	Batu Nampar	WS Lombok	DAS Pare Ganti	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
123	Selante	WS Sumbawa	DAS Nangagali	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
124	Kengkang	WS Lombok	DAS Kelep	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat
125	Pare	WS Lombok	DAS Supak	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
126	Gapit	WS Sumbawa	DAS Boal	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
127	Lamenta	WS Sumbawa	DAS Boal	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
128	Telaga Lebur	WS Lombok	DAS Kelep	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat
129	Tibu Kuning	WS Lombok	DAS Siung	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat
130	Sepayung Dalam	WS Sumbawa	DAS Nangagali	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa

No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
131	Sejari I	WS Sumbawa	DAS Kembang Sari	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
132	Tolotangga	WS Sumbawa	DAS Nontodue	Nusa Tenggara Barat	Bima
133	Jompong	WS Sumbawa	DAS Jompong	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
134	Pengga	WS Lombok	DAS Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
135	Muer	WS Sumbawa	DAS Bera	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
136	Lingkuk Lamun	WS Lombok	DAS Rere Penembem	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
137	Mapasan	WS Lombok	DAS Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
138	Batujai	WS Lombok	DAS Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
139	Kaswangi	WS Sumbawa	DAS Barore	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
140	Soncolopi	WS Sumbawa	DAS Sawe	Nusa Tenggara Barat	Dompu
141	Kali Ujung	WS Lombok	DAS Rere Penembem	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
142	Bringe	WS Lombok	DAS Rere Penembem	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
143	Brangkolong	WS Sumbawa	DAS Bera	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
144	Pelaperado	WS Sumbawa	DAS Palaparado	Nusa Tenggara Barat	Bima
145	Parado Kanca	WS Sumbawa	DAS Palaparado	Nusa Tenggara Barat	Bima
146	Surabaya	WS Lombok	DAS Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
147	Laju	WS Sumbawa	DAS Lido	Nusa Tenggara Barat	Bima
148	Mamak	WS Sumbawa	DAS Moyo	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
149	Tiu Kulit	WS Sumbawa	DAS Bera	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
150	Peneda Gandor	WS Lombok	DAS Aikampat	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
151	Pandanduri	WS Lombok	DAS Palung	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
152	Waworoda	WS Sumbawa	DAS Waworoda	Nusa Tenggara Barat	Bima
153	Pemasar	WS Sumbawa	DAS Bera	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa

No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
154	Jelantik	WS Lombok	DAS Dodokan	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
155	Jambu	WS Sumbawa	DAS Depa	Nusa Tenggara Barat	Dompu
156	Mengkoang	WS Sumbawa	DAS Nangabangka	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
157	Ncera	WS Sumbawa	DAS Lapasariuru	Nusa Tenggara Barat	Bima
158	Sumi	WS Sumbawa	DAS Cabang	Nusa Tenggara Barat	Bima
159	Lanangga	WS Sumbawa	DAS Labalaju	Nusa Tenggara Barat	Dompu
160	Batu Bulan	WS Sumbawa	DAS Moyo	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
161	Mantar	WS Sumbawa	DAS Mantar	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
162	Serading	WS Sumbawa	DAS Kebantubeh	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
163	Woro	WS Sumbawa	DAS Campa	Nusa Tenggara Barat	Bima
164	Tonda Selatan	WS Sumbawa	DAS Tarei	Nusa Tenggara Barat	Dompu
165	Roi Roka	WS Sumbawa	DAS Lapasariuru	Nusa Tenggara Barat	Bima
166	Pernek	WS Sumbawa	DAS Moyo	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
167	Senang	WS Lombok	DAS Tanggek	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
168	Gunung Paok	WS Lombok	DAS Renggung Perempung	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
169	Olat Rawa	WS Sumbawa	DAS Olatrawa Atas	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
170	Kesi	WS Sumbawa	DAS Bonto	Nusa Tenggara Barat	Dompu
171	Kowo	WS Sumbawa	DAS Angi	Nusa Tenggara Barat	Bima
172	Kempo	WS Sumbawa	DAS Lanco	Nusa Tenggara Barat	Dompu
173	Penyaring	WS Sumbawa	DAS Moyo	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
174	Sanggupasante	WS Sumbawa	DAS Kambu	Nusa Tenggara Barat	Dompu
175	Saneo	WS Sumbawa	DAS Tarei	Nusa Tenggara Barat	Dompu
176	Oi Toi	WS Sumbawa	DAS Kanahi	Nusa Tenggara Barat	Bima

No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
177	Wera I	WS Sumbawa	DAS Nangawera	Nusa Tenggara Barat	Bima
178	Lasi II	WS Sumbawa	DAS Wai	Nusa Tenggara Barat	Dompu
179	Danau Tua		DAS Meoain	Nusa Tenggara Timur	Kupang
180	Kapalengga	WS Noel Mina	DAS Le Gonggo	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao
181	Manubulu	WS Noel Mina	DAS Le Kayubeluba	Nusa Tenggara Timur	Kupang
182	Matasio	WS Noel Mina	DAS Serubeba	Nusa Tenggara Timur	Kupang
183	Lere	WS Noel Mina	DAS Raekore	Nusa Tenggara Timur	Kupang
184	Benkoko	WS Noel Mina	DAS Kuanheun	Nusa Tenggara Timur	Kupang
185	Oel Tua	WS Noel Mina	DAS Baumata	Nusa Tenggara Timur	Kupang
186	Tilong	WS Noel Mina	DAS Noel Baki	Nusa Tenggara Timur	Kupang
187	Karinga	WS Sumba	DAS Kabar	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur
188	Lokojange	WS Sumba	DAS Labariri	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat
189	Rakawatu	WS Sumba	DAS Tidas	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur
190	Haekrit	WS Benanain	DAS Umaklaran	Nusa Tenggara Timur	Belu
191	Haliwen	WS Benanain	DAS Umaklaran	Nusa Tenggara Timur	Belu
192	Waerita	WS Flores	DAS Kalimati	Nusa Tenggara Timur	Sikka
193	Padang Panjang	WS Flotim Kepulauan-Lembata-Alor	DAS Irawuri	Nusa Tenggara Timur	Belu
194	Riam Kanan	WS Barito	DAS Barito	Kalimantan Selatan	Banjar
195	Manggar	WS Mahakam	DAS Manggar	Kalimantan Timur	Balikpapan
196	Samboja	WS Mahakam	DAS Samboja	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara
197	Benanga	WS Mahakam	DAS Mahakam	Kalimantan Timur	Samarinda
198	Teritip		DAS Mahakam	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
199	Merancang	WS Berau-Kelai	DAS Berau	Kalimantan Timur	Berau
200	Beriwit	WS Berau-Kelai	DAS Berau	Kalimantan Timur	Berau
201	Namuk	WS Mahakam	DAS Mahakam	Kalimantan Timur	Kutai Barat

No	Bendungan Eksisting	Wilayah Sungai	DAS	Provinsi	Kab Kota
202	Binalatung	WS Sesayap	DAS Tarakan	Kalimantan Utara	Tarakan
203	Bili Bili	WS Jeneberang	DAS Jeneberang	Sulawesi Selatan	Gowa
204	Salomeko	WS Jeneberang	DAS Luppereng	Sulawesi Selatan	Watampone
205	Ponre - Ponre	WS Walanae-Cenranae	DAS Bila Walanae	Sulawesi Selatan	Bone
206	Kalola	WS Walanae-Cenranae	DAS Bila Walanae	Sulawesi Selatan	Wajo
207	Bakaru	WS Saddang	DAS Sadang	Sulawesi Selatan	Pinrang
208	Balambano	WS Pompengan-Larona	DAS Larona	Sulawesi Selatan	Luwu Timur
209	Karebbe	WS Pompengan-Larona	DAS Larona	Sulawesi Selatan	Luwu Timur
210	Larona (Batubesi)	WS Pompengan-Larona	DAS Larona	Sulawesi Selatan	Luwu Timur
211	Abusur	WS Kepulauan Yamdena-Wetar	DAS Ilputih	Maluku	Wohreli
212	Gosowong	WS Kepulauan Yamdena-Wetar	DAS Ilputih	Maluku Utara	Halmahera Utara
213	Lereh II			Papua	Kab. Jayapura
214	Kalibumi			Papua	Kab. Nabire
215	Tami			Papua	Kota Jayapura

Tabel 3.9
Daftar Bendungan Eksisting di Indonesia (lanjutan)

No	Bendungan Eksisting	Manfaat Irigasi			Volume (m ³)	Tipe
		Irigasi (ha)	DMI	PLTA		
1	Sianjo - anjo	850,00	70.000,00	-	1.523.000,00	Urugan Tanah Homogen
2	Keuliling	4.791,00	-	-	18.360.000,00	Urugan Tanah Dengan Inti
3	Rajui	1.000,00	50.000,00	-	2.050.000,00	Urugan Zonal Dengan Inti
4	Leubok	515,00	-	-	807.000,00	Urugan Zonal
5	Paya Seunara	515,00	-	-	807.000,00	Urugan Homogen Dilapisi
6	Sipansihaporas	-	-	-	-	Beton Gravity
7	Siruar	-	-	-	-	Beton Gravity
8	Martabe	-	-	-	-	Urugan Batu
9	Sigura-gura	-	-	-	-	Beton Gravity
10	Tangga	-	-	-	-	Beton Berbentuk Pelengkung / Busur
11	Kotapanjang	-	-	-	-	Beton Gravity
12	Musi	-	-	-	-	Beton Gravity

No	Bendungan Eksisting	Manfaat Irigasi			Volume (m³)	Tipe
		Irigasi (ha)	DMI	PLTA		
13	Batu Tegi	66,57	0,23	-	860.000.000,00	Urugan Batu Dengan Inti
14	Way Jepara	7,00	-	-	34.850.000,00	Urugan Tanah Homogen
15	Way Rarem	22,00	-	-	72.400.000,00	Urugan Batu Dengan Inti
16	Way Linggo	-	-	-	-	Urugan Tanah
17	Duriangkang	-	-	-	-	Urugan Tanah
18	Muka Kuning	-	-	-	-	Urugan Tanah
19	Sei Harapan	-	-	-	-	Urugan Tanah
20	Lagoi	-	-	-	-	Urugan Tanah
21	Ladi	-	-	-	-	Beton Gravity
22	Darma	22.060,00	-	-	37.900.000,00	Urugan Tanah Dengan Inti
23	Situ Sedong	629,00	-	-	2.100.000,00	Urugan Tanah Dengan Inti
24	Jatigede	90.000,00	3.500,00	110,00	979.000.000,00	Urugan Batu
25	Situ Ciburuy	137,00	-	-	2.580.000,00	Urugan Tanah Dengan Inti
26	Situ Patok	3.000,00	-	-	14.000.000,00	Urugan Tanah Homogen
27	Situ Lembang	-	-	-	337.000,00	Urugan Tanah Dengan Inti
28	Situ Ranca Beureum	188,00	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
29	Situ Bolang	365,00	-	-	1.237.705,00	Urugan Tanah Dengan Inti
30	Jatiluhur / Djuanda	227.062,00	-	15.000.000,00	1.000.000.000,00	Urugan Tanah Dengan Inti
31	Cipancuh	6.400,00	-	-	6.000.000,00	Urugan Tanah Homogen
32	Situ Kamojing	655,00	-	-	2.358.000,00	Komposit beton
33	Pongkor	-	-	-	-	Urugan Tanah
34	Cileunca	-	-	-	-	Urugan Tanah
35	Cipanunjang	-	-	-	-	Urugan Tanah
36	Cirata	-	-	-	-	Urugan Batu Membran Beton
37	Saguling	-	-	-	-	Urugan Batu
38	Garung	-	-	-	-	Beton Gravity
39	Mrica	-	-	-	-	Urugan Batu
40	Nawangan	354,00	-	-	800.000,00	Urugan Tanah Homogen

No	Bendungan Eksisting	Manfaat Irigasi			Volume (m ³)	Tipe
		Irigasi (ha)	DMI	PLTA		
41	Song Putri	506,00	0,03	-	725.000,00	Urugan Batu Dengan Inti
42	Ngancar	1.300,00	-	-	2.050.000,00	Urugan Tanah Homogen
43	Plumbon	392,00	-	-	1.050.000,00	Urugan Tanah Homogen
44	Parang Joho	650,00	-	-	1.760.000,00	Urugan Tanah Homogen
45	Kedung Uling	402,00	-	-	470.000,00	Urugan Tanah Homogen
46	Wonogiri / Gajah Mungkur	23.600,00	-	1.240.000,00	433.000.000,00	Urugan Batu Dengan Inti
47	Krisak	274,00	-	-	3.717.000,00	Urugan Tanah Homogen
48	Mulur	43,00	-	-	420.000,00	Urugan Tanah Homogen
49	Lalung	2.000,00	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
50	Wadas Lintang	31.101,00	-	1.600.000,00	440.000.000,00	Beton komposit
51	Delingan	2.000,00	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
52	Sempor	6.478,00	-	110.000,00	39.960.000,00	Urugan Batu Dengan Inti
53	Botok	2.488,00	-	-	13.440.000,00	Urugan Tanah Homogen
54	Cengklik	1.578,00	-	-	9.773.000,00	Urugan Tanah Homogen
55	Gebyar	1.421,00	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
56	Kembangan	358,00	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
57	vvv	400,00	-	-	2.800.000,00	Urugan Tanah Homogen
58	Klego	1.353,00	-	-	2.740.000,00	Urugan Tanah Homogen
59	Penjalin	29.000,00	-	-	9.500.000,00	Urugan Tanah Homogen
60	Kedung Ombo	61.444,00	1.500,00	2.390.000,00	723.000.000,00	Urugan Batu Dengan Inti
61	Simo	482,00	-	-	429.000,00	Urugan Tanah Homogen
62	Butak	366,00	-	-	1.600.000,00	Urugan Tanah Homogen
63	Nglangon	750,00	-	-	2.180.000,00	Urugan Tanah Homogen

No	Bendungan Eksisting	Manfaat Irigasi			Volume (m ³)	Tipe
		Irigasi (ha)	DMI	PLTA		
64	Sanggeh	50,00	-	-	385.000,00	Urugan Tanah Homogen
65	Jati Barang	2,00	0,01	156.000,00	20.400.000,00	Urugan Tanah Dengan Inti
66	Malahayu	12.000,00	-	-	39.880.000,00	Urugan Tanah Random
67	Cacaban	17.481,00	-	-	9.000.000,00	Urugan Tanah Homogen
68	Greneng	251,00	-	-	1.825.000,00	Urugan Tanah Homogen
69	Tempuran	820,00	-	-	1.680.000,00	Urugan Tanah Homogen
70	Panohan	329,00	0,10	-	921.000,00	Urugan Batu Dengan Inti
71	Lodan	382,00	0,02	-	-	Urugan Tanah Homogen
72	Grawan	160,00	0,01	-	474.150,00	Urugan Tanah Homogen
73	Banyukuwung	775,00	0,02	-	2.420.000,00	Urugan Tanah Homogen
74	Gembong	3.855,00	-	-	9.500.000,00	Urugan Tanah Homogen
75	Gunung Rowo	6.052,00	-	-	5.160.000,00	Urugan Tanah Homogen
76	Sermo	7.152,00	-	-	25.000.000,00	Urugan Batu Dengan Inti
77	Sengguruh	895,00	-	-	23.000.000,00	Beton Komposit
	Karang Kates / Sutami					Urugan Tanah Homogen
78	Lahor	1.100,00	-	-	29.020.000,00	Urugan Tanah
79	Wlingi	13.600,00	-	-	24.000.000,00	Beton Komposit
80	Ngepeh	438,00	-	-	57.100,00	Pasangan Batu
	Wonorejo					Urugan Batu Dengan Inti
81	Bajulmati	1.800,00	0,11	-	-	
82	Selorejo	5.700,00	-	49,00	36.570.000,00	Urugan Tanah Homogen
83	Sampean Baru	9.800,00	-	-	1.500.000,00	Urugan Batu Dengan Inti
84	Tlogo Ngebel	7,00	-	2.700.000,00	3.950.000,00	Urugan Tanah Dengan Inti
85	Gonggang	2.500,00	0,05	-	-	Urugan Zonal Dengan Inti

No	Bendungan Eksisting	Manfaat Irigasi			Volume (m³)	Tipe
		Irigasi (ha)	DMI	PLTA		
86	Oro - Oro Ombo	7,00	0,50	-	120.010,00	Urugan Tanah Homogen
87	Telaga Pasir / Sarangan	7.700,00	-	-	3.050.000,00	Pasangan Batu Kali
88	Dawuhan	1.273,00	-	-	3.000.000,00	Urugan Tanah Homogen
89	Saradan	990,00	-	-	2.340.000,00	Urugan Tanah Homogen
90	Bening / Widas	9.120,00	-	-	27.850.000,00	Urugan Tanah Homogen
91	Kedung Sengon	439,00	-	-	-	Pasangan Batu
92	Sumber Kepuh	895,00	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
93	Notopuro	2.433,00	-	-	2.080.000,00	Urugan Tanah Homogen
94	Wr. Jenggot / Grojokan	871,00	-	-	250.000,00	Urugan Tanah Homogen
95	Kedung Brubus	900,00	-	-	2.025.000,00	Urugan Zonal Dengan Inti
96	Sangiran	1.545,00	-	-	10.600.000,00	Urugan Batu Dengan Inti
97	Pondok	3.450,00	-	-	22.400.000,00	Urugan Batu Dengan Inti
98	Kedung Bendo	1.341,00	-	-	1.700.000,00	Urugan Tanah Homogen
99	Pacal	16.000,00	-	-	41.080.000,00	Urugan Tanah Homogen
100	Nglambangan	803,00	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
101	Prijetan	4.008,00	-	-	12.100.000,00	Urugan Tanah Homogen
102	Gondang	10.500,00	-	-	21.210.000,00	Urugan Tanah Homogen
103	Canggah	219,00	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
104	Klampus	2.080,00	0,07	-	10.250.000,00	Beton Gravity
105	Manyar	860,00	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
106	Cungkup	400,00	-	-	-	Urugan Tanah Homogen
107	Nipah	1.150,00	-	-	-	Batuan Gabung
108	Gintung	700,00	-	-	720.000,00	Urugan Tanah Homogen
109	Krenceng	-	-	-	-	Urugan Tanah

No	Bendungan Eksisting	Manfaat Irigasi			Volume (m ³)	Tipe
		Irigasi (ha)	DMI	PLTA		
110	Telaga Tunjung	-	-	-	-	Urugan Batu
111	Benel	1.050,00	0,17	-	-	Urugan Batu
112	Palasari	-	-	-	-	Urugan Batu
113	Titab	-	-	-	-	
114	Groggak	200,00	-	-	-	Urugan Batu
115	Pancor	100,00	-	-	-	Urugan Tanah
116	Batu Bokah	306,00	-	-	-	Urugan Tanah
117	Labangka	200,00	-	-	-	Urugan Tanah
118	Sepit	176,00	-	-	-	Urugan Tanah
119	Jangkik Jawe	350,00	-	-	-	Urugan Tanah
120	Batu Nampar	300,00	-	-	-	Urugan Tanah
121	Selante	612,00	-	-	-	Urugan Tanah
122	Kengkang	10,00	-	-	-	Urugan Tanah
123	Pare	600,00	-	-	-	Batuan Gabung
124	Gapit	1.300,00	0,01	0,05	-	Urugan Tanah
125	Lamenta	220,00	-	-	-	Urugan Tanah
126	Telaga Lebur	210,00	-	-	-	Urugan Tanah
127	Tibu Kuning	235,00	-	-	-	Urugan Tanah
128	Sepayung Dalam	500,00	-	-	-	Urugan Tanah
129	Sejari I	500,00	-	-	-	Urugan Tanah
130	Tolotangga	200,00	-	-	-	Urugan Tanah
131	Jompong	100,00	-	-	-	Urugan Tanah
132	Pengga	3.589,00	0,01	-	-	Urugan Batu
133	Muer	286,00	0,01	-	-	Batuan Gabung
134	Lingkuk Lamun	1.163,00	-	-	-	Batuan Gabung
135	Mapasan	80,00	-	-	-	Urugan Tanah
136	Batujai	3.140,00	0,06	-	-	Batuan Gabung
137	Kaswangi	543,00	-	-	-	Urugan Tanah
138	Soncolopi	150,00	-	-	-	Urugan Tanah
139	Kali Ujung	300,00	-	-	-	Urugan Tanah
140	Bringe	350,00	-	-	-	Urugan Tanah
141	Brangkolong	764,00	-	-	-	Urugan Tanah
142	Pelaperado	3.895,00	0,01	0,25	-	Urugan Batu
143	Parado Kanca	350,00	-	-	-	Urugan Tanah
144	Surabaya	1.125,00	-	-	-	Urugan Tanah
145	Laju	200,00	-	-	-	Urugan Tanah
146	Mamak	5.428,00	-	0,50	-	Urugan Batu
147	Tiu Kulit	1.800,00	0,01	0,07	-	Urugan Batu
148	Peneda Gandor	450,00	-	-	-	Urugan Batu

No	Bendungan Eksisting	Manfaat Irigasi			Volume (m ³)	Tipe
		Irigasi (ha)	DMI	PLTA		
149	Pandanduri	5.168,00	-	-	-	Urugan Tanah
150	Waworoda	255,00	-	-	-	Urugan Batu
151	Pemasar	620,00	-	-	-	Urugan Tanah
152	Jelantik	350,00	-	-	-	Urugan Tanah
153	Jambu	700,00	-	-	-	Urugan Tanah
154	Mengkoang	350,00	-	-	-	Urugan Tanah
155	Ncera	138,00	-	-	-	Urugan Tanah
156	Sumi	2.272,00	0,01	0,15	-	Urugan Tanah
157	Lanangga	300,00	-	-	-	Urugan Tanah
158	Batu Bulan	1.300,00	0,21	-	-	Urugan Batu
159	Mantar	-	-	-	-	Urugan Tanah
160	Serading	200,00	-	-	-	Urugan Tanah
161	Woro	200,00	-	-	-	Urugan Tanah
162	Tonda Selatan	460,00	-	-	-	Urugan Tanah
163	Roi Roka	800,00	-	-	-	Batuan Gabung
164	Pernek	220,00	-	-	-	Urugan Tanah
165	Senang	200,00	-	-	-	Urugan Tanah
166	Gunung Paok	51,00	-	-	-	Urugan Tanah
167	Olat Rawa	-	-	-	-	Urugan Tanah
168	Kesi	220,00	-	-	-	Urugan Tanah
169	Kowo	220,00	-	-	-	Urugan Tanah
170	Kempo	255,00	-	-	-	Urugan Tanah
171	Penyaring	200,00	-	-	-	Urugan Tanah
172	Sanggupasante	391,00	-	-	-	Urugan Batu
173	Saneo	160,00	-	-	-	Urugan Tanah
174	Oi Toi	300,00	-	-	-	Urugan Tanah
175	Wera I	-	-	-	-	Urugan Tanah
176	Lasi II	200,00	-	-	-	Urugan Tanah
177	Danau Tua	750,00	-	-	-	Urugan Tanah
178	Kapalengga	135,00	-	-	-	Urugan Tanah
179	Manubulu	301,00	-	-	-	Urugan Tanah
180	Matasio	75,00	-	-	-	Urugan Tanah
181	Lere	129,00	-	-	-	Urugan Tanah
182	Benkoko	70,00	-	-	-	Urugan Tanah
183	Oel Tua	300,00	-	-	-	Urugan Tanah
184	Tilong	1.484,00	-	-	-	Urugan Batu
185	Karinga	214,00	-	-	-	Urugan Tanah
186	Lokojange	420,00	-	-	-	Urugan Tanah
187	Rakawatu	174,00	-	-	-	

No	Bendungan Eksisting	Manfaat Irigasi			Volume (m ³)	Tipe
		Irigasi (ha)	DMI	PLTA		
188	Haekrit	200,00	-	-	-	Urugan Tanah
189	Haliwen	300,00	-	-	-	Urugan Tanah
190	Waerita	174,00	-	-	-	Urugan Batu
191	Padang Panjang	-	-	-	-	
192	Riam Kanan	-	-	-	-	Urugan Tanah
193	Manggar	-	0,90	-	-	Urugan Tanah
194	Samboja	1.167,00	-	-	-	Urugan Tanah
195	Benanga	800,00	0,11	-	-	Urugan Tanah
196	Teritip	-	0,26	-	2.431.000,00	Urugan Tanah Homogen
197	Merancang	1.200,00	-	0,40	-	Urugan Tanah
198	Beriwit	-	-	-	-	
199	Namuk	-	-	-	-	Urugan Batu
200	Binalatung	-	0,20	-	-	Urugan Tanah
201	Bili Bili	25.783,00	-	2.400.000,00	-	Urugan Batu
202	Salomeko	1.723,00	-	-	-	Urugan Tanah
203	Ponre - Ponre	4.411,00	-	-	-	Urugan Batu
204	Kalola	4.200,00	-	0,15	-	Urugan Batu
205	Bakaru	-	-	-	-	Beton Gravity
206	Balambano	-	-	-	-	Beton Gravity
207	Karebbe	-	-	-	-	Beton Gravity
208	Larona (Batubesi)	-	-	-	-	Urugan Batu
209	Abusur	-	-	-	-	Urugan Tanah
210	Gosowong	-	-	-	-	Urugan Tanah
211	Lereh II	-	-	-	-	
212	Kalibumi	-	-	-	-	
213	Tami	-	-	-	-	
214	Kalibumi	-	-	-	-	
215	Tami	-	-	-	-	Urugan Tanah Homogen

Sumber : Subdit Data dan Informasi Ditjen Sumber Daya Air, Status 2018

C. Bendung

Bendung merupakan bangunan air yang dibangun melintasi sungai. Bendung berfungsi untuk meninggikan muka air dari sungai yang dibendung sehingga air dapat disadap dan dialirkan ke saluran melalui bangunan pengambilan. Selain itu bendung juga dapat mengatur debit air sungai untuk mengantisipasi banjir pada musim hujan.

Bendungan terbagi menjadi 2 tipe berdasarkan konstruksinya yaitu bendung sederhana dan bendung permanen. Bendung permanen dibagi menjadi 2 yaitu bendung gerak dan bendung tetap. Bendung gerak adalah bangunan air yang dilengkapi dengan pintu bendung yang dapat digerakan untuk mengatur ketinggian muka air sungai. Sedangkan bendung tetap adalah bangunan air yang terdiri dari ambang tetap sehingga ketinggian muka air tidak dapat diatur. Tabel dibawah ini menyajikan jumlah bendung di Indonesia menurut provinsi.

Tabel 3.10
Jumlah Bendung di Indonesia Tahun 2018

Provinsi	Jumlah Bendung
Aceh	-
Sumatera Utara	8
Sumatera Barat	-
Riau	4
Jambi	-
Sumatera Selatan	9
Bengkulu	1
Lampung	1
Kepulauan Bangka Belitung	-
Kepulauan Riau	1
DKI Jakarta	-
Jawa Barat	2
Jawa Tengah	40
D.I. Yogyakarta	186
Jawa Timur	-
Banten	3
Bali	-
Nusa Tenggara Barat	1
Nusa Tenggara Timur	-
Kalimantan Barat	-
Kalimantan Tengah	-
Kalimantan Selatan	-
Kalimantan Timur	-
Kalimantan Utara	-
Sulawesi Utara	-

Provinsi	Jumlah Bendung
Sulawesi Tengah	-
Sulawesi Selatan	-
Sulawesi Tenggara	-
Gorontalo	5
Sulawesi Barat	-
Maluku	-
Maluku Utara	-
Papua Barat	-
Papua	3
Indonesia	264

Sumber : Subdit Data dan Informasi Ditjen Sumber Daya Air, Status 2018

D. Embung

Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam yang berfungsi sebagai penampung air hujan dan air limbah. Air hujan yang ditampung dipergunakan pada saat musim kemarau. Sedangkan embung potensi adalah titik-titik yang memungkinkan bagi pembangunan embung atau bangunan konservasi air buatan, seperti bendungan atau waduk. Selain sebagai tempat penampungan air embung juga memiliki fungsi sebagai tempat hidup berbagai tumbuhan dan hewan disekitarnya. Tabel 3.11 dibawah ini menyajikan jumlah embung di Indonesia menurut provinsi.

Tabel 3.11
Embung di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018

Provinsi	Jumlah Embung
Aceh	57
Sumatera Utara	48
Sumatera Barat	72
Riau	33
Jambi	12
Sumatera Selatan	3
Bengkulu	-
Lampung	481
Kepulauan Bangka Belitung	114
Kepulauan Riau	36
DKI Jakarta	-
Jawa Barat	651
Jawa Tengah	264
D.I. Yogyakarta	249
Jawa Timur	198

Provinsi	Jumlah Embung
Banten	112
Bali	36
Nusa Tenggara Barat	84
Nusa Tenggara Timur	343
Kalimantan Barat	24
Kalimantan Tengah	3
Kalimantan Selatan	-
Kalimantan Timur	21
Kalimantan Utara	18
Sulawesi Utara	24
Sulawesi Tengah	
Sulawesi Selatan	102
Sulawesi Tenggara	135
Gorontalo	18
Sulawesi Barat	9
Maluku	112
Maluku Utara	-
Papua Barat	-
Papua	-
Indonesia	3.259

Sumber : Subdit Data dan Informasi Ditjen Sumber Daya Air, Status 2018

E. Pengaman Pantai

Bangunan pelindung pantai bertujuan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan karena serangan gelombang dan arus, yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, di antaranya :

Groin adalah struktur pengaman pantai yang dibangun menjorok tegak lurus terhadap arah pantai. Bahan konstruksinya umumnya kayu, baja, beton (pipa beton) dan batu. Perlindungan pantai dengan menggunakan groin biasanya dilakukan dengan membuat suatu seri bangunan yang terdiri dari beberapa groin yang ditempatkan dengan jarak tertentu. Hal ini dimaksudkan agar perubahan garis pantai tidak terlalu signifikan.

Jetty adalah bangunan tegak lurus pantai yang diletakan di kedua sisi muara sungai yang berfungsi untuk mengurangi pendangkalan alur oleh sedimen pantai. Struktur yang terdiri dari tiang-tiang pancang yang menyangga dek kayu atau baja diatasnya yang biasa digunakan sebagai akses pejalan kaki, memancing, dan penelitian disebut Piers yang digolongkan ke dalam Jetty.

Breakwater atau dalam hal ini pemecah gelombang lepas pantai adalah bangunan yang dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai. Pemecah gelombang dibangun sebagai salah satu bentuk perlindungan pantai terhadap erosi dengan menghancurkan energi gelombang sebelum sampai ke pantai, sehingga terjadi endapan dibelakang bangunan. Endapan ini dapat menghalangi transport sedimen sepanjang pantai. Breakwater dibagi menjadi dua *Attached*

Breakwater sebagai perlindungan perairan pelabuhan atau yang berhubungan langsung dengan pantai atau daratan dan *Detached Breakwater* sebagai perlindungan pantai terhadap erosi atau yang tidak berhubungan dengan garis pantai dan dibuat sejajar pantai dan berada pada jarak tertentu dari garis pantai.

Tabel 3.12
Jumlah Pengaman Pantai di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018

Provinsi	Jumlah Pengaman Pantai	Panjang (m)
Aceh	11	3.272,88
Sumatera Utara	6	1.071,00
Sumatera Barat	6	14.700,00
Riau	15	4.343,00
Jambi	3	500
Sumatera Selatan	-	-
Bengkulu	4	1.351,00
Lampung	9	2.564,00
Kepulauan Bangka Belitung	19	19.952,00
Kepulauan Riau	13	6.300,06
DKI Jakarta	3	3.395,00
Jawa Barat	11	0
Jawa Tengah	8	3.930,00
D.I. Yogyakarta	13	0
Jawa Timur	8	4.006,00
Banten	30	5.192,00
Bali	249	60.548,26
Nusa Tenggara Barat	-	-
Nusa Tenggara Timur	22	7.845,00
Kalimantan Barat	8	2.550,00
Kalimantan Tengah	1	500,00
Kalimantan Selatan	2	3.200,00
Kalimantan Timur	-	-
Kalimantan Utara	2	0
Sulawesi Utara	55	2.714,00
Sulawesi Tengah	14	8.226,00
Sulawesi Selatan	-	-
Sulawesi Tenggara	20	8.000,37
Gorontalo	-	-
Sulawesi Barat	21	167.723,52

Provinsi	Jumlah Pengaman Pantai	Panjang (m)
Maluku	33	0
Maluku Utara	18	9.712,00
Papua Barat	4	820
Papua	23	2.370,00
Indonesia	631	344.786,09

Sumber : Subdit Data dan Informasi Ditjen Sumber Daya Air, Status 2018

F. Sabo Dam

Sabo atau pengendalian pasir memiliki sistem pengendalian erosi, sedimen, lahar hujan, dan penanggulangan tanah longsor. Bangunan sabo dam biasanya terletak di sungai di dekat gunung vulkanik yang berfungsi untuk menangkap aliran debris atau lahar sehingga debit aliran menjadi berkurang atau pengendalian sedimen. Selain itu sabo juga bisa berfungsi untuk mengarahkan dan memperlambat aliran material di sungai, tempat pengendapan, pengarah aliran untuk mencegah penyebaran, dan membatasi terjadinya aliran lahar atau bahaya sekunder gunung api. Efektivitas bangunan sabo dam selain harus tepat letaknya juga mesti diperhatikan pula kapasitas tampungannya.

Pengendalian banjir lahar ini dibagi menjadi tiga zona yaitu daerah hulu (daerah produksi sedimen), daerah tengah (daerah transpor sedimen), dan daerah hilir (daerah endapan sedimen). Penerapan teknologi sabo tergantung dari zonanya. Di daerah hulu dilakukan dengan membangun dam seri tingkat (stepped dam) dan dam pengendali sedimen (check dam). Selain itu penggunaan vegetasi juga penting untuk menghambat laju produksi sedimen. Tujuannya pembangunan dam ini untuk menjaga longsor tebing sungai akibat gerusan kaki tebing dan meredam tenaga gerusan. Sementara itu, di daerah tengah digunakan dam konsolidasi (consolidation dam) dan kantong sedimen/lahar (sand pocket) yang dimaksudkan untuk memperlambat kecepatan banjir, menstabilkan dasar sungai, mengarahkan alur sungai, mengubah sifat aliran massa menjadi aliran individu, serta menahan dan mengendalikan material sedimen.

Untuk daerah hilir, dilakukan kanalisasi (channel works) dan pembangunan ambang dasar (groundsill) serta tanggul. Jenis sabo dam yang dibangun di daerah hilir ini bertujuan untuk mengatur arah alur sungai, mengalirkan air banjir dan mencegah erosi dasar sungai, mengatur dan menstabilkan kemiringan dasar sungai, dan mengamankan/melindungi lokasi muara sungai. Perbedaan bangunan sabo ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mengendalikan banjir lahar di daerah vulkanik.

Tabel 3.13

Jumlah Sabo Dam di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018

Provinsi	Jumlah Sabo Dam
Aceh	-
Sumatera Utara	1
Sumatera Barat	19
Riau	-
Jambi	-
Sumatera Selatan	-
Bengkulu	-
Lampung	1
Kepulauan Bangka Belitung	-
Kepulauan Riau	-
DKI Jakarta	-
Jawa Barat	27
Jawa Tengah	165
D.I. Yogyakarta	116
Jawa Timur	111
Banten	-
Bali	86
Nusa Tenggara Barat	2
Nusa Tenggara Timur	-
Kalimantan Barat	-
Kalimantan Tengah	-
Kalimantan Selatan	-
Kalimantan Timur	-
Kalimantan Utara	-
Sulawesi Utara	35
Sulawesi Tengah	56
Sulawesi Selatan	25
Sulawesi Tenggara	-
Gorontalo	-
Sulawesi Barat	-
Maluku	2
Maluku Utara	-
Papua Barat	-
Papua	-
Indonesia	646

Sumber : Subdit Data dan Informasi Ditjen Sumber Daya Air, Status 2018

G. Air Tanah

Air tanah merupakan salah satu sumber daya air selain air sungai dan juga air hujan. Air tanah memegang peranan penting terutama dalam menjaga keseimbangan dan ketersediaan bahan baku untuk kepentingan rumah tangga ataupun industri. Lapisan dalam bumi yang mudah dilewati atau membawa air disebut dengan akuifer atau pembawa air. Air tanah mengisi lapisan tanah karena adanya proses infiltrasi dan perkolasi. Infiltrasi adalah gerakan resapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan Perkolasi adalah gerakan air yang meresap ke dalam tanah melalui celah bebatuan hingga menjadi jenuh. Air tanah berasal dari air hujan yang meresap ke dalam bumi dan keluar ke permukaan bumi dalam bentuk mata air atau resapan.

Tabel 3.14

Jumlah Pengaman Pantai di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2018

Provinsi	Jumlah Air Tanah	Irigasi (ha)	Debit Pompa (l/det)
Aceh	38	682	682
Sumatera Utara	37	-	-
Sumatera Barat	10	-	-
Riau	-	-	-
Jambi	-	-	-
Sumatera Selatan	-	-	-
Bengkulu	-	-	-
Lampung	81	-	-
Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	-	-	-
Jawa Tengah	101	-	-
D.I. Yogyakarta	7	-	-
Jawa Timur	55	-	-
Banten	-	-	-
Bali	19	335	335
Nusa Tenggara Barat	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	71	808	808
Kalimantan Barat	-	-	-
Kalimantan Tengah	-	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	-
Kalimantan Timur	4	-	-
Kalimantan Utara	-	-	-
Sulawesi Utara	47	810	810
Sulawesi Tengah	-	-	-
Sulawesi Selatan	-	-	-

Provinsi	Jumlah Air Tanah	Irigasi (ha)	Debit Pompa (l/det)
Sulawesi Tenggara	13	260	260
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	11	-	-
Maluku Utara	1	-	-
Papua Barat	-	-	-
Papua	57	260	260
Indonesia	552	3.155	3.155

Sumber : Subdit Data dan Informasi Ditjen Sumber Daya Air, Status 2018



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**



BAB IV

INFORMASI STATISTIK
PEKERJAAN UMUM &
PERUMAHAN RAKYAT
2019

**STATISTIK
INFRASTRUKTUR
BINA MARGA**



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan nadi bagi mobilitas masyarakat. Sebagai penunjang transportasi darat jaringan jalan dan jembatan yang baik dapat berdampak baik pada sektor ekonomi suatu daerah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas pemerintah mengingat semakin besar jumlah penduduk.

Berdasarkan **Undang-undang No. 38 tahun 2004**, terdapat 3 peran jalan yaitu:

1. Jalan sebagai prasarana transportasi berperan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan, keamanan, serta kemakmuran rakyat.
2. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
3. Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah RI.

Sesuai peruntukannya jalan terbagi 2 yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum merupakan jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Jalan umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

Fungsi jalan dibedakan berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas angkutan jalan yaitu:

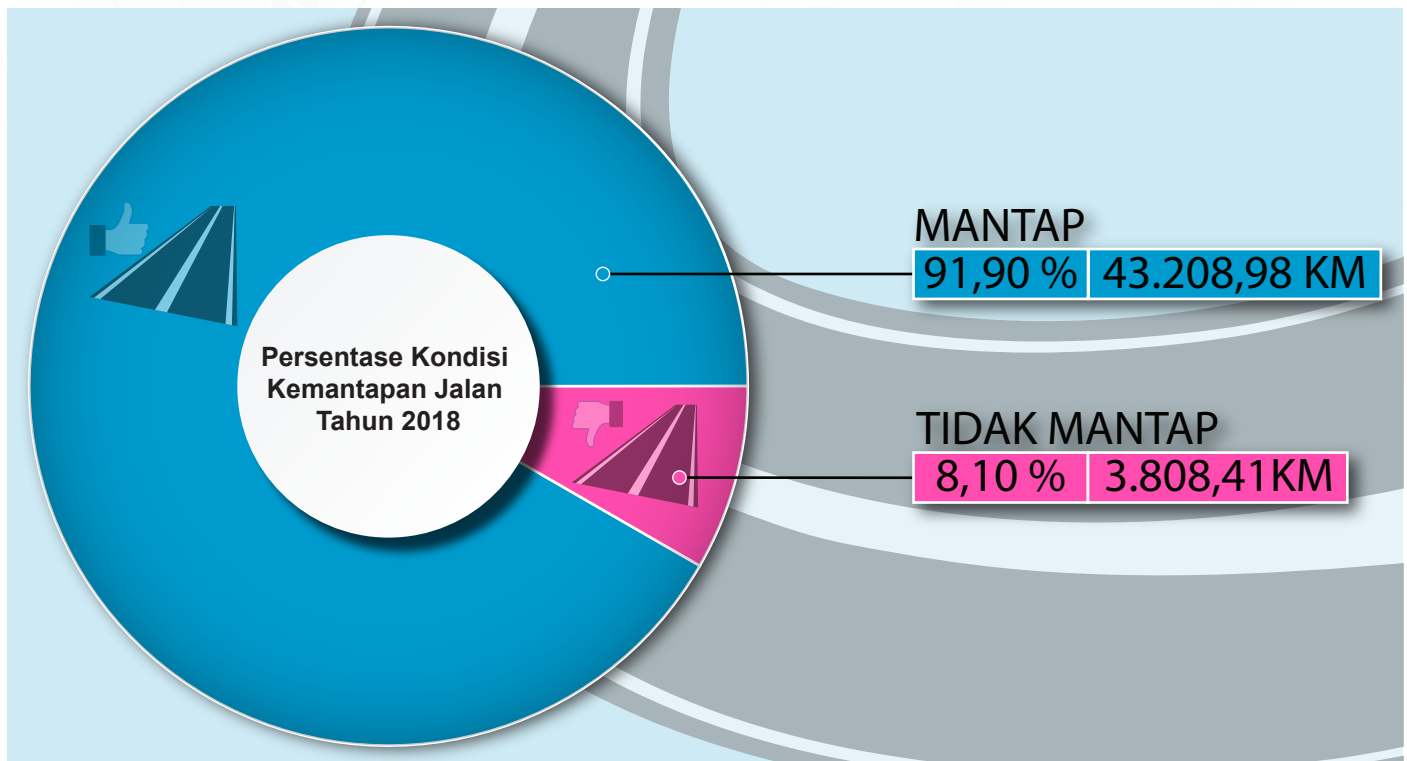
1. Jalan Arteri, jalan yang berfungsi melayani angkutan utama jarak jauh, dengan kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan Kolektor, jalan yang berfungsi melayani angkutan pengumpul jarak sedang, dengan kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan Lokal, jalan yang berfungsi melayani angkutan setempat jarak dekat, dengan kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi
4. Jalan Lingkungan, jalan yang berfungsi melayani angkutan lingkungan jarak dekat, dengan kecepatan rata-rata rendah.

Fungsi jalan tersebut terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah Indonesia, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sedangkan sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di kawasan perkotaan. Jalan umum berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

A. Jalan Nasional

Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Wewenang penyelenggaraan jalan nasional berada pada pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Kondisi jalan nasional di Indonesia secara umum dalam kondisi mantap dengan persentase sebesar **91,90%**, sedangkan kondisi tidak mantap sebesar **8,10%**. Provinsi dengan persentase jalan mantap terbesar adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar **99,22%**. Provinsi lainnya yang memiliki persentase tinggi yaitu Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar **99,04%** dan Provinsi Bali sebesar **98,93%**. Sedangkan provinsi dengan persentase kondisi jalan mantap terendah adalah Provinsi Banten yaitu sebesar **76,33%**.



Gambar 4.1
Persentase Kondisi Kemantapan Jalan tahun 2018

Tabel 4.1
Kondisi Panjang Jalan Nasional Tahun 2018 Semester 2

Provinsi	Panjang Total (km)	Mantap		Tidak Mantap	
		km	(%)	km	(%)
Aceh	2.102,07	1.997,45	95,02	104,62	4,98
Sumatera Utara	2.632,22	2392,60	90,90	239,62	9,10
Sumatera Barat	1.448,81	1354,68	93,50	94,13	6,50
Riau	1.336,61	1164,56	87,13	172,05	12,87
Jambi	1.317,93	1247,66	94,67	70,27	5,33
Sumatera Selatan	1.600,18	1404,46	87,77	195,72	12,23
Bengkulu	792,607	769,57	97,09	23,03	2,91
Lampung	1.292,25	1175,28	90,95	116,97	9,05
Kepulauan Bangka Belitung	600,398	595,70	99,22	4,69	0,78
Kepulauan Riau	586,825	548,51	93,47	38,32	6,53

Provinsi	Panjang Total (km)	Mantap		Tidak Mantap	
		km	(%)	km	(%)
DKI Jakarta	53,308	47,11	88,37	6,20	11,63
Jawa Barat	1.789,21	1600,11	89,43	189,09	10,57
Jawa Tengah	1.518,09	1457,54	96,01	60,55	3,99
D.I. Yogyakarta	247,913	245,55	99,04	2,37	0,96
Jawa Timur	2.361,23	2270,72	96,17	90,51	3,83
Banten	564,885	431,19	76,33	133,69	23,67
Bali	629,39	622,65	98,93	6,74	1,07
Nusa Tenggara Barat	934,54	903,74	96,70	30,80	3,30
Nusa Tenggara Timur	1.857,91	1781,85	95,91	76,06	4,09
Kalimantan Barat	2.117,56	1965,11	92,80	152,45	7,20
Kalimantan Tengah	2002,084	1632,32	81,53	369,76	18,47
Kalimantan Selatan	1204,297	1123,85	93,32	80,45	6,68
Kalimantan Timur	1710,896	1570,93	91,82	139,97	8,18
Kalimantan Utara	585,16	541,22	92,49	43,94	7,51
Sulawesi Utara	1.663,92	1564,38	94,02	99,53	5,98
Sulawesi Tengah	2.373,40	2244,20	94,56	129,20	5,44
Sulawesi Selatan	1.745,93	1673,46	95,85	72,46	4,15
Sulawesi Tenggara	1.497,81	1404,00	93,74	93,82	6,26
Gorontalo	748,598	694,25	92,74	54,35	7,26
Sulawesi Barat	763,169	672,25	88,09	90,92	11,91
Maluku	1.771,67	1617,46	91,30	154,21	8,70
Maluku Utara	1.203,34	1119,48	93,03	83,86	6,97
Papua Barat	1.326,39	1068,66	80,57	257,73	19,43
Papua	2.636,79	2306,50	87,47	330,29	12,53
Indonesia	47.017,39	43.208,98	91,90	3.808,41	8,10

Sumber: Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem, Direktorat Jenderal Bina Marga.
Status 25 Oktober 2018 (semester 2)

B. Jalan Tol

Jalan tol termasuk dalam jalan umum dan merupakan bagian sistem jaringan jalan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Tarif tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Tarif tol ditetapkan oleh Menteri, yang kemudian akan dievaluasi dan disesuaikan setiap 2 tahun sekali.

Pembangunan jalan tol diselenggarakan antara lain untuk memperlancar lalu lintas, meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa, meringankan beban dana pemerintah, serta meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan. Wewenang penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Wewenang tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol. Selain pemerintah pengusahaan jalan tol juga dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun swasta.

Jalan tol diperuntukkan bagi kendaraan bermotor yang dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan tonase. Golongan jenis kendaraan bermotor yang dapat melalui jalan tol adalah sebagai berikut :

- a. Golongan 1 : sedan, jip, pick up/truk kecil, dan bus.
- b. Golongan 2 : truk dengan 2 gandar.
- c. Golongan 3 : truk dengan 3 gandar.
- d. Golongan 4 : truk dengan 4 gandar.
- e. Golongan 5 : truk dengan 5 gandar.
- f. Golongan 6 : kendaraan bermotor roda 2.

Pada **Tabel 4.2** dapat dilihat ruas-ruas jalan tol yang telah beroperasi sejak tahun 1978 hingga Juli 2018 sudah terdapat 46 ruas jalan tol telah beroperasi.

Tabel 4.2
Jalan Tol Beroperasi

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		BUJT	Mulai Beroperasi
		Jalan Utama	Akses		
1.	Jakarta – Bogor – Ciawi	50	9	PT. Jasa Marga	1978
2.	Jakarta – Tangerang	27	6	PT. Jasa Marga	1984
3.	Surabaya – Gempol	46,55	6	PT. Jasa Marga	1984
4.	Jakarta – Cikampek	72	11	PT. Jasa Marga	1985
5.	Padalarang – Cileunyi	35,63	28,77	PT. Jasa Marga	1986
6.	Prof. DR Soedyatmo	14,3		PT. Jasa Marga	1986
7.	Cawang – Tomang – Pluit (CTC/ Lingkar Dalam Kota Jakarta)	23,55		PT. Jasa Marga	1997
8.	Semarang Seksi A,B,C	24,75		PT. Jasa Marga	1983

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		BUJT	Mulai Beroperasi
		Jalan Utama	Akses		
9.	Belawan – Medan – Tj. Morowa	33,7	9	PT. Jasa Marga	1989
10.	Pondok Aren – Bintaro Viaduct – Ulujami	5,55		PT. Jasa Marga	1999
11.	JORR E1 Selatan (Taman Mini – Hankam Raya)	4		PT. Jasa Marga	2007
12.	JORR E1 Utara (Hankam – Cikunir)	8,1	0,3	PT. Jasa Marga	2007
13.	JORR E2 (Cikunir – Cakung)	9,07		PT. Jasa Marga	2007
14.	JORR E3 (Cakung – Cilincing)	3,75		PT. Jasa Marga	2007
15.	JORR W1 (Kebun Jeruk – Penjaringan)	9,85	0,55	PT. Jakarta Lingkar Barat I	2010
16.	JORR W2 Selatan (Pondok Pinang – Ulujami)	5,72	0,48	PT. Jasa Marga	2005
17.	JORR W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami)	7,87		PT. Marga Lingkar Jakarta	2013 dan 2014
18.	Cikampek – Padalarang	58,5		PT. Jasa Marga	2005
19.	Jembatan Surabaya – Madura (Suramadu *)	5,4	15,85	PT. Jasa Marga	2009
20.	Tangerang – Merak	72,29	5,59	PT. Marga Mandala Sakti	1992
21.	Cawang – Tj. Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit (Ir. Wiyoto Wiyono, MSc.)	27,05		PT. Citra Marga Nusaphala Persada	1989
22.	Surabaya – Gresik	20,7		PT. Margabumi Matraraya	1993
23.	JORR S	14,83		PT. Hutama Karya	1995
24.	Ujung Pandang Seksi 1 dan 2	6,05		PT. Bosawa Marga Nusantara	1998
25.	Serpong – Pondok Aren	7,25		PT. Bintaro Serpong Damai	1999
26.	SS Waru – Bandara Juanda	12,8		PT Citra Margatama Surabaya	2008
27.	Makassar Seksi IV	11,6		PT Jalan Tol Seksi Empat	2008
28.	Bogor Ring Road Seksi I, IIA, IIB	7,85		PT Marga Sarana Jabar	2009, 2014, dan 2018
29.	Kanci – Pejagan	35		PT Semesta Marga Raya	2010

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		BUJT	Mulai Beroperasi
		Jalan Utama	Akses		
30.	Surabaya – Mojokerto	36,27		PT. Jasamarga Surabaya Mojokerto	2011
31.	Cinere – Jagorawi	3,5		PT. Translingkar Kita Jaya	2012
32.	Nusa Dua - Ngurah Rai – Benoa (Bali Mandara)	10		PT. Jasamarga Bali Tol	2013
33.	Semarang – Solo Seksi I, II, dan III	40,4		PT. Trans Marga Jateng	2011 dan 2014
34.	Kertosono – Mojokerto Seksi I, II, dan III	39,6		PT Marga Harjaya Infrastruktur	2014, 2016 dan 2017
35.	Gempol – Pandaan	12,05	1,56	PT Jasamarga Pandaan Tol	2015
36.	Cikampek – Palimanan	116,75		PT Lintas Marga Sedaya	2015
37.	Pejagan – Pemalang Seksi I dan II	20,2		PT Pejagan Pemalang Tol Road	2016
38.	Gempol – Pasuruan Seksi I dan II	20,5		PT Transmarga Jatim Pasuruan	2017 dan 2018
39.	Akses Tanjung Priuk	11,4		Satker Tanjung Priuk	2017
40.	Palembang – Simpang Indralaya Seksi I	7,75		PT. Utama Karya	2017
41.	Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi II, III, IV, V, dan VI	41,65		PT. Jasamarga Kualanamu Tol	2017
42.	Medan – Binjai Seksi II dan III	10,46		PT. Utama Karya	2017
43.	Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu) Seksi IB dan IC	8,4		PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga	2017
44.	Soreang – Pasir Koja	8,15		PT. Citra Marga Lintas Jabar	2017
45.	Bakauheni – Terbanggi Besar (Segmen Pelabuhan Bakauheni – SS Bakauheni dan Segmen SS Lemantang – SS Kotabaru)	13,9		PT. Utama Karya	2018
46.	Ngawi – Kertosono Seksi I, II, dan III	49,51		PT. Ngawi Kertosono Jaya	2018

Sumber : Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT), status 6 Juli 2018.

Catatan :

*) Selama masa transisi sebelum diperoleh BUJT permanen PT Jasa Marga (Persero) Tbk melaksanakan operasi dan pemeliharaan Jembatan Surabaya-Madura selama 6 tahun (2012-2017)

Pada **Tabel 4.3**, **Tabel 4.4**, **Tabel 4.5**, dan **Tabel 4.6** disajikan data jalan tol trans jawa, trans jabodetabek, trans non jawa, dan trans sumatera dalam pembangunan. Jalan tol trans jawa terdapat 9 ruas jalan yang sedang dalam tahap pembangunan. Pada jalan tol trans jabodetabek terdapat 13 ruas jalan yang sedang dalam tahap pembangunan. Sedangkan jalan tol trans non jawa dan trans sumatera masing-masing memiliki 7 ruas jalan tol yang sedang dalam pembangunan.

Tabel 4.3
Jalan Tol Trans Jawa dalam Pembangunan

No.	Ruas		Panjang (km)	Progres (%)		BUJT
				Tanah Bebas	Konstruksi	
1.	Pejagan – Pemalang	Seksi 1 (Pejagan – Brebes Barat)	14,2	100	100	PT. Pejagan Pemalang Tol Road
		Seksi 2 (Brebes Barat – Brebes Timur)	6	100	100	
		Seksi 3 (Brebes Timur – Tegal Timur)	10,4	100	100	
		Seksi 4 (Tegal Timur – Pemalang)	26,9	100	100	
		Total	57,5	100	100	
2.	Pemalang – Batang	Seksi 1 (SS Pemalang – SS Pekalongan)	23,3	99,95	80,17	PT. Pemalang Batang Tol Road.
		Seksi 2 (SS Pekalongan – Batang)	15,9	99,46	79,34	
		Total	39,2	99,21	79,76	
3.	Batang – Semarang	Seksi 1 (Batang – Batang Timur)	3,2	100	81,1	PT. Jasamarga Semarang Batang
		Seksi 2 (Batang Timur – Weleri)	36,4	99,88	81,1	
		Seksi 3 (Weleri – Kendal)	11,05	97,89	85,22	
		Seksi 4 (Kendal – Kaliwungu)	13,5	98,28	86,99	
		Seksi 5 (Kaliwungu – Semarang)	10,1	93,88	86,99	
		Total	74,2	98,48	84,44	

No.	Ruas		Panjang (km)	Progres (%)		BUJT
				Tanah Bebas	Konstruksi	
4.	Semarang – Solo	Seksi 1 (Semarang – Ungaran)	10,85	100	100	PT. Trans Marga Jateng
		Seksi 2 (Ungaran – Bawen)	11,95	100	100	
		Seksi 3 (Bawen – Salatiga)	17,6	100	100	
		Seksi 4 (Salatiga – Boyolali)	24,13	99	69,24	
		Seksi 5 (Boyolali – Kartusuro)	8,41			
		Total	72,94	99,55	86,28	
5.	Solo – Ngawi	Seksi 1a (Colomadu – Karanganyar) (Pemerintah)	0,9	100	100	PT. Solo Ngawi Jaya
		Seksi 1b (Colomandu – Karanganyar) (Pemerintah)	1,47	100	100	
		JBH Solo – Kertosono MYC (Pemerintah)	0,9	100	100	
		Colomau – Karanganyar (Pemerintah)	17,78	100	100	
		Total	21,07	100	100	
		Seksi 3 - Paket 1 (Solo –Mantingan) (BUJT)	35,15	97,86	96,01	
		Seksi 4 - Paket 2 (Mantingan – Ngawi) (BUJT)	34,2	97,39	89,72	
		Total	69,35	97,63	92,65	
6.	Ngawi – Kertosono	Seksi 1 (Ngawi – IC Madiun)	20	99,74	100	PT. Ngawi Kertosono Jaya
		Seksi 2 (IC Madiun – IC Caruban)	8,45	100	100	
		Seksi 3 (IC Caruban – Wilangan (Ngajuk))	21,06	99,97	100	
		Seksi 4 (Saradan (Wilangan) – Kertosono)	37,39	99,11	100	
		Total	49,57	99,88	100	

No.	Ruas		Panjang (km)	Progres (%)		BUJT
				Tanah Bebas	Konstruksi	
7.	Gempol – Pasuruan	Seksi 1 (Gempol – Rembang)	13,9	100	100	PT. Transmarga Jatim Pasuruan
		Seksi 2 (Rembang – Pasuruan)	6,6	99,09	100	
		Seksi 3 (Pasuruan – Grati)	13,65	89,63	36,77	
		Total	34,15	95,68	74,73	
8.	Pasuruan – Probolinggo	Seksi 1 (Grati – Tonggas)	13,5	93,5	77,99	PT. Trans Jawa Paspro Jalan Tol
		Seksi 2 (Tonggas – Probolinggo)	6,9	93,12	74,63	
		Seksi 3 (Probolinggo Barat – Probolinggo Timur)	10,9	98,47	77,49	
		Seksi 4 (Probolinggo Timur – IC Gending)	13,7	0	0	
		Total	45	94	53,61	
9.	Probolinggo – Banyuwangi	Seksi 1 (SS Kraksaan – SS Paiton)	15,75	0	0	PT. Jasamarga Probolinggo Banyuwangi
		Seksi 2 (SS Paiton – SS Besuki)	21,89	0	0	
		Seksi 3 (SS Besuki – SS Situbondo)	43,48	0	0	
		Seksi 4 (SS Situbondo – SS Asembagus)	17,65	0	0	
		Seksi 5 (SS Asembagus – SS Bajulmati)	43,61	0	0	
		Seksi 6 (SS Bajulmati – SS Ketapang)	21,45	0	0	
		Total	172,91	0	0	

Sumber: Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT), status 6 Juli 2018

Tabel 4.4
Jalan Tol Jabodetabek dalam Pembangunan

No.		Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT
				Tanah Bebas	Konstruksi	
1	Bekasi – Cawang – Kp. Melayu	Seksi 1a	3,5	74,48	68,5	PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga
		Seksi 1b & 1c (Casablanca – Jaka Sampurna)	8,4		100	
		Seksi 2 (Jaka Sampurna – Marga Jaya)	4,1	0	14,53	
		Total	16	48,98	71,21	
2.	Cinere – Jagorawi	Seksi 1 (Jagorawi – Raya Bogor)	3,7	100	100	PT. Trans Lingkar Kita Jaya
		Seksi 2 (Raya Bogor – Kukusan)	5,5	97,94	89,76	
		Seksi 2a (Cisalak – Margonda)	3,5	98,91	88,36	
		Seksi 2b (Margonda – Kukusan)	2	96,25	92,22	
		Seksi 3 (Kukusan – Cinere)	5,5	8,41	0	
		Total	14,7	65,19	59	
3.	Depok – Antasari	Seksi 1 (Antasari – Brigif/Cinere)	5,8	93	99,32	PT. Citra Waspphuto wa
		Seksi 2 (Brigif – Sawangan)	6,3	40,61	15,32	
		Seksi 2a (Brigif – Krukut)	2,7	99,57	35,75	
		Seksi 2b (Krukut – Sawangan)	3,6	11,27	0	
		Seksi 3 (Sawangan – Bojonggede)	9,5	0	0	
		Total	21,6	36,79	31,1	

No.		Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT
				Tanah Bebas	Konstruksi	
4	Cimanggis – Cibitung	Seksi 1 (Junction Cimanggis – Trans Yogie IC)	3,2	73,29	80,9	PT. Cimanggis Cibitung Tollways
		Seksi 2 (On/Off Ramp Jatikarya – Cibitung Junction)	23,3	44,89	18,76	
		Total	26,5	47,48	26,26	
5.	Cibitung – Cilincing	Seksi 1 (SS Cibitung – SS Telaga Asih)	8,38	49,27	25,44	PT. Cibitung Tanjung Priok Portways
		Seksi 2 (SS Telaga Asih – SS Tambung Utara)	9,13	63	0,88	
		Seksi 3 (Tambun Utara – Taruma Jaya)	10,67	47,3	1,99	
		Seksi 4 (Taruma Jaya – Cilincing)	4,58	0	0	
		Total	32,76	49,19	6,92	
6.	Serpong – Balaraja	Seksi 1 (BSD – Legok)	11,3	81	0	PT. Trans Bumi Serbaraja
		Seksi 2 (Legok – Tigaraksa Selatan)	10,7	0	0	
		Seksi 3 (Tigaraksa Selatan – Balaraja)	17,8	0	0	

No.		Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT
				Tanah Bebas	Konstruksi	
7.	Bogor Ring Road	Seksi 1 (Sentul – Kedung Halang)	3,9	100	100	PT. Marga Sarana Jabar
		Seksi 2 (Kedung Halang – Simpang Yasmin)	4,6	100	100	
		Seksi 2a (Kedung Halang – Kedung Badak)	2	100	100	
		Seksi 2b (Kedung Badak – Simpang Yasmin)	2,6	100	100	
		Seksi 3 (Simpang Yasmin – Salabenda)	4,5	0	0	
		Seksi 3a (Simpang Yasmin – Kayu Manis)	3	0	0	
		Seksi 3b (Kayu Manis – Salabenda)	1,5	0	0	
		Total	13	71,36	71,36	
8.	Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran	Seksi 1 (Kunciran – Tirtayasa)	2,04	18,11	8,58	PT. Marga Kunciran Cengkareng
		Seksi 2 (Tirtayasa – Benteng Betawi)	3,52	16,54	1,22	
		Seksi 3 (Benteng Betawi–H. Sastranegara)	6,57	54,85	12,33	
		Seksi 4 (H. Sastranegara – SS Benda)	2,06	95,84	55,4	
		Total	14,19	39,17	12,37	

No.		Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT
				Tanah Bebas	Konstruksi	
9.	6 Tol Dalam Kota Jakarta	Seksi A (Kelapa Gading – Pulau Gebang)	9,3	80,43	13,56	PT. Jakarta Toll Road Development
		Seksi B (Semanan – Grogol)	9,5	0	0	
		Seksi C (Grogol – Kelapa Gading)	12,4	0	0	
		Total	31,16	24,05	4,05	
10.	Jakarta – Cikampek II Elevated	Seksi 1 (Cikunir – Bekasi Barat)	2,94			PT. Jasamarga Jalan Layang Cikampek
		Seksi 2 (Bekasi Barat – Bekasi Timur)	3,42			
		Seksi 3 (Bekasi Timur – Tambun)	4,4			
		Seksi 4 (Tambun – Cibitung)	3,3			
		Seksi 5 (Cibitung – Cikarang Utara)	4,66			
		Seksi 6 (Cikarang Utara – Cikarang Barat)	1,96			
		Seksi 7 (Cikarang Barat – Cibatu)	3,11			
		Seksi 8 (Cibatu – Cikarang Timur)	3			
		Seksi 9 (Cikarang Timur – Karawang Barat)	9,58			
		Total	36,37		40,74	
11.	Serpong – Cinere	Seksi 1 (Sepung IC – Pamulang IC)	6,5	64,21	18,11	PT. Cinere Serpong Jaya
		Seksi 2 (Pamulang IC – Cinere IC)	3,65	15,78	0	
		Total	10,15	62,68	11,6	

No.		Ruas	Panjang (km)	Progres (%)		BUJT
				Tanah Bebas	Konstruksi	
12.	Kunciran – Serpong	Seksi 1 (Kunciran – Parigi)	6,72	95,29	53,3	PT. Marga Trans Nusantara
		Seksi 2 (Parigi – Serpong)	4,42	92,78	77,9	
		Total	10,14	94,37	63,06	
13.	Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan	Seksi 1 (SS Jatiasih – SS Bantar Gebang)	5,75	0	0	PT. Jasamarga Japek Selatan
		Seksi 2 (SS Bantar Gebang – SS Setu)	4,4	0	0	
		Seksi 3 (SS Setu – SS Sukaragam)	9,15	0	0	
		Seksi 4 (SS Sukaragam – SS Taman Mekar)	15,7	0	0	
		Seksi 5 (SS Taman Mekar – SS Kuta Negara)	19,3	0	0	
		Seksi 6 (SS Kuta Negara – SS Sadang)				
		Total	61,5	0	0	

Sumber: Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT), status 6 Juli 2018

Tabel 4.5
Jalan Tol Non Trans Jawa dalam Pembangunan

No.	Ruas		Panjang (km)	Progres (%)		BUJT
				Tanah Bebas	Konstruksi	
1.	Ciawi – Sukabumi	Seksi 1 (Ciawi – Cigombong)	15,35	98,55	91,52	PT. Trans Jabar Toll
		Seksi 2 (Cigombong – Cibadak)	11,9	20,63	0	
		Seksi 3 (Cibadak– Sukabumi Barat)	13,7	0	0	
		Seksi 4 (Sukabumi Barat – Sukabumi Timur)	13,05	0	0	
		Total	54	32,83	25,89	

No.	Ruas		Panjang (km)	Progres (%)		BUJT
				Tanah Bebas	Konstruksi	
2.	Cileunyi – Sumedang – Dawuan	Seksi 1 (Cileunyi – Ranca Kalong)	10,57	37,43	0	PT. Citra Karya Jabar Tol
		Seksi 2 Fase 1 (Ranca Kalong – Sumedang)	6,35	100	100	
		Seksi 2 Fase 2 (Ciherang – Sumedang)	10,7	83,56	42,53	
		Total	27,62	69,69	39,47	
		Seksi 3 (Sumedang – Cimalaka) (BUJT)	3,75	99,74	8,2	
		Seksi 4 (Cimalaka – Legok) (BUJT)	8,2	1,44	0	
		Seksi 5 (Legok – Ujung Jaya) (BUJT)	16,42	0	0	
		Seksi 6 (Ujung Jaya – Dawuan) (BUJT)	4,23	0	0	
		Total	32,6	11,84	0,94	
3.	Krian – Legundi – Bunder – Manyar	Seksi 1 (Krian – Kademean Mengganti)	10,55	85,7	47,04	PT Waskita Bumi Wira
		Seksi 2 (Krian – Kademean – Mengganti – Boboh)	7,95	86,52	50,99	
		Seksi 3 (Boboh – Bunder)	10,66	93,48	64,34	
		Seksi 4 (Bunder – Manyar)	9,13	0	0	
		Total	38,29	86,99	41,43	
4.	Pandaan – Malang	Seksi 1 (Pandaan – Purwodadi)	15,35	87,16	75,41	PT. Jasamarga Pandaan Malang
		Seksi 2 (Purwodadi – Lawang)	7,4	81,79	50,66	
		Seksi 3 (Lawang – Singosari)	8,25	96 75,81	54,83	
		Seksi 4 (Singosari – Pakis)	5,1		18,01	
		Seksi 5 (Pakis – Malang)	2,38	41,83	9,84	
		Total	38,48	83,71	54,58	

No.	Ruas		Panjang (km)	Progres (%)		BUJT
				Tanah Bebas	Konstruksi	
5.	Balikpapan – Samarinda	Seksi 1 (Balikpapan – Samboja)	22,03	95,23	85,8	PT. Jasamarga Balikpapan Samarinda
		Seksi 2 (Samboja – Muara Jawa)	30,98	92,2	58,34	
		Seksi 3 (Muara Jawa – Palaran)	17,5	96,25	73,63	
		Seksi 4 (Palaran – Samarinda)	17,95	95,48	51,47	
		Seksi 5	11,09	96	40,67	
		(Balikpapan – Bandara Sepinggán)				
		Total	99,55	94,6	63,89	
6	Manado – Bitung	Seksi 1 (Ring Road Manado – Sukur – Airmadidi)	14	89,13	59,02	PT. Jasa Marga Manado Bitung
		Seksi 1a (Maumbi – Suwaan)	7	96,14	46,56	
		Seksi 1b (Sukur – Tumaluntung)	7	82,11	71,48	
		Seksi 2 (Airmadidi – Bitung)	25	79,06	37,71	
		Seksi 2a (Paslaten – Watudambo II)	11,5	98,84	73,74	
		Seksi 2b (Sagerat – Pateten)	13,5	67,5	7,02	
		Total	39	82,67	45,36	
7	Serang – Panimbang	Porsi BUJT	50,68	17,79	0,05	PT. Wijaya Karya Serang Panimbang
		Porsi Pemerintah	33	0	0	
		Total	83,68	0,41	0,41	

Sumber: Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT), status 6 Juli 2018

Tabel 4.6
Jalan Tol Trans Sumatera dalam Pembangunan

No.	Ruas		Panjang (km)	Progres (%)		BUJT
				Tanah Bebas	Konstruksi	
1.	Bakauheuni – Terbanggi Besar	Paket 1 (Bakauheni – Sidomulyo)	39,4	99,82	87,66	PT Utama Karaya
		Paket 2 (Sidomulyo – Kotabaru)	40,6	99,58	85,45	
		Paket 3 (Kotabaru – Metro)	29	97,78	77,14	
		Paket 4 (Metro – Terbanggi Besar)	31,93	99,2	84,63	
		Total	140,7	95,02	81,04	
2.	Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayuagung	Seksi 1 (Terbanggi Besar – Pematang Panggang)	112,2	84,43	64,98	PT Utama Karaya
		Seksi 2 (Pematang Panggang – Kayu Agung)	77	93,39	61,43	
		Total	189,2	88,08	63,53	
3.	Kayuagung – Palembang – Betung	Seksi 1 (Kayu Agung – Jakabaring)	33,5	99,48	31,35	PT Sriwijaya Markmore Persada
		Seksi 2 (Jakabaring – Musilindas)	33,9	70,49	50,78	
		Seksi 3 (Musilindas – Betung)	44,29	97,86	11,98	
		Total	111,69	88,35	29,57	
4.	Pelambang – Indralaya	Seksi 1 (Palembang – Pamulatan)	7	100	100	PT Utama Karaya
		Seksi 2 (Pamulatan – KTM)	5,65	100	71,95	
		Seksi 3 (KTM – Simpang Indralaya)	9,28	100	98,77	
		Total	21,93	100	88,41	

No.	Ruas		Panjang (km)	Progres (%)		BUJT
				Tanah Bebas	Konstruksi	
5.	Pekanbaru – Kandis – Dumai	Seksi 1 (Pekanbaru – Minas)	9,2	83,61	29,26	PT Utama Karaya
		Seksi 2 (Minas – Petapahan)	23,6	69,6	11,35	
		Seksi 3 (Petapahan – Kandis Utara)	17,45	83,65	17,13	
		Seksi 4 (Kandis Utara – Duri Selatan)	28,95	58,31	0,47	
		Seksi 5 (Duri Selatan – Duri Utara)	27,23	51,56	0	
		Seksi 6 (Duri Utara – Dumai)	25,05	78,57	0,73	
		Total	131,48	75,69	17,59	
6.	Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi	Seksi 1a (BUJT)	3,25	97,05	100	PT. Jasamarga Kualanamu Tol
		Seksi 1b (Pemerintah)	7,5	99,85	100	
		Seksi 2	7,05	100	100	
		Seksi 3	4,4	100	100	
		Seksi 4a	6,6	100	100	
		Seksi 4b	6,22	100	100	
		Seksi 5	9,6	100	100	
		Seksi 6	7,8	100	100	
		Seksi 7a	4,49	77	50,39	
		Seksi 7b	4,81	92,09	71,09	
		Total	61,7	94,14	94,14	
7.	Medan – Binjai	Seksi 1 (Tj. Mulia – Helvetia)	6,27	76,9	84,33	PT Utama Karaya
		Segmen SS Helvetia –Jln Veteran	2,8			
		Segmen Jln Veteran – Tj. Mulia	3,47			
		Seksi 2 (Helvetia– Semayang)	6,18	100	100	
		Seksi 3 (Semayang – Binjai)	4,28	100	100	
		Total	16,73	94,35	91,52	

Sumber: Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT), status 6 Juli 2018

Pada Tabel 4.7 disajikan data mengenai jalan tol dalam perencanaan. Terdapat 7 ruas jalan tol dalam perencanaan. Salah satu ruas dalam proses tender adalah ruas Serang – Panimbang (**33,7 km**), 6 ruas lainnya berstatus persiapan tender.

Tabel 4.7
Jalan Tol dalam Perencanaan

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)	Nilai Investasi (Triliun)	Keterangan
1.	Serang – Panimbang	33,7	3,4	Proses Tender
2.	Semarang – Demak	25,25	dalam persiapan	Persiapan Tender
3.	Kamal – Teluk Naga – Rajeg	39,4	17	Persiapan Tender
4.	Semanan – Balaraja	31,67	10,3	Persiapan Tender
5.	Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap	184	46,6	Persiapan Tender
6.	Akses Pelabuhan Patimban	37,63	5,35	Persiapan Tender
7.	Jembatan Balikpapan – Penajam Passer Utara	7,6	16,5	Persiapan Tender

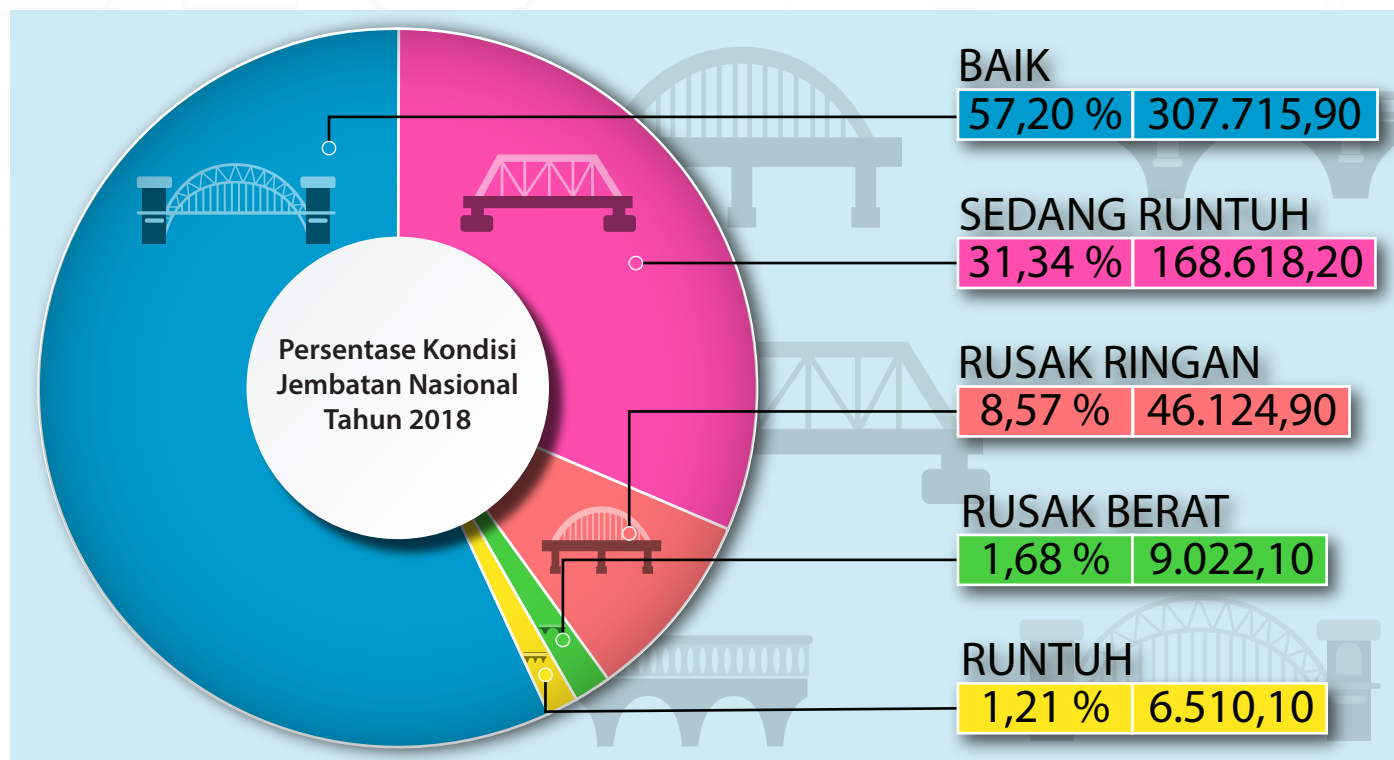
Sumber: Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT), status 6 Juli 2018

C. Jembatan Nasional

Jembatan merupakan bangunan infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan dua tempat yang pisah karena kondisi geografis. Menurut **Peraturan Menteri PUPR No. 41/PRT/M/2015** tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah. Ada 3 jenis jembatan yaitu:

- Jembatan pelengkung, jembatan dengan struktur setengah lingkaran dimana pada kedua ujungnya bertumpu pada abutment.
- Jembatan beruji kabel, struktur jembatan yang mempunyai sederet kabel lurus dan memikul elemen horizontal kaku (berupa balok, rangka, atau box). Jembatan ini terdiri dari sistem struktur berupa gelagar menerus yang didukung oleh penunjang berupa kabel yang dibentang miring dan dihubungkan ke pilon sebagai penahan utama.
- Jembatan kabel gantung, tipe jembatan dimana dek jembatan digantung di bawah kabel penggantung dengan menggunakan penggantung vertical (*hanger*).

Pada tahun 2018 tercatat sepanjang **307.715,9 km** dari **537.991,2 km (57,20%)** jembatan di Indonesia dalam kondisi baik, sedangkan **1,21%** lainnya dalam kondisi runtuh. Provinsi yang memiliki total panjang jembatan terpanjang adalah Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar **33.606 km, 45,96%** dalam keadaan baik; **42,67% sedang**; **10,43% rusak ringan**; **0,94% rusak berat**; dan **0% runtuh**. Pada **Tabel 4.11** tersaji kondisi jembatan nasional seluruh provinsi di Indonesia.



Gambar 4.2
Persentase Kondisi Jembatan Nasional Tahun 2018

Tabel 4.8
Kondisi Jembatan Nasional Tahun 2018

Provinsi	Kondisi Panjang Jembatan Nasional (km)					Total
	Baik	Sedang Runtuh	Rusak Ringan	Rusak Berat	Runtuh	
Aceh	17.442,60	6.966,70	1.575,20	70,2	0	26.054,70
Sumatera Utara	12.163,00	9.789,40	3.261,20	269,6	0	25.483,20
Sumatera Barat	13.126,30	4.673,90	765,5	198,2	54	18.817,90
Riau	5.500,30	7.075,00	2.623,70	65,8	0	15.264,80
Jambi	4.179,60	5.985,30	482,6	150,9	0	10.798,40
Sumatera Selatan	869,1	11.834,10	3.649,00	82,1	0	16.434,30
Bengkulu	2.830,00	2.410,30	2.863,70	1.230,60	0	9.334,60
Lampung	7.632,20	1.663,70	1.511,00	12,5	0	10.819,40
Kepulauan Bangka Belitung	1.798,20	922,8	18,3	8,4	29,1	2.776,80
Kepulauan Riau	5.068,70	2.251,50	236,3	71,5	0	7.628,00

Provinsi	Kondisi Panjang Jembatan Nasional (km)					Total
	Baik	Sedang Runtuh	Rusak Ringan	Rusak Berat	Runtuh	
DKI Jakarta	3.842,50	1.342,60	685	0	0	5.870,10
Jawa Barat	15.446,80	14.339,60	3.504,70	314,9	0	33.606,00
Jawa Tengah	18.204,60	11.465,70	1.613,60	648,1	0	31.932,00
D.I. Yogyakarta	4.736,60	513,4	1.184,70	0	0	6.434,70
Jawa Timur	24.322,30	3.578,30	728,5	121,4	4,2	28.754,70
Banten	4.234,60	2.063,30	369,9	63	0	6.730,80
Bali	8.072,40	1.390,60	140,4	171,3	0	9.774,70
Nusa Tenggara Barat	4.447,50	3.372,90	892,3	35,7	0	8.748,40
Nusa Tenggara Timur	5.043,30	4.471,10	1.696,60	77,8	0	11.288,80
Kalimantan Barat	11.567,80	8.944,40	2.358,00	81	0	22.951,20
Kalimantan Tengah	14.233,80	15.306,20	870	1.020,40	0	31.430,40
Kalimantan Selatan	13.377,10	2.515,60	2.082,20	259,4	128	18.362,30
Kalimantan Timur	7.347,30	1.613,10	47,5	3	0	9.010,90
Kalimantan Utara	1.898,00	5.012,50	502	8	0	7.420,50
Sulawesi Utara	8.970,10	6.943,30	285,1	0	0	16.198,50
Sulawesi Tengah	12.674,80	11.119,30	909,9	5	0	24.709,00
Sulawesi Selatan	11.908,80	3.592,90	1.324,10	14,1	0	16.839,90
Sulawesi Tenggara	8.888,50	3.020,50	501,6	34,9	0	12.445,50
Gorontalo	2.968,90	2.630,70	604,5	7	0	6.211,10
Sulawesi Barat	7.947,50	305,9	327,1	10,6	5,5	8.596,60
Maluku	17.039,50	2.001,90	2.241,10	277,6	3.542,60	25.102,70
Maluku Utara	5.552,80	3.697,30	2.589,40	2.137,80	62,2	14.039,50
Papua Barat	9.746,60	334,8	249	298,3	80	10.708,70
Papua	14.633,80	5.469,60	3.431,20	1.273,00	2.604,50	27.412,10
Indonesia	307.715,90	168.618,20	46.124,90	9.022,10	6.510,10	537.991,20

Sumber: Subdirektorat Analisa Data dan Pengembangan Sistem, Direktorat Jenderal Bina Marga.

D. Jalan Daerah

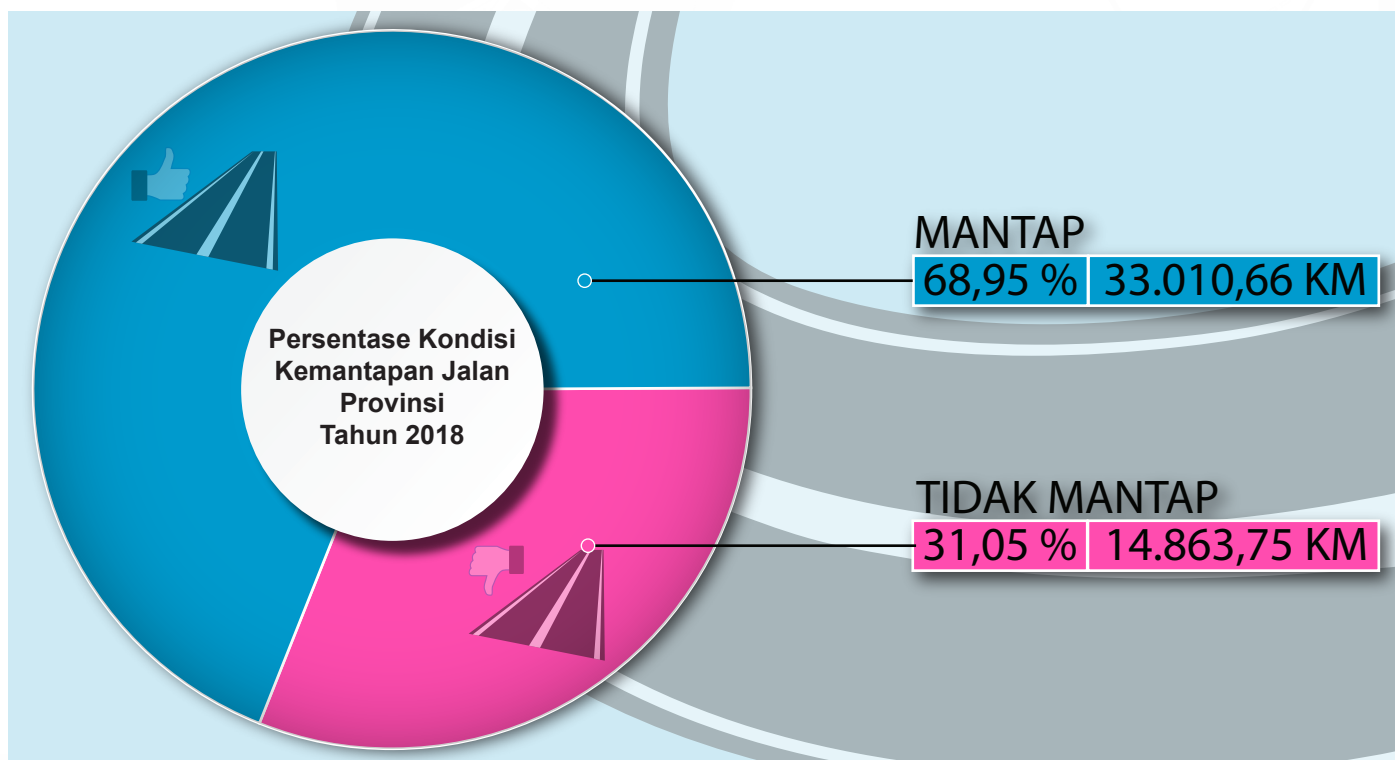
Jalan daerah merupakan jalan yang kewenangan pembinaannya berada ditangan pemerintah daerah. Jalan daerah antara lain jalan provinsi, jalan kota, dan jalan kabupaten. Panjang jalan daerah sering terjadi perubahan, hal ini disebabkan adanya pembangunan jalan baru, perubahan status kewenangan jalan, serta ada beberapa jalan yang belum ditetapkan status kewenangannya. Panjang jalan daerah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah.

Peran Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga selaku penyelenggara jalan adalah memberikan fasilitas kepada penyelenggara jalan daerah berupa pembinaan, sosialisasi, pelatihan, serta bantuan pendanaan. Data jalan daerah diperoleh berdasarkan hasil entri dari daerah. Pengumpulan data jalan daerah dilakukan Direktorat Jenderal Bina Marga terkait dengan pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK).

D.1. Jalan Provinsi

Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, atau antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis nasional. Pembinaan jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi/gubernur.

Apabila dilakukan agregasi terhadap kondisi kemantapan jalan provinsi, persentase mantap jalan provinsi Indonesia sebesar **68,95%**. Pada **Tabel 4.8** dapat dilihat secara rinci kondisi panjang jalan provinsi tahun 2018. Kondisi jalan provinsi di Provinsi Jawa Tengah memiliki kondisi jalan mantap terbaik dengan persentase kemantapan jalan sebesar **98,88%**. Sama halnya dengan 2 provinsi lainnya yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan masing-masing persentase sebesar **98,17%** dan **93,03%**. Kondisi berbeda terjadi di Provinsi Kalimantan Utara, persentase kemantapan jalan di provinsi ini sebesar **12,15%**.



Gambar 4.3
Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2018

Tabel 4.9
Kondisi Panjang Jalan Provinsi Tahun 2018

Provinsi	Panjang (km)	Mantap		Tidak Mantap	
		km	%	km	%
Aceh	1.781,72	1.129,51	63,39	652,21	36,61
Sumatera Utara	3.048,50	2.570,22	84,31	478,28	15,69
Sumatera Barat	1.525,20	1.083,68	71,05	441,52	28,95
Riau	2.799,81	1.636,23	58,44	1.163,58	41,56

Provinsi	Panjang (km)	Mantap		Tidak Mantap	
		km	%	km	%
Jambi	1.032,84	783,44	75,85	249,40	24,15
Sumatera Selatan	1.513,65	1.170,82	77,35	342,84	22,65
Bengkulu	1.562,67	851,60	54,50	711,07	45,50
Lampung	1.693,27	1.304,27	77,03	389,00	22,97
Kepulauan Bangka Belitung	850,99	791,71	93,03	59,28	6,97
Kepulauan Riau	896,45	614,25	68,52	282,20	31,48
DKI Jakarta*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	2.360,58	2.317,49	98,17	43,09	1,83
Jawa Tengah	2.404,74	2.377,70	98,88	27,04	1,12
D.I. Yogyakarta	760,45	549,50	72,26	210,95	27,74
Jawa Timur	1.421,00	1.283,34	90,31	137,67	9,69
Banten	762,03	627,97	82,41	134,06	17,59
Bali	743,34	621,27	83,58	122,07	16,42
Nusa Tenggara Barat	1.484,43	1.145,51	77,17	338,92	22,83
Nusa Tenggara Timur	2.650,00	1.689,09	63,74	960,92	36,26
Kalimantan Barat	1.534,75	1.282,19	83,54	252,57	16,46
Kalimantan Tengah	1.272,08	676,78	53,20	595,30	46,80
Kalimantan Selatan	762,61	541,96	71,07	220,65	28,93
Kalimantan Timur	884,80	457,05	51,66	427,75	48,34
Kalimantan Utara	851,88	103,54	12,15	748,33	87,85
Sulawesi Utara	926,74	660,30	71,25	266,44	28,75
Sulawesi Tengah	1.643,74	1.000,84	60,89	642,90	39,11
Sulawesi Selatan	2.015,23	1.154,16	57,27	861,07	42,73
Sulawesi Tenggara	1.009,28	734,70	72,79	274,58	27,21
Gorontalo	467,17	193,67	41,46	273,50	58,54
Sulawesi Barat	185,96	105,43	56,69	80,54	43,31
Maluku	1.080,30	470,34	43,54	609,96	56,46
Maluku Utara	1.276,80	450,25	35,26	826,56	64,74
Papua Barat	2.309,65	1.460,99	63,26	848,65	36,74
Papua	2.361,76	1.170,87	49,58	1.190,89	50,42
Indonesia	47.874,42	33.010,66	68,95	14.863,75	31,05

Sumber : Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah, Status Agustus 2018.

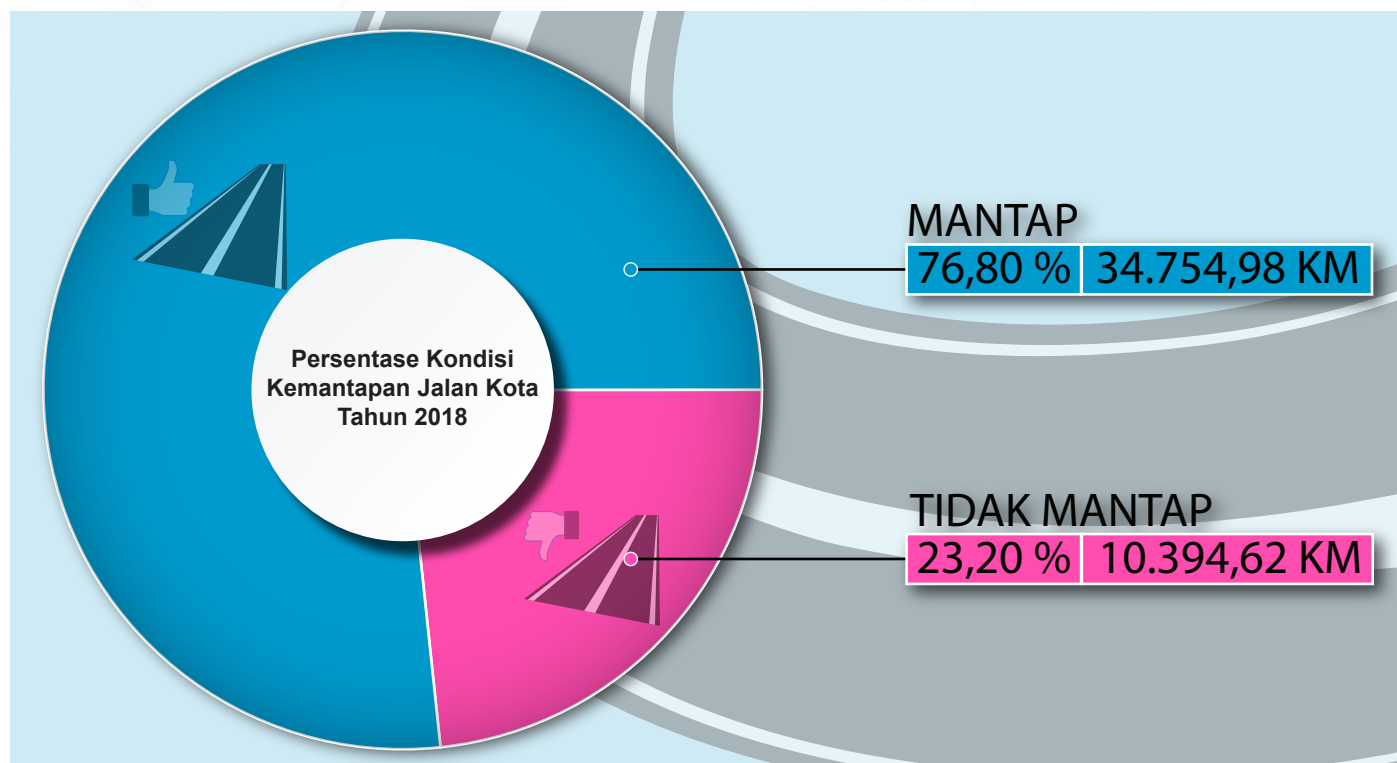
Keterangan:

*) Provinsi DKI Jakarta tidak mengajukan DAK pada Kementerian PUPR.

D.2. Jalan Kota

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota. Wewenang penyelenggaraan jalan kota dilaksanakan oleh pemerintah kota/wali kota.

Secara umum kondisi kemantapan jalan kota di Indonesia dalam keadaan baik, dapat dilihat pada **Gambar 4.3** Persentase jalan kota mantap secara agregat sebesar **76,80%**. Pada **Tabel 4.9** dapat dilihat secara terperinci menurut provinsi. Provinsi dengan persentase mantap tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat sebesar **92,20%**. Dua provinsi lainnya yang memiliki persentase kondisi mantap tinggi adalah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Timur yaitu masing-masing sebesar **89,77%** dan **88,85%**. Provinsi dengan persentase kondisi mantap terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur **51,94%**.



Gambar 4.4
Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Kota Tahun 2018

Tabel 4.10
Kondisi Panjang Jalan Kota Tahun 2018

Provinsi	Panjang (km)	Mantap		Tidak Mantap	
		km	%	km	%
Aceh	2.349,61	1.619,78	68,94	729,83	31,06
Sumatera Utara	5.531,90	4.462,20	80,66	1.069,70	19,34
Sumatera Barat	3.437,92	2.471,58	71,89	966,34	28,11
Riau	2.476,14	1.641,53	66,29	834,62	33,71
Jambi	703,18	526,49	74,87	176,69	25,13
Sumatera Selatan	1.905,93	1.449,12	76,03	456,81	23,97
Bengkulu	942,57	763,31	80,98	179,26	19,02
Lampung	961,97	712,63	74,08	249,34	25,92
Kepulauan Bangka Belitung	403,14	326,7	81,04	76,44	18,96
Kepulauan Riau	1.065,99	796,88	74,76	269,1	25,24
DKI Jakarta*)	0	0	0	0	0

Provinsi	Panjang (km)	Mantap		Tidak Mantap	
		km	%	km	%
Jawa Barat	4.323,89	3.986,70	92,2	337,19	7,8
Jawa Tengah	1.895,55	1.648,51	86,97	247,04	13,03
D.I. Yogyakarta	233,23	191,09	81,93	42,14	18,07
Jawa Timur	3.469,16	3.082,48	88,85	386,68	11,15
Banten**)	893	801,68	89,77	91,32	10,23
Bali	486,16	369,32	75,97	116,85	24,03
Nusa Tenggara Barat	627,95	472,01	75,17	155,94	24,83
Nusa Tenggara Timur	1.574,78	817,89	51,94	756,89	48,06
Kalimantan Barat	705,71	450,91	63,89	254,8	36,11
Kalimantan Tengah	911,83	490,73	53,82	421,11	46,18
Kalimantan Selatan	1.345,41	1.020,13	75,82	325,27	24,18
Kalimantan Timur	1.577,82	1.257,29	79,69	320,53	20,31
Kalimantan Utara	225,5	134,34	59,57	91,17	40,43
Sulawesi Utara	1.922,89	1.524,49	79,28	398,4	20,72
Sulawesi Tengah	851,56	601,69	70,66	249,87	29,34
Sulawesi Selatan	1.460,24	1.119,40	76,66	340,84	23,34
Sulawesi Tenggara	887,76	595,07	67,03	292,69	32,97
Gorontalo	237,29	202,79	85,46	34,5	14,54
Sulawesi Barat***)	0	0	0	0	0
Maluku	620,51	499,4	80,48	121,11	19,52
Maluku Utara	683,22	380,77	55,73	302,45	44,27
Papua Barat	179,41	152,25	84,86	27,16	15,14
Papua	258,36	185,82	71,92	72,54	28,08
Indonesia	45.149,58	34.754,98	76,98	10394,62	23,02

Sumber : Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah, status Agustus 2018.

Keterangan: *) Provinsi DKI Jakarta tidak mengajukan DAK pada Kementerian PUPR.

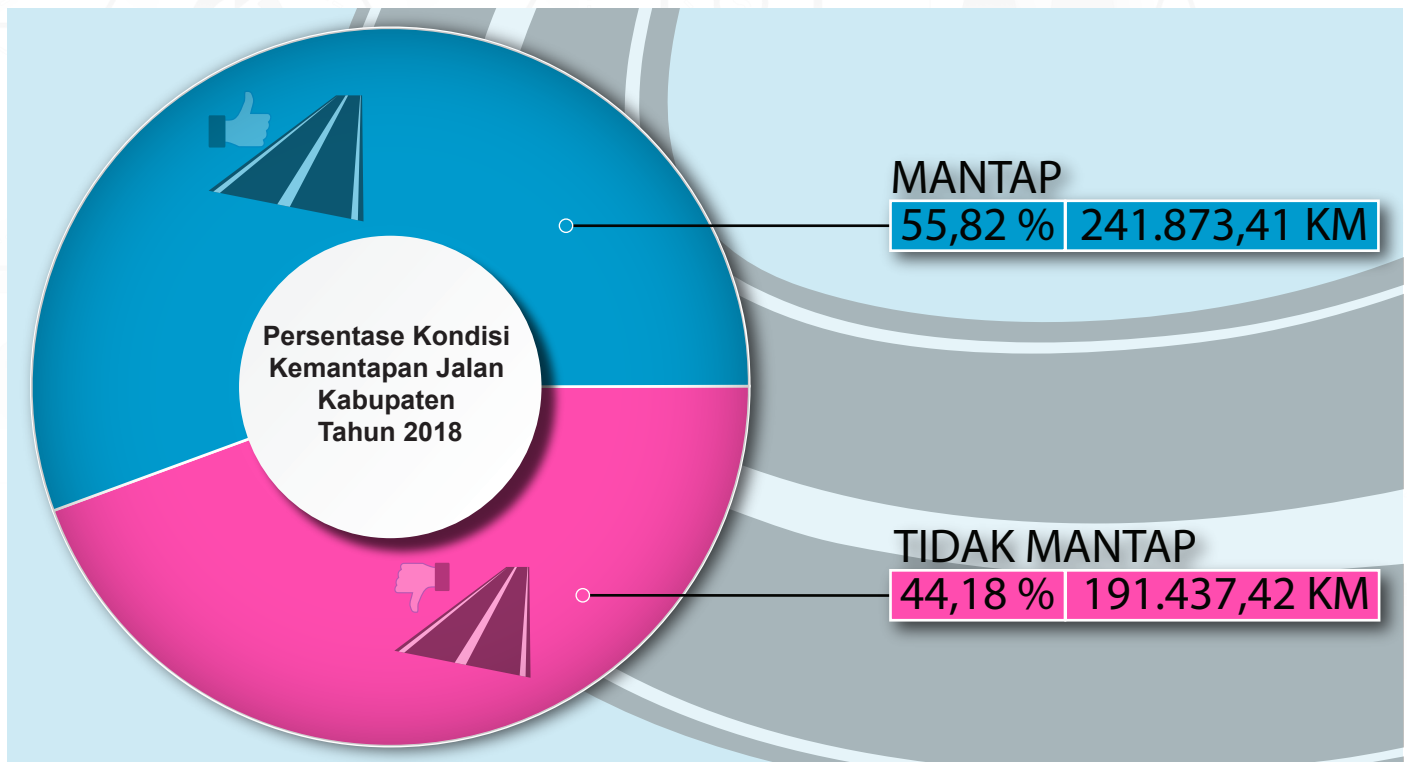
***) Tanpa Kota Tangerang Selatan, tidak mengajukan DAK kepada Kementerian PUPR.

***) Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki kota.

D.3. Jalan Kabupaten

Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Wewenang pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/bupati. Selain jalan kabupaten, pemerintah kabupaten pun berwenang atas penyelenggaraan jalan desa.

Secara keseluruhan kondisi kemandapan jalan kabupaten di Indonesia dalam kondisi mantap, dengan persentase sebesar **55,82%**. Pada Tabel 4.10 menampilkan kondisi kemandapan jalan kabupaten berdasarkan provinsi. Provinsi dengan persentase mantap jalan tertinggi adalah Provinsi Banten yaitu sebesar **80,21%**, diikuti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Jawa Tengah masing-masing sebesar **73,05%** dan **71,71%**. Sedangkan provinsi dengan persentase kondisi mantap terendah adalah Provinsi Papua Barat yaitu sebesar **30,26%**.



Gambar 4.5
Persentase Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten Tahun 2018

Tabel 4.11
Kondisi Panjang Jalan Kabupaten Tahun 2018

Provinsi	Panjang (km)	Mantap		Tidak Mantap	
		km	%	km	%
Aceh	19.768,27	8.289,50	41,93	11.478,77	58,07
Sumatera Utara	33.084,60	17.645,29	53,33	15.439,31	46,67
Sumatera Barat	19.413,79	10.417,66	53,66	8.996,13	46,34
Riau	19.773,81	10.282,80	52,00	9.491,01	48,00
Jambi	10.188,95	6.138,10	60,24	4.050,85	39,76
Sumatera Selatan	15.653,55	10.179,80	65,03	5.473,75	34,97
Bengkulu	6.882,92	3.915,77	56,89	2.967,15	43,11
Lampung	17.774,16	9.452,41	53,18	8.321,75	46,82
Kepulauan Bangka Belitung	3.928,80	2.870,11	73,05	1.058,69	26,95
Kepulauan Riau	4.202,98	2.025,04	48,18	2.177,94	51,82
DKI Jakarta*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	23.004,92	17.505,69	76,10	5.499,24	23,90
Jawa Tengah	26.653,63	19.112,70	71,71	7.540,94	28,29
D.I. Yogyakarta	3.361,61	2.497,52	74,30	864,09	25,70
Jawa Timur	35.755,96	25.298,89	70,75	10.457,07	29,25
Banten	4.056,93	3.254,06	80,21	802,86	19,79
Bali	7.166,07	5.129,01	71,57	2.037,06	28,43

Provinsi	Panjang (km)	Mantap		Tidak Mantap	
		km	%	km	%
Nusa Tenggara Barat	6.085,03	3.360,62	55,23	2.724,41	44,77
Nusa Tenggara Timur	19.063,52	9.455,90	49,60	9.607,62	50,40
Kalimantan Barat	14.638,65	6.890,77	47,07	7.747,88	52,93
Kalimantan Tengah	14.663,05	6.847,57	46,70	7.815,48	53,30
Kalimantan Selatan	11.480,29	6.242,57	54,38	5.237,73	45,62
Kalimantan Timur	10.735,25	5.732,91	53,40	5.002,33	46,60
Kalimantan Utara	2.464,39	1.298,66	52,70	1.165,73	47,30
Sulawesi Utara	7.414,85	4.203,88	56,70	3.210,97	43,30
Sulawesi Tengah	12.890,59	6.085,96	47,21	6.804,64	52,79
Sulawesi Selatan	26.708,39	15.044,23	56,33	11.664,16	43,67
Sulawesi Tenggara	10.527,00	4.389,98	41,70	6.137,03	58,30
Gorontalo	4.258,11	2.422,41	56,89	1.835,71	43,11
Sulawesi Barat	4.722,69	2.348,91	49,74	2.373,77	50,26
Maluku	7.292,89	3.198,32	43,86	4.094,56	56,14
Maluku Utara	4.874,25	2.247,49	46,11	2.626,76	53,89
Papua Barat	8.641,64	2.615,09	30,26	6.026,56	69,74
Papua	16.179,30	5.473,82	33,83	10.705,48	66,17
Indonesia	433.310,83	241.873,41	55,82	191.437,42	44,18

Sumber: Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah, Status Agustus 2018
Keterangan:

*) Provinsi DKI Jakarta tidak mengajukan DAK pada Kementerian PUPR



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**



BAB V

STATISTIK INFRASTRUKTUR CIPTA KARYA

INFORMASI STATISTIK
PEKERJAAN UMUM &
PERUMAHAN RAKYAT
2019

**STATISTIK
INFRASTRUKTUR
CIPTA KARYA**



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

A. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam kualitas dan kuantitas yang memadai. Air minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Seiring meningkatnya populasi dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum pun meningkat. Hal ini juga memengaruhi ketersediaan dan kualitas air di alam. Untuk itu perlu suatu sistem penyediaan air minum, guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menerangkan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk menyediakan air minum kepada masyarakat.

SPAM dapat dilakukan melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Dalam SPAM jaringan perpipaan, air minum disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan. Sementara SPAM bukan perpipaan air minum disalurkan atau diakses langsung oleh pelanggan tanpa sistem perpipaan. SPAM Jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Sementara SPAM bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan penangkap mata air.

A.1. Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan

Tabel 5.1 dan 5.2 menampilkan data teknis SPAM jaringan perpipaan Tahun 2018. Tercatat kapasitas produksi sebesar **162.336 liter/detik**, dengan yang paling tinggi adalah Provinsi Jawa Timur dengan **28.727 liter/detik**. Sementara pada Tabel 5.3 dan 5.4 ditampilkan data pelayanannya. Tercatat cakupan pelayanan di Indonesia sebesar **22,57%** dengan yang tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan **59,45%**.

Tabel 5.1
Data Teknis Sistem Penyediaan Air Minum

Provinsi	Kapasitas Terpasang (liter/detik)	Kapasitas Produksi (liter/detik)	Kapasitas Distribusi (liter/detik)
Aceh	4.176	2.371	1.522
Sumatera Utara	10.703	9.558	8.115
Sumatera Barat	5.040	3.465	3.156
Riau	3.286	1.628	1.280
Jambi	3.150	2.138	1.756
Sumatera Selatan	7.901	8.132	3.850
Bengkulu	1.972	1.505	1.073
Lampung	2.473	1.329	1.146
Kepulauan Bangka Belitung	1.053	578	360

Provinsi	Kapasitas Terpasang (liter/detik)	Kapasitas Produksi (liter/detik)	Kapasitas Distribusi (liter/detik)
Kepulauan Riau	3.482	2.981	2.603
DKI Jakarta	33.075	26.820	32.231
Jawa Barat	20.255	15.406	13.952
Jawa Tengah	18.977	14.675	13.852
D.I. Yogyakarta	2.643	1.675	1.377
Jawa Timur	35.342	28.727	18.753
Banten	7.447	6.645	6.037
Bali	5.333	4.352	2.656
Nusa Tenggara Barat	3.117	2.407	2.241
Nusa Tenggara Timur	3.634	1.313	1.162
Kalimantan Barat	4.050	2.616	2.497
Kalimantan Tengah	1.735	1.252	1.139
Kalimantan Selatan	6.045	3.855	3.753
Kalimantan Timur	6.217	5.575	5.256
Kalimantan Utara	1.466	860	612
Sulawesi Utara	2.542	1.903	1.402
Sulawesi Tengah	1.566	1.089	997
Sulawesi Selatan	5.887	3.819	3.668
Sulawesi Tenggara	2.193	1.540	1.488
Gorontalo	473	343	316
Sulawesi Barat	853	510	491
Maluku	1.145	747	594
Maluku Utara	981	820	664
Papua Barat	549	405	346
Papua	2.069	1.296	1.034
Indonesia	210.829	162.336	141.379

Sumber : Data Warehouse Sistem Penyediaan Air Minum, Cipta Karya, 27 Agustus 2018

Tabel 5.2
Data Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (Lanjutan)

Provinsi	Kapasitas Air Terjual (liter/detik)	Kapasitas Belum Terpakai (liter/detik)	Kehilangan Air (%)
Aceh	744	1.763	51,14
Sumatera Utara	2.533	947	68,79
Sumatera Barat	1.768	1.733	43,97
Riau	823	1.591	35,68
Jambi	1.107	911	36,96
Sumatera Selatan	2.417	1.696	37,22

Provinsi	Kapasitas Air Terjual (liter/detik)	Kapasitas Belum Terpakai (liter/detik)	Kehilangan Air (%)
Bengkulu	594	555	44,63
Lampung	712	845	37,87
Kepulauan Bangka Belitung	153	305	57,45
Kepulauan Riau	1.784	529	31,48
DKI Jakarta	16.931	6.255	47,47
Jawa Barat	8.429	3.965	39,58
Jawa Tengah	8.824	4.446	36,3
D.I. Yogyakarta	914	952	33,64
Jawa Timur	10.380	7.224	44,65
Banten	4.200	1.004	30,42
Bali	1.773	880	33,23
Nusa Tenggara Barat	1.405	692	37,3
Nusa Tenggara Timur	801	2.382	31,03
Kalimantan Barat	2.075	922	16,91
Kalimantan Tengah	848	463	25,58
Kalimantan Selatan	2.469	2.159	34,21
Kalimantan Timur	2.797	557	46,78
Kalimantan Utara	402	568	34,21
Sulawesi Utara	560	583	60,05
Sulawesi Tengah	656	528	34,2
Sulawesi Selatan	1.362	1.578	62,86
Sulawesi Tenggara	666	691	55,22
Gorontalo	203	130	35,89
Sulawesi Barat	434	233	11,62
Maluku	343	562	42,3
Maluku Utara	472	161	28,9
Papua Barat	133	172	61,66
Papua	500	777	51,61
Indonesia	80.213	48.761	

Sumber : Data Warehouse Sistem Penyediaan Air Minum, Cipta Karya, 27 Agustus 2018

Tabel 5.3
Data Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum

Provinsi	Jumlah (unit)	Sambungan Rumah (unit)	Hidran Umum (unit)
Aceh	108	149.008	1.637
Sumatera Utara	184	482.703	7.079
Sumatera Barat	134	265.608	601
Riau	120	87.363	141
Jambi	96	158.225	278
Sumatera Selatan	257	452.670	181
Bengkulu	56	80.390	91
Lampung	83	91.214	366
Kepulauan Bangka Belitung	80	35.160	235
Kepulauan Riau	42	188.829	109
DKI Jakarta	4	1.381.524	4.348
Jawa Barat	233	1.238.196	29.824
Jawa Tengah	299	1.558.124	13.929
D.I. Yogyakarta	47	159.346	2.046
Jawa Timur	380	2.270.855	8.744
Banten	68	260.919	248
Bali	43	351.848	2.440
Nusa Tenggara Barat	59	235.175	1.783
Nusa Tenggara Timur	85	106.697	1.249
Kalimantan Barat	99	215.827	520
Kalimantan Tengah	101	101.540	749
Kalimantan Selatan	110	353.787	4.152
Kalimantan Timur	104	280.038	26
Kalimantan Utara	28	43.539	0
Sulawesi Utara	82	75.953	598
Sulawesi Tengah	66	73.397	456
Sulawesi Selatan	163	377.023	2.794
Sulawesi Tenggara	163	95.802	740
Gorontalo	46	35.847	873
Sulawesi Barat	50	41.951	145
Maluku	58	34.144	526
Maluku Utara	36	66.525	475
Papua Barat	24	32.454	271
Papua	108	89.126	137
Indonesia	3.616	11.470.807	87.791

Sumber : Data Warehouse Sistem Penyediaan Air Minum, Cipta Karya, 27 Agustus 2018

Tabel 5.4
Data Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (Lanjutan)

Provinsi	Sambungan Komersial Non Domestik	Penduduk Terlayani (Jiwa)	Cakupan Pelayanan (%)
Aceh	50.907	1.027.872	22,87
Sumatera Utara	56.870	2.179.577	16,83
Sumatera Barat	35.581	1.264.320	26,09
Riau	1.052	439.403	7,93
Jambi	15.161	587.550	19
Sumatera Selatan	2.218	2.050.913	27,53
Bengkulu	19.915	346.648	20,21
Lampung	5.562	679.493	8,93
Kepulauan Bangka Belitung	7.555	119.131	9,74
Kepulauan Riau	23.797	703.007	41,87
DKI Jakarta	206.575	5.712.259	59,45
Jawa Barat	159.258	7.768.269	18,04
Jawa Tengah	68.820	7.782.936	24,6
D.I. Yogyakarta	4.939	973.710	28,16
Jawa Timur	29.211	7.546.975	20,62
Banten	4.168	1.202.352	11,31
Bali	33.232	1.676.382	43,09
Nusa Tenggara Barat	18.211	1.016.518	22,67
Nusa Tenggara Timur	3.397	650.500	13,97
Kalimantan Barat	9.294	535.062	12,22
Kalimantan Tengah	9.949	541.736	24,49
Kalimantan Selatan	30.435	1.747.872	48,2
Kalimantan Timur	16.141	1.356.479	44,79
Kalimantan Utara	2.306	262.711	50,07
Sulawesi Utara	10.360	349.785	15,44
Sulawesi Tengah	5.598	452.421	17,17
Sulawesi Selatan	25.914	1.976.403	25,35
Sulawesi Tenggara	492	504.630	22,64
Gorontalo	940	312.499	30,04
Sulawesi Barat	1.463	300.578	25,94
Maluku	5.650	222.877	14,53
Maluku Utara	735	337.868	32,55
Papua Barat	702	169.400	22,28
Papua	6.281	400.289	14,19
Indonesia	872.689	53.198.425	22,57

Sumber : Data Warehouse Sistem Penyediaan Air Minum, Cipta Karya, 27 Agustus 2018

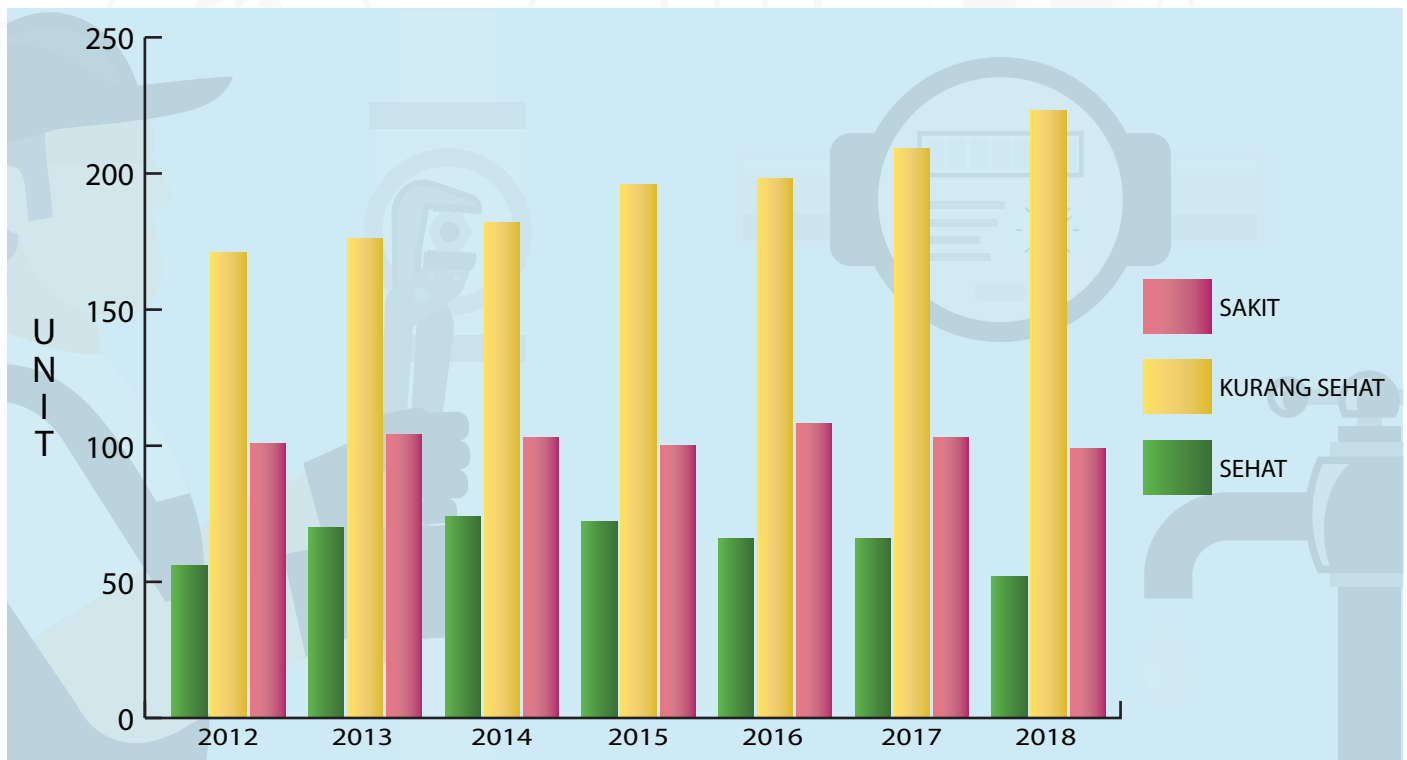
Penyelenggaraan SPAM bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), UPT, UPTD atau badan usaha. Untuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh BUMN dan atau BUMD khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), yang sebelumnya bernama Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, melakukan penilaian kinerjanya secara berkala setiap tahunnya. Kinerja tersebut dilakukan dengan menilai 4 aspek, yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia. Yang dilakukan penilaian oleh BPPSPAM adalah BUMD penyelenggara SPAM (PDAM), bukan SPAM non PDAM.

Pada **Tabel 5.5** dan **Gambar 5.1-5.2** terlihat perkembangan kinerja PDAM di Indonesia hasil penilaian BPPSPAM dari tahun 2012 hingga 2018. Jumlah PDAM yang dinilai setiap tahunnya bertambah. Persentase PDAM dalam kondisi kurang sehat menunjukkan peningkatan di tahun 2018, yaitu **59,63%** dengan jumlah 223 dari 374 PDAM yang dinilai. Selain jumlah tersebut, masih terdapat 13 PDAM yang belum dapat dinilai kinerjanya dikarenakan berbagai hal.

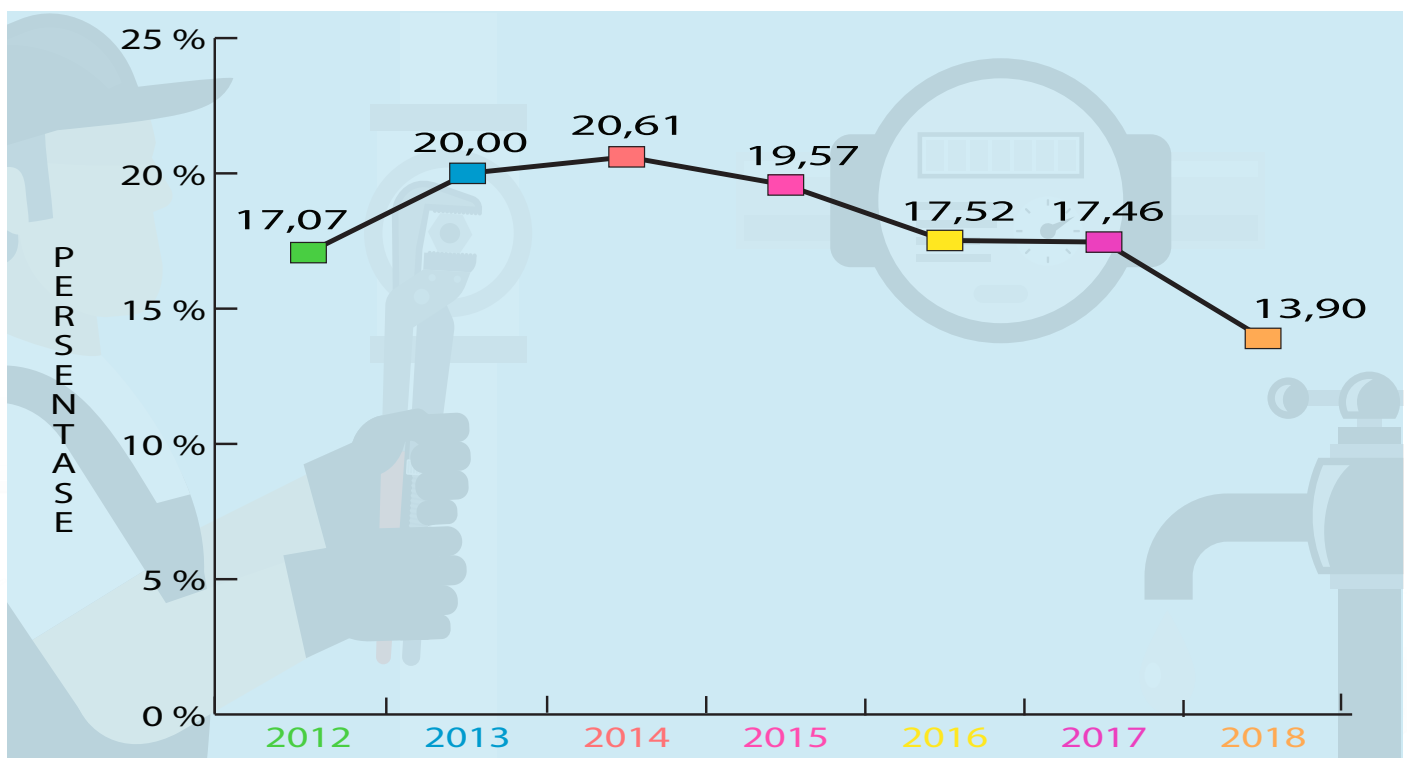
Tabel 5.5
Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2012-2018

Tahun	Kinerja PDAM			Jumlah	Persentase PDAM		
	Kurang Sehat	Sakit	Sehat		Kurang Sehat	Sakit	Sehat
2012	171	101	56	328	52,13	30,79	17,07
2013	176	104	70	350	50,29	29,71	20,00
2014	182	103	74	359	50,7	28,69	20,61
2015	196	100	72	368	53,26	27,17	19,57
2016	198	108	65	371	53,37	29,11	17,52
2017	209	103	66	378	55,29	27,25	17,46
2018	223	99	52	374	59,63	26,47	13,90

Sumber : Kinerja PDAM 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum



Gambar 5.1
Perkembangan Kinerja PDAM Tahun 2012-2018



Gambar 5.2
Persentase PDAM Dalam Kondisi Sehat Tahun 2012-2018

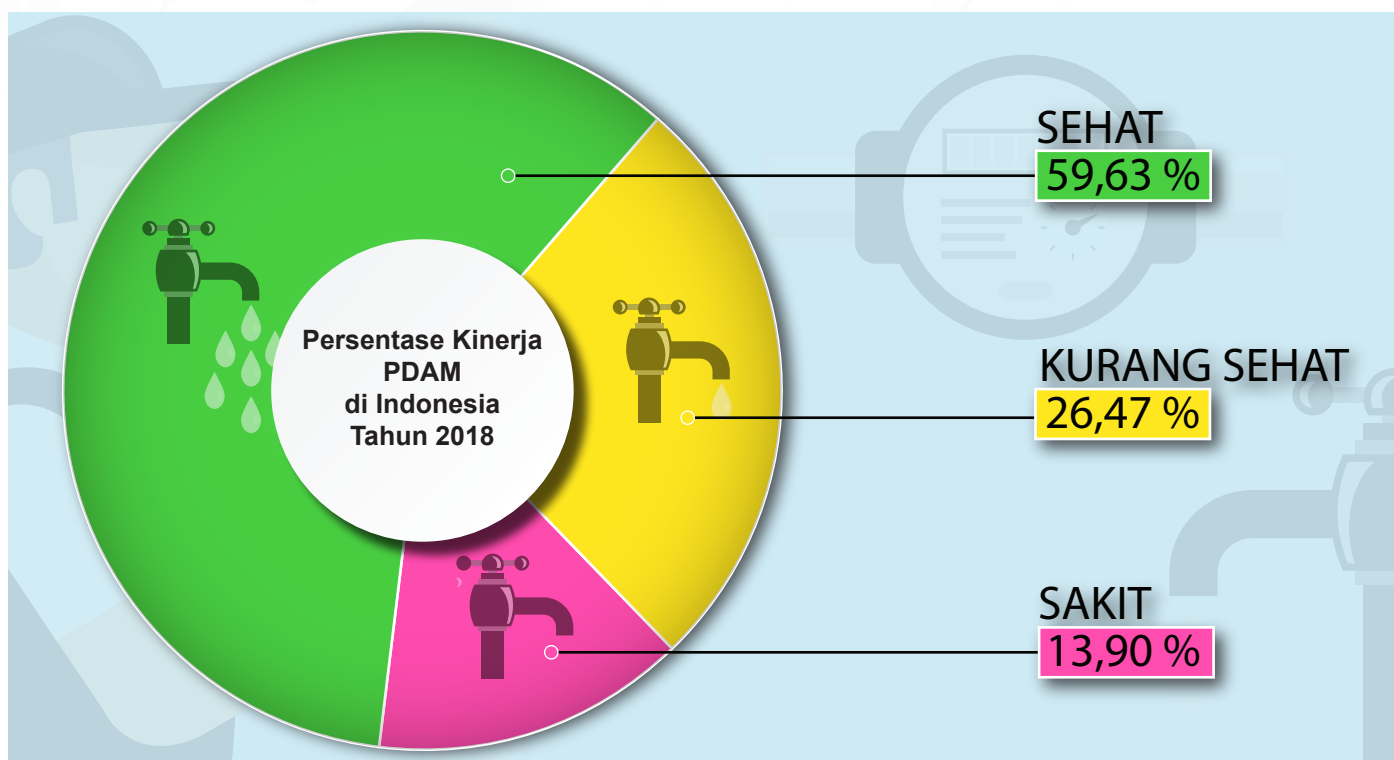
Pada **Tabel 5.6** di bawah ini ditampilkan hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2018 menurut provinsi. Sementara pada **Tabel 5.7** disajikan data hasil rekapitulasi kapasitas serta jumlah pelanggan dan penduduk terlayani PDAM di masing-masing provinsi di Indonesia.

Tabel 5.6
Kinerja PDAM di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2018

Provinsi	Sehat	Kurang Sehat	Sakit	Jumlah
Aceh	3	7	9	19
Sumatera Utara	6	10	2	18
Sumatera Barat	10	5	1	16
Riau	2	2	1	5
Jambi	6	2	1	9
Sumatera Selatan	2	6	4	12
Bengkulu	2	4	1	7
Lampung	2	2	4	8
Kepulauan Bangka Belitung	1	3	2	6
Kepulauan Riau	3	1	0	4
DKI Jakarta	1	0	0	1
Jawa Barat	21	2	0	23
Jawa Tengah	35	0	0	35
D.I. Yogyakarta	5	0	0	5
Jawa Timur	32	6	0	38
Banten	6	0	0	6
Bali	9	0	0	9
Nusa Tenggara Barat	5	2	1	8
Nusa Tenggara Timur	6	6	3	15
Kalimantan Barat	5	4	4	13
Kalimantan Tengah	5	8	1	14
Kalimantan Selatan	11	1	0	12
Kalimantan Timur	8	1	0	9
Kalimantan Utara	4	0	0	4
Sulawesi Utara	2	4	4	10
Sulawesi Tengah	4	5	0	9
Sulawesi Selatan	11	7	4	22
Sulawesi Tenggara	1	2	8	11
Gorontalo	3	2	0	5
Sulawesi Barat	2	1	1	4

Provinsi	Sehat	Kurang Sehat	Sakit	Jumlah
Maluku	4	2	0	6
Maluku Utara	3	2	1	6
Papua Barat	2	0	0	2
Papua	1	2	0	3
Indonesia	223	99	52	374

Sumber : Kinerja PDAM 2018, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.



Gambar 5.3
Persentase Kinerja PDAM di Indonesia Tahun 2018

Tabel 5.7
Kapasitas dan Layanan PDAM di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2018

Provinsi	Kapasitas Terpasang (l/det)	Volume Produksi Riil (l/det)	Jumlah Pelanggan (SL)	Jumlah Penduduk di Wilayah Pelayanan (jiwa)	Penduduk Terlayani (jiwa)
Aceh	4.701	2.936	216.053	3.865.412	1.187.848
Sumatera Utara	12.713	10.530	770.045	9.239.945	3.939.901
Sumatera Barat	5.669	3.585	289.753	3.120.997	1.633.054
Riau	1.833	624	61.368	1.818.899	475.441
Jambi	3.577	1.979	186.575	1.908.843	1.137.489

Provinsi	Kapasitas Terpasang (l/det)	Volume Produksi Riil (l/det)	Jumlah Pelanggan (SL)	Jumlah Penduduk di Wilayah Pelayanan (jiwa)	Penduduk Terlayani (jiwa)
Sumatera Selatan	9.069	5.580	452.321	5.160.009	2.839.258
Bengkulu	1.907	1.219	81.188	908.964	485.781
Lampung	1.639	898	74.547	1.875.398	562.007
Kepulauan Bangka Belitung	1.115	334	24.451	652.378	156.952
Kepulauan Riau	751	517	30.230	568.224	208.907
DKI Jakarta	20.225	19.452	851.469	9.818.240	6.109.287
Jawa Barat	21.218	17.331	1.485.621	25.234.025	11.365.812
Jawa Tengah	22.457	15.992	1.316.648	23.650.000	6.322.480
D.I. Yogyakarta	2.376	1.603	162.547	2.834.408	1.104.148
Jawa Timur	18.504	22.878	1.798.579	21.929.316	10.078.424
Banten	8.018	6.442	246.152	6.678.846	2.796.070
Bali	6.673	5.232	421.424	3.574.463	2.517.346
Nusa Tenggara Barat	4.044	2.815	259.316	3.400.412	1.543.458
Nusa Tenggara Timur	2.704	1.337	135.209	2.577.412	898.103
Kalimantan Barat	4.117	2.784	201.327	3.066.991	1.085.841
Kalimantan Tengah	2.491	1.367	138.388	1.284.086	807.464
Kalimantan Selatan	6.886	4.091	422.364	3.572.412	2.186.909
Kalimantan Timur	7.370	6.278	421.842	3.284.405	2.546.442
Kalimantan Utara	2.945	780	51.828	509.285	310.376
Sulawesi Utara	2.470	1.322	71.704	1.285.319	499.040
Sulawesi Tengah	1.846	1.012	103.848	1.399.560	631.313
Sulawesi Selatan	8.151	5.799	428.893	5.458.494	2.682.119
Sulawesi Tenggara	2.267	1.006	83.870	1.241.964	449.750
Gorontalo	925	550	49.440	728.994	339.227
Sulawesi Barat	723	336	39.995	658.685	252.754
Maluku	1.151	407	43.691	548.862	315.356
Maluku Utara	1.256	747	68.316	658.355	395.684
Papua Barat	129	125	10.882	169.058	67.642
Papua	1.006	903	37.590	394.072	277.970
Indonesia	192.926	148.791	11.037.474	153.076.733	68.209.653

Sumber : Kinerja PDAM 2018, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

A.2. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

Sebagaimana disampaikan bahwa SPAM dapat dijalankan melalui sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan penangkap mata air. **Tabel 5.8** dibawah ini menampilkan jumlah rumah tangga pengguna SPAM bukan jaringan perpipaan menurut provinsi. Rumah tangga pengguna SPAM bukan jaringan perpipaan tertinggi ada di Provinsi Jawa Barat, yaitu lebih dari **12 juta rumah tangga**.

Tabel 5.8
Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

Provinsi	BJP (Rumah Tangga)				Jumlah Rumah Tangga
	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Mata Air Terlindung	Air Hujan	
Aceh	98.391	360.962	51.610	7.693	1.196.127
Sumatera Utara	656.885	531.913	167.653	90.100	3.267.415
Sumatera Barat	111.379	272.932	104.377	25.959	1.219.670
Riau	413.038	341.567	13.813	247.442	1.511.499
Jambi	63.993	222.936	8.852	85.258	848.029
Sumatera Selatan	103.490	501.462	32.510	105.733	1.955.419
Bengkulu	41.197	67.706	12.249	755	475.726
Lampung	204.885	639.312	69.840	21.047	2.072.766
Kepulauan Bangka Belitung	70.647	131.566	4.373	1.035	355.310
Kepulauan Riau	8.886	92.255	14.422	8.253	518.881
DKI Jakarta	1.419.168	68.056	496	735	2.631.943
Jawa Barat	3.945.364	1.775.046	782.453	22.515	12.441.287
Jawa Tengah	1.628.833	2.424.205	810.032	65.302	9.100.116
D.I. Yogyakarta	110.030	541.489	33.790	38.412	1.110.412
Jawa Timur	2.741.749	2.479.158	893.058	58.030	10.676.470
Banten	1.277.224	175.316	46.337	11.859	2.792.850
Bali	292.147	88.363	199.649	36.127	1.118.749
Nusa Tenggara Barat	131.042	383.146	91.487	1.101	1.332.164
Nusa Tenggara Timur	26.759	160.946	207.871	32.903	1.088.577
Kalimantan Barat	51.115	54.866	55.331	429.788	1.129.137
Kalimantan Tengah	130.445	66.512	9.230	46.563	649.073
Kalimantan Selatan	124.305	102.383	8.957	19.887	1.090.869
Kalimantan Timur	80.811	64.594	14.999	32.384	868.363
Kalimantan Utara	12.164	3.550	5.397	48.511	137.604
Sulawesi Utara	103.338	121.203	82.394	8.279	614.771
Sulawesi Tengah	111.191	79.287	110.370	3.891	694.437
Sulawesi Selatan	379.700	308.409	128.055	28.424	1.861.110

Provinsi	BJP (Rumah Tangga)				Jumlah Rumah Tangga
	Sumur Bor/ Pompa	Sumur Terlindung	Mata Air Terlindung	Air Hujan	
Sulawesi Tenggara	68.217	143.347	70.532	9.461	574.156
Gorontalo	28.693	68.373	15.639	117	273.287
Sulawesi Barat	26.699	59.763	11.146	4.937	288.210
Maluku	29.815	63.359	44.639	5.431	349.848
Maluku Utara	5.146	50.667	9.606	8.789	244.145
Papua Barat	26.520	29.359	12.683	27.293	180.109
Papua	66.564	67.489	50.545	140.933	820.835
Indonesia	14.589.830	12.541.497	4.174.395	1.674.947	65.489.364

Sumber : Data Warehouse Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya.

B. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP)

B.1. Persampahan

Pengelolaan sampah telah diatur dalam **undang-undang No. 18 Tahun 2008**. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Jenis sampah yang dikelola yaitu, sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga merupakan sampah hasil kegiatan rumah tangga, tidak termasuk tinja. Sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan khusus, kawasan industri, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sedangkan sampah spesifik adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah dampak dari bencana, puing bongkahan bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, serta sampah yang timbul secara tidak periodik. Sampah-sampah tersebut harus dikelola dengan baik agar tercipta lingkungan hidup yang sehat, sekaligus memperoleh manfaat yang mungkin masih bisa diperoleh dari keberadaannya.

Tempat pemrosesan akhir (TPA) adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pemrosesan sampah didahului dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah/volume sampah. Selain itu, penyediaan TPA di kota-kota besar menghadapi kendala keterbatasan lahan. Oleh sebab itu, pengelolaan TPA secara regional menjadi lebih dibutuhkan.

Tabel 5.9
Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama TPA	Kapasitas sampah masuk (m ³ /hari)	Luas TPA (ha)	Cakupan Layanan (kk)
Aceh	Aceh Barat Daya	TPA Kab. Aceh Barat Daya	51.450	4,19	10.000
	Aceh Selatan	TPA Kab. Aceh Selatan	556.500	5,3	10.000
	Aceh Tamiang	TPA Kab. Aceh Tamiang	181.479	5,0	10.000
Sumatera Utara	Humbang Hasundutan	TPA Kab. Humbang Hasundutan	28.284	4	6.000
Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	TPA Kota Payakumbuh	9.125	15	10.000
Riau	Kuantan Singingi	TPA Sampah Sentajo	13.870	1	8.251
Jambi	Tanjung Jabung Barat	TPA Kab. Tanjung Jabung Barat	27.316	0,998	32.398
Sumatera Selatan	Ogan komering Ulu Timur	TPA Belitang	22.507	0,76	12.000
Bengkulu	Seluma	TPA Kab. Seluma	44.850	2,5	20.000
Lampung	Lampung Selatan	TPA Natar	57.900	3,8	30.000
Kepulauan Riau	Kota Batam	TPA Kota Batam	100.000	2,4	10.000
Jawa Barat	Indramayu	TPA Kertawinangun	191.990	4,2	20.000
Jawa Tengah	Jepara	TPA Bandengan	45.150	1,7	20.000
	Kota Semarang	TPA Jatibarang	61.250	2,12	20.000
D.I. Yogyakarta	Gunung Kidul	TPA Wukirsari	18.250	3	7.500
Nusa Tenggara Barat	Bima	TPA Waduani	41.975	5	42.617
	Lombok Utara	TPA Jugil	40.150	5	4.200
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	TPA Warloka	31.853	0,95	5.030
	Sumba Barat	TPA Lapale	972	5	34.872
Kalimantan Barat	Melawi	TPA Nanga Pinoh	5.840	0,9	15.700
Kalimantan Selatan	Tabalong	TPA Bongkang	54.750	6	10.200
Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	TPA Buluminung	11.656	2	38.558
Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	TPA Talaud	90.000	5	3.592
Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	TPA Taraweang	60.000	5	40.000
Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	TPA Potoro	304.232	5	22.600

Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama TPA	Kapasitas sampah masuk (m ³ /hari)	Luas TPA (ha)	Cakupan Layanan (kk)
Sulawesi Barat	Mamasa	TPA Malabo	35,48	0,25	32.651
Maluku	Maluku Tenggara	TPA Isso	913	0,04	200
Maluku Utara	Halmahera Utara	TPA Tobelo Marahai	43.820	5,982	7.388
	Kota Tidore Kepulauan	TPA Kaiyasa	30.084	3	6.902
Indonesia			2.126.201	105,09	490.659

Sumber : Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

B.2. Pengelolaan Air Limbah

Lingkungan layak huni adalah lingkungan yang sehat. Kondisi lingkungan yang sehat dapat berdampak besar pada aspek kehidupan lainnya. Permasalahan kesehatan lingkungan yang sering muncul di antaranya berkaitan dengan pembuangan limbah. Limbah yang dibuang ke lingkungan harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu, baik limbah air, udara, maupun tanah. Limbah yang tidak melalui proses pengolahan akan merusak sumber air baik air permukaan maupun air tanah, menimbulkan bau tidak sedap, dan dapat merusak tanah.

Untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat maka pemerintah membangun sarana dan prasarana pengolahan limbah. Sistem pengelolaan limbah dilakukan dengan 2 cara yaitu sistem setempat/kawasan (*on site*) dan sistem terpusat (*off site*). Kota-kota besar pada umumnya menggunakan IPAL terpusat, yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya pencemaran oleh air limbah rumah tangga. Kendala dalam pengembangan IPAL terpusat adalah biaya investasi yang besar, maka dikembangkan pula IPAL kawasan yang dapat melayani daerah perkotaan maupun desa dengan sistem komunal.

Tabel 5.10
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama IPAL	Cakupan Layanan (jiwa)	Cakupan Layanan (kk)
Sumatera Utara	Kota Medan	Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Kota Medan Zona 12	100.000	20.000
Sumatera Utara	Kota Medan	Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Kota Medan Zona 10 dan 11	100.000	20.000

Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama IPAL	Cakupan Layanan (jiwa)	Cakupan Layanan (kk)
Riau	Kota Pekanbaru	Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Kota Pekanbaru Zona 1	18.500	3.700
Riau	Kota Pekanbaru	Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Kota Pekanbaru Zona 2	18.500	3.700
Kepulauan Bangka Belitung	Belitung	Sanitasi KSPN Tanjung Kelayang	10.000	2.000
DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	Sanitasi KSPN Kepulauan Seribu	3.000	600
DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	Sanitasi Kawasan Istana Kepresidenan Jakarta	1.500	300
DKI Jakarta	Kota Jakarta Utara	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Semper Barat	10.500	2.100
Jawa Barat	Kota Depok	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Cimanggis	16.755	3.351
Jawa Barat	Tasikmalaya	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Pondok Pesantren Cipasung	2.000	400
D.I. Yogyakarta	Bantul	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Sewon	75.000	15.000
D.I. Yogyakarta	Sleman	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Berbah	5.000	1.000
Banten	Pandeglang	Sanitasi KSPN Tanjung Lesung	10.000	2.000
Bali	Kota Denpasar	Jaringan Perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Sesetan dan Sekitarnya	5.500	1100
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Gili Trawangan	525	105

Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama IPAL	Cakupan Layanan (jiwa)	Cakupan Layanan (kk)
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Tambolaka	750	150
Kalimantan Tengah	Sukamara	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Sukamara	1.000	200
Sulawesi Tenggara	Wakatobi	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Tomia	1.000	200
Maluku	Seram Bagian Barat	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Desa Neniari	690	138
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Kabupaten Kepulauan Sula	1.500	300
Papua Barat	Teluk Wondama	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman Berbasis Institusi Kabupaten Teluk Wondama	10.000	2000
Indonesia			391.720	78.344

Sumber : Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Penyediaan sanitasi yang layak bagi masyarakat merupakan suatu upaya menciptakan lingkungan yang sehat. Sarana dan prasarana pengelolaan lumpur tinja merupakan salah satu yang terpenting dalam penyediaan sanitasi yang sehat. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki tangki septik yang memenuhi syarat, yaitu kedap air. Tangki septik yang dimiliki masyarakat saat ini perlu dilakukan pemeliharaan/penyedotan dalam 2-3 tahun, apabila tidak maka dapat mencemari air tanah.

Tabel 5.11
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama IPLT	Cakupan Layanan (kk)
Aceh	Aceh Jaya	IPLT Kab. Aceh Jaya	1.000
	Aceh Timur	IPLT Kab. Aceh Timur	1.000
Sumatera Utara	Dairi	IPLT Kab. Dairi	1.500
	Serdang Bedagai	IPLT Kab. Serdang Bedagai	1.500
Sumatera Barat	Agam	IPLT Kab. Agam	30.000
Jambi	Tebo	IPLT Kab. Tebo	10.000
Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	IPLT Kota Prabumulih	800
	Ogan Ilir	IPLT Kab. Ogan Ilir	800
Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	IPLT Kab. Bangka	3.500
	Bangka Barat	IPLT Kab. Bangka Barat	3.500
	Belitung Timur	IPLT Kab. Belitung Timur	3.500
Jawa Barat	Kota Bandung	IPLT Kompak Kota Bandung	50.000
	Bogor	IPLT Cibinong	20.000
Jawa Tengah	Pekalongan	IPLT Kab. Pekalongan	13.418
	Temanggung	IPLT Kab. Temanggung	12.716
Jawa Timur	Kota Malang	IPLT Kota Malang	30.000
	Kota Probolinggo	IPLT Kota Probolinggo	15.000
	Ngawi	IPLT Kab. Ngawi	15.000
Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	IPLT Kota Bima	14.750
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	IPLT Waingapu	10.000
Kalimantan Barat	Sambas	IPLT Kab. Sambas	1.190
Kalimantan Tengah	Gunung Mas	IPLT Kab. Gunung Mas	5.000
	Kota Palangka Raya	IPLT Kota Palangka Raya	10.300
Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	IPLT Kab. Hulu Sungai Tengah	9.800
	Hulu Sungai Utara	IPLT Kab. Hulu Sungai Utara	10.000
	Tapin	IPLT Kab. Tapin	10.000
Kalimantan Timur	Kutai Barat	IPLT Kota Sendawar	8.435
Kalimantan Utara	Tana Tidung	IPLT Kab. Tana Tidung	1.700
Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	IPLT Kab. Kepulauan Talaud	10.000
	Kota Tomohon	IPLT Kota Tomohon	26.561
	Minahasa	IPLT Kab. Minahasa	7.138

Provinsi	Kabupaten/Kota	Nama IPLT	Cakupan Layanan (kk)
Sulawesi Tengah	Tojo Una-una	IPLT Kab. Tojo Una-una	4.200
Sulawesi Tenggara	Kolaka	IPLT Kab. Kolaka	2.100
	Kolaka Utara	IPLT Kab. Kolaka Utara	2.000
	Kota Kendari	IPLT Kota Kendari	2.000
Sulawesi Barat	Majene	IPLT Kab. Majene	800
Maluku	Kota Tual	IPLT Kota Tual	1.000
	Maluku Tengah	IPLT Kab. Maluku Tengah	1.000
Indonesia			351.208

Sumber : Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

C. Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP)

Sesuai dengan agenda Nawacita yang diusung oleh Pemerintah, terdapat 2 poin yang berkaitan dengan pengembangan permukiman. Yang pertama yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dan yang kedua adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Agenda tersebut diwujudkan melalui penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung pengembangan ekonomi di kawasan pinggiran dan perdesaan, membangun perumahan dan kawasan permukiman dengan fokus pada permukiman kumuh, pelayanan air minum, pelayanan sanitasi, keselamatan bangunan dan gedung, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur.

Permukiman layak huni didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal sekaligus tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, digunakan tiga strategi pendekatan, yaitu membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang, memberikan fasilitas kepada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sebagai nakhkoda pembangunan dan pengembangan permukiman di daerah, serta memberdayakan komunitas dan para pemangku kepentingan.

Pembangunan infrastruktur permukiman pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan strategis, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, dengan tujuan meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan, dengan tujuan mengurangi luasan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman.

C.1. Kawasan Permukiman Perkotaan

Terdapat 2 strategi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman perkotaan. Yang pertama ditujukan untuk pembangunan perkotaan, dijalankan dengan melakukan pengembangan kawasan perkotaan yang menunjang pengembangan perkotaan yang sudah ada maupun pembangunan kawasan permukiman baru dalam rangka membentuk struktur ruang, serta pelayanan infrastruktur permukiman perkotaan yang memenuhi standar pelayanan baik kualitas maupun kuantitas. Yang kedua ditujukan bagi pembangunan kawasan permukiman, dilakukan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk mencegah tumbuh dan berkembang permukiman kumuh baru dan meningkatkan kualitas permukiman.

Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman sehingga menyebabkan rendahnya kualitas permukiman dan kehidupan penghuninya. Kawasan kumuh muncul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang salah satunya dipicu oleh laju urbanisasi. Pertumbuhan penduduk ini tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak sehingga memicu tumbuhnya jumlah penduduk yang tinggal di daerah kumuh. Selain itu, penanganan kawasan kumuh memerlukan koordinasi lintas sektor dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan SK Bupati/Wali kota tentang permukiman kumuh sebagai acuan dalam memadukan upaya penanganan permukiman kumuh.

Terdapat 7 kriteria dalam lingkup keciptakarya yang menjadi indikator permukiman dikatakan kumuh atau tidak, yaitu pemenuhan pelayanan air bersih perpipaan, pelayanan pengolahan air kotor, drainase dan pengendalian banjir, pemadam kebakaran, ruang terbuka hijau, pengelolaan persampahan, dan penanggulangan bencana. Kriteria tersebut bersama dengan beberapa kriteria dari aspek lainnya menjadi bagian dari kriteria kota layak huni.

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011** tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta **Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/PRT/M/2016** tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dijelaskan mengenai pencegahan, peningkatan kualitas dan pengelolaan permukiman kumuh. Pencegahan dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, yang terdiri atas pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan kesesuaian perizinan, standar teknis, dan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kualitas kawasan kumuh didahului dengan penetapan lokasi kumuh dan dilakukan melalui pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Kemudian pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan oleh masyarakat secara swadaya atau difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Berikut ini adalah kota-kota yang menjadi prioritas untuk mendapat penanganan permukiman kumuh perkotaan dari Kementerian PUPR.

Tabel 5.12
Data Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

Provinsi	Luas Kawasan (ha)
Aceh	1.469,94
Sumatera Utara	1.661,79
Sumatera Barat	404,55
Riau	823,39
Jambi	1.258,20
Sumatera Selatan	2.624,65
Bengkulu	536,46
Lampung	1.833,70
Kepulauan Bangka Belitung	482,97
Kepulauan Riau	816,13
DKI Jakarta	1.024,52
Jawa Barat	3.485,64
Jawa Tengah	4.183,86
DI. Yogyakarta	406,04
Jawa Timur	1.879,50
Banten	1.186,80
Bali	484,72
Nusa Tenggara Barat	1.013,36
Nusa Tenggara Timur	691,11
Kalimantan Barat	255,69
Kalimantan Tengah	983,08
Kalimantan Selatan	1.653,62
Kalimantan Timur	1.089,73
Kalimantan Utara	317,13
Sulawesi Utara	574,83
Sulawesi Tengah	976,39
Sulawesi Selatan	2.154,61
Sulawesi Tenggara	1.291,29
Gorontalo	258,88
Sulawesi Barat	224,77
Maluku	108,45
Indonesia	36.155,79

Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

C.2. Kawasan Permukiman Perdesaan

Beberapa isu strategis dan yang menjadi tantangan pembangunan kawasan permukiman perdesaan adalah adanya kesenjangan antar wilayah, baik kesenjangan pertumbuhan ekonomi maupun persebaran penduduk; belum seimbangny pembangunan perdesaan dan perkotaan; tingginya angka kemiskinan dan pengangguran; kurang optimalnya pengelolaan potensi sumber daya, serta minimnya kualitas pelayanan infrastruktur di kawasan permukiman perdesaan.

Kawasan perdesaan memiliki beragam potensi seperti potensi sumber daya alam (pertanian dan perkebunan, perikanan, dan pariwisata), sumber daya manusia (budaya, kearifan lokal, dan kewirausahaan) yang apabila dikelola secara optimal akan mampu meningkatkan kualitas kawasan permukiman perdesaan sekaligus mensejahterakan masyarakatnya. Oleh sebab itu, penanganan kawasan perdesaan dilakukan dengan konsep pengembangan kawasan strategis kabupaten (KSK). Pengembangan KSK dilakukan untuk memperkuat ekonomi setempat, di antaranya melalui pengembangan komoditas unggulan, pemberdayaan pelaku usaha masyarakat, penyediaan permodalan pengembangan komoditas unggulan dan usaha lokal, dan penguatan kelembagaan pengelola KSK. Selain itu, dalam pengembangan KSK juga dilakukan penyediaan infrastruktur dasar wilayah seperti pendidikan, kesehatan, energi, air bersih dan sanitasi, transportasi, dan pelayanan publik. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka peluang penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di perdesaan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan dan pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah.

C.3. Kawasan Permukiman Khusus

Penyelenggaraan permukiman khusus pada dasarnya merupakan bagian dari penyelenggaraan permukiman perkotaan dan perdesaan, namun memiliki karakter khusus, seperti kawasan perbatasan, kawasan pulau-pulau kecil terluar, kawasan rawan bencana, kawasan pasca bencana, dan kawasan permukiman tertentu yang ditetapkan melalui undang-undang.

Kawasan Permukiman Perbatasan

Kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah NKRI yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, kawasan perbatasan juga menjadi wajah terdepan dan representasi bangsa sekaligus pintu gerbang keluar dan masuknya manusia dan barang.

Pengembangan kawasan perbatasan dilakukan dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan pengembangan infrastruktur pendukung di sekitarnya. PLBN Terpadu merupakan pos pemeriksaan orang dan barang keluar masuk batas wilayah negara. Fungsi yang dijalankan oleh PLBN antara lain keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, serta fungsi-fungsi lain yang diperlukan. Infrastruktur yang terdapat di PLBN meliputi gedung PLBN, bangunan pemeriksaan terpadu, bangunan *check point*, koridor pejalan kaki, klinik, wisma Indonesia, tempat ibadah, mess karyawan, dan lain-lain. Sementara pengembangan infrastruktur pendukung di wilayah perbatasan meliputi penyediaan jaringan transportasi, air minum, drainase,

pengolahan limbah, serta persampahan. Dengan adanya pembangunan ini diharapkan adanya pengikatan ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sumber daya manusia di wilayah perbatasan; tercipta kelembagaan lintas batas negara yang terpadu; serta peningkatan kerja sama dengan negara tetangga. Pembangunan itu berdasarkan **Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019** tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Selain pembangunan PLBN, dilakukan pula pengembangan infrastruktur permukiman (PIP) di 9 kawasan, yaitu Entikong, Nanga Badau, Aruk, Mota'ain, Motamasin, Wini, Skouw, Sebatik Tengah, dan Long Aprari.

Tabel 5.13
Pos Lintas Batas Negara

Nama PLBN	Kabupaten/Kota	Provinsi
Serasan	Natuna	Kepulauan Riau
Jagoi Babang	Bengkayang	Kalimantan Barat
Sei Kelik	Sintang	Kalimantan Barat
Long Nawang	Malinau	Kalimantan Utara
Long Midang/Krayan	Nunukan	Kalimantan Utara
Sei Pancang Sebatik	Nunukan	Kalimantan Utara
Labang	Nunukan	Kalimantan Utara
Oepoli	Kupang	Nusa Tenggara Timur
Napan	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
Yetetkun	Boven Digoel	Papua
Sota	Merauke	Papua

Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Tabel 5.14
Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kawasan Perbatasan

Kawasan	Kabupaten/Kota	Provinsi
Entikong	Sanggau	Kalimantan Barat
Nanga Badau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat
Aruk	Sambas	Kalimantan Barat
Mota'ain	Belu	Nusa Tenggara Timur
Motamasin	Malaka	Nusa Tenggara Timur
Wini	Timor Tengah Utara	Nusa Tenggara Timur
Skouw	Jayapura	Papua
Sebatik Tengah	Nunukan	Kalimantan Utara
Long Apari	Mahakam Hulu	Kalimantan Timur

Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kawasan Permukiman Pulau-Pulau Kecil Terluar

Pulau-pulau kecil terluar merupakan pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Dalam **Undang-Undang No. 27 Tahun 2007** tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dijelaskan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atas sama dengan **2.000 km²** beserta dengan kesatuan ekosistemnya.

Dalam **Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2017** tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar terdapat **111 pulau** sebagai pulau-pulau kecil terluar yang menjadi pagar terdepan Indonesia. Pulau-pulau tersebut ada yang dihuni oleh penduduk dan ada yang tidak.

Pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai strategis nasional untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan. Selain itu, pengembangan kawasan permukiman dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Kawasan Permukiman Rawan dan Pasca Bencana

Dalam **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007** tentang Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.

Indonesia merupakan negeri yang rawan bencana alam karena berada di jalur gunung berapi teraktif di dunia, yaitu Cincin Api Pasifik. Selain itu, wilayah Indonesia terdiri atas tiga tumpukan lempeng benua yang aktif, yaitu lempeng Austronesia, Asia, dan Pasifik. Oleh sebab itu perkembangan permukiman di Indonesia tidak dapat lepas dari mempertimbangkan kondisi yang tidak dapat dihindari tersebut. Meskipun demikian, dengan berbagai penanganan diharapkan dapat meminimalkan jumlah kerugian yang mungkin timbul bencana.

Strategi yang dapat dilakukan untuk penanganan risiko pada daerah rawan bencana adalah:

- Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah
- Penyediaan kajian dan peta risiko untuk perencanaan pembangunan
- Penyusunan RPJMD dan RTRWP/K yang sensitif terhadap risiko bencana
- Penyediaan dan operasionalisasi sistem peringatan dini
- Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan terhadap bencana
- Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Sementara apabila sudah terjadi bencana, maka yang dapat dilakukan adalah penanganan pasca bencana, yaitu melalui :

- Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah
- Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan terhadap bencana
- Perkuatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana dan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat
- Partisipasi dan peran serta multi pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Masyarakat dan pemerintah harus memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan agar dapat melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana, baik dengan memperkecil ancaman kawasan, mengurangi kerentanan, serta meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mendukung pelaksanaan proyek strategis percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dukungan penanganan permukiman di kawasan strategis pariwisata dilakukan untuk pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang aman, nyaman, menarik, mudah dijangkau, berwawasan lingkungan, serta dapat meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan juga masyarakat. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata diarahkan untuk pengembangan perintisan DPN, peningkatan kualitas dan daya saing, serta pengendalian bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung. Penyediaan prasarana umum yang menjadi bagian dari tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya di DPN meliputi jaringan air bersih dan sistem pengelolaan limbah. Sementara prasarana umum yang menjadi tugas instansi lain meliputi jaringan listrik dan lampu penerangan serta jaringan telekomunikasi.

Berikut ini merupakan 10 KSPN yang menjadi prioritas untuk ditangani dimulai dari perencanaan di tahun 2016 hingga pelaksanaan fisik di tahun 2017-2018.

Tabel 5.15
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas

Kawasan	Provinsi
Danau Toba	Sumatera Utara
Tanjung Kelayang	Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Seribu	DKI Jakarta
Tanjung Lesung	Banten
Borobudur	Jawa Tengah

Kawasan	Provinsi
Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur
Mandalika	Nusa Tenggara Barat
Labuan Bajo	Nusa Tenggara Timur
Wakatobi	Sulawesi Tenggara
Morotai	Maluku Utara

Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kawasan Permukiman Nelayan/Tepi Air

Penataan kampung nelayan merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden RI pada pertengahan tahun 2015. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia.

Telah teridentifikasi 11 kawasan permukiman nelayan/tepi air yang berpotensi sebagai percontohan. sebelas kawasan tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Kawasan percontohan ini diharapkan dapat menghasilkan strategi inovatif untuk dikembangkan sebagai acuan pengembangan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan. Berikut ini 11 kawasan tersebut :

Tabel 5.16
Kawasan Permukiman Nelayan/Tepi Air Percontohan

Kawasan	Kabupaten/Kota
Kampung Sumber Jaya	Kota Bengkulu
Kampung Nelayan Tegalsari	Kota Tegal
Kampung Beting	Kota Pontianak
Kampung Kuin	Kota Banjarmasin
Kampung Hamadi	Kota Jayapura
Kampung Nelayan Oesapa	Kota Kupang
Kampung Nelayan Untia	Kota Makasar
Kampung Nelayan Indah	Kota Medan
Kampung Tambak Lorok	Kota Semarang
Kampung Moro Demak	Kabupaten Demak
Kampung Karangsong	Kabupaten Indramayu

Sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya

D. Bina Penataan Bangunan (BPB)

D.1. Pengembangan Kota Hijau

Kota hijau merupakan kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya, seperti air dan energi secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menjadi strategi perencanaan pembangunan untuk menjamin daya dukung lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas mengamankan **30%** dari wilayah kota berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang terdiri dari **20%** RTH publik dan **10%** RTH privat. Pengalokasian **30%** RTH ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW Kota dan RTRW Kabupaten.

Sejak tahun 2011, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang menginisiasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sebagai bentuk implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota/Kabupaten. Untuk mewujudkan kota hijau melalui P2KH, diterapkan sub-sistem lingkungan yang diistilahkan dengan 8 (delapan) atribut Kota Hijau, yaitu :

1. perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan
2. ketersediaan ruang terbuka hijau
3. peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau
4. pengelolaan sampah ramah lingkungan
5. pengelolaan air yang efektif
6. penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan
7. konsumsi energi yang efisien
8. bangunan hijau.

P2KH menjadi bentuk tanggung jawab yang Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten untuk mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan yang baik dan perwujudan delapan atribut kota hijau sesuai amanat **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang dan sebagai upaya untuk menjawab tantangan perubahan iklim.

Tabel 5.17
Data Ruang Terbuka Hijau Tahun 2018

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Nama RTH	Luas Kawasan
Sumatera Utara	Karo	Pembangunan RTH Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara	25.000 m ²
Jambi	Muara Tebo	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kab. Tebo Kecamatan Tebo Tengah Provinsi Jambi	1 Kawasan
Sumatera Selatan	Prabumulih	Pembangunan RTH Kota Prabumulih	10.000 m ²
Bengkulu	Lebong	Penataan RTH Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu	13.500 m ²
Jawa Barat	Tasikmalaya	Pembangunan RTH Kota Tasikmalaya	5.000 m ²
Jawa Tengah	Magelang	Penataan RTH Kws. Jembatan Gantung Mangunsuko Kab. Magelang	1 Kawasan
Jawa Timur	Blitar	Penataan Kawasan RTH Kanigoro Kabupaten Blitar	7.200 m ²
	Surabaya	Pembangunan RTH Kawasan Sukolilo Kota Surabaya	100.000 m ²
	Pasuruan	Penataan RTH Umbulan Kabupaten Pasuruan	1 Kawasan
Kalimantan Tengah	Palangkaraya	Penataan RTH Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya	22.737 m ²
Kalimantan Timur	Samarinda	Pembangunan RTH Kota Samarinda	10.390 m ²
Sulawesi Tengah	Poso	Pembangunan RTH Ex. Pasar Central Gebangrejo (Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah)	29.200 m ²
	Palu	Pembangunan RTH Kawasan Hutan Kota Palu (Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah)	21.900 m ²
Sulawesi Selatan	Makassar	Penataan RTH Pelataran Gedung Wisma Negara Kws. Center Point Of Indonesia Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan	10.559 m ²
Papua Barat	Sorong	Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota Sorong	1 Kawasan

Sumber : Direktorat Bina Penataan Bangunan, Subdit Perencanaan Teknis - Cipta Karya

D.2. Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka

Aset pusaka merupakan rekam jejak sejarah bangsa Indonesia, dari era kerajaan nusantara hingga setelah memperoleh kemerdekaan bangsa. Aset-aset tersebut memiliki nilai kearifan lokal yang otentik dan amat penting keberadaannya. Oleh sebab itu, negara bertanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Kota Pusaka adalah kota yang di dalamnya terdapat kawasan cagar budaya dan atau bangunan cagar budaya yang memiliki nilai-nilai penting bagi kota, menempatkan penerapan kegiatan penataan dan pelestarian aset pusaka sebagai strategi utama pengembangan kotanya.

Dalam **Undang-Undang No. 11 Tahun 2010** tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Sejalan dengan peraturan tersebut, **Undang-Undang No. 28 Tahun 2002** tentang Bangunan Gedung sudah lebih dulu menyatakan bahwa bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan. Dan dalam **Undang-Undang No. 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang menyiratkan pentingnya memperhatikan nilai budaya dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Tabel 5.18
Data Penataan Kawasan Kota Pusaka

Provinsi	Kabupaten/Kota	Tujuan
Jambi	Sungai Penuh	Meningkatkan Fasilitas dan sarana Ditempat Kawasan Kota Pusaka dan terjaganya kelestarian kawasan pusaka yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal budaya daerah
Bengkulu	Bengkulu	Sebagai wadah untuk melestarikan budaya / kearifan lokal di Kws. Tanjung Agung
Gorontalo	Gorontalo	Manfaat Teras adalah sarana interaksi sosial untuk masyarakat , dalam hal ini sebagai ruang bermain anak-anak, tempat swafoto, rekreasi keluarga, olahraga, dan juga kegiatan acara outdoor. Manfaat Souvenir: untuk menyediakan tempat penjualan souvenir di area kawasan otanaha.
Riau	Siak	Benda Cagar Budaya” Sebagai Peninggalan Sejarah/Arkeologi Untuk kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan .
Jawa Tengah	Surakarta	Sebagai dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap Pengembangan Kawasan Pusaka (bangunan cagar budaya) keraton Mangkunegaran Kota Surakarta dan penataan ini juga dilakukan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana wisata sehingga dapat menambah kenyamanan pengunjung.
Jawa Timur	Sumenep	Sebagai sarana edukasi, tempat bermain dan wisata.
Maluku Utara	Malut	Menambah luasan RTH seluas 2.000 M2, dan dapat menambah kunjungan wisatawan sekitar 500 Jiwa.

Sumber : Direktorat Bina Penataan Bangunan, Subdit Perencanaan Teknis - Cipta Karya



BAB VI

INFORMASI STATISTIK
PEKERJAAN UMUM &
PERUMAHAN RAKYAT
2019

**STATISTIK
INFRASTRUKTUR
PERUMAHAN**



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

Rumah (papan) merupakan kebutuhan primer manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam **Undang-undang No. 11 Tahun 2011** tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Dalam UU tersebut dijelaskan pula, penyelenggaraan perumahan dan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni maka pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR selaku penanggung jawab penyelenggaraan perumahan meluncurkan beberapa program bantuan pembangunan sarana dan prasarana perumahan. Program-program yang tersebut antara lain pembangunan rumah susun, rumah khusus, bantuan pembangunan fasilitas pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), bantuan pembiayaan perumahan, dan bantuan stimulus rumah swadaya (peningkatan kualitas dan pembangunan baru).

A. Rumah Susun (Rusun)

Untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan perumahan dan permukiman yang dapat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan atau untuk memenuhi tuntutan atau pemenuhan pola hidup modern berupa bangunan pasar modern dan permukiman modern, pemerintah selalu dihadapkan pada permasalahan keterbatasan luas tanah yang tersedia untuk pembangunan terutama di daerah perkotaan yang berpenduduk padat. Pembangunan Rumah Susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan permukiman terutama di daerah perkotaan yang jumlah penduduknya terus meningkat, karena pembangunan Rumah Susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat ruang-ruang terbuka kota yang lebih lega.

Menurut ketentuan umum **Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011** tentang Rumah Susun yang dimaksud dengan Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

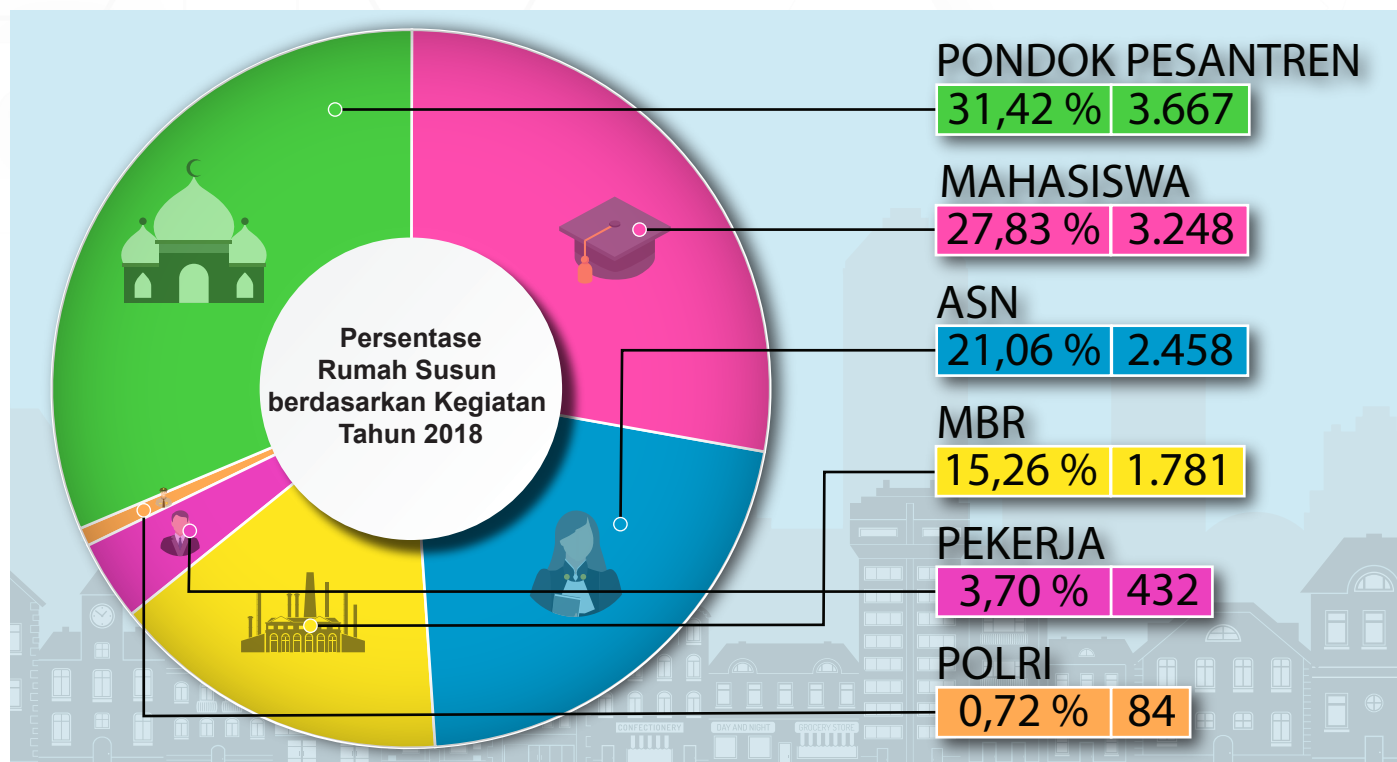
Sebagaimana yang telah diatur dalam **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011** tentang Rumah Susun, penyelenggaraan rumah susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan pembiayaan, serta peran masyarakat yang diselenggarakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Berdasarkan jenisnya rumah susun terbagi menjadi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara dan rumah susun komersial. Pembinaan penyelenggaraan rumah susun menjadi tanggung jawab pemerintah. Pada **Tabel 6.1** menunjukkan jumlah rumah susun sejak tahun 2016-2018 yang dijabarkan menurut provinsi.

Tabel 6.1
Jumlah Rumah Susun Menurut Provinsi Tahun 2016-2018

Provinsi	Tahun (unit)			Jumlah
	2016	2017	2018	
Aceh	151	100	380	631
Sumatera Utara	332	30	331	693
Sumatera Barat	297	367	580	1244
Riau	103	256	145	504
Jambi	30	140	187	357
Sumatera Selatan	414	97	317	828
Bengkulu	90	0	66	156
Lampung	432	274	382	1.088
Kepulauan Bangka Belitung	0	0	84	84
Kepulauan Riau	0	264	153	417
DKI Jakarta	231	7509	0	7740
Jawa Barat	774	570	1153	2497
Jawa Tengah	1252	341	1580	3.173
D.I. Yogyakarta	250	280	473	1.003
Jawa Timur	796	717	1613	3126
Banten	164	170	348	682
Bali	125	47	42	214
Nusa Tenggara Barat	196	128	321	645
Nusa Tenggara Timur	47	104	272	423
Kalimantan Barat	117	387	161	665
Kalimantan Tengah	47	54	147	248
Kalimantan Selatan	77	100	331	508
Kalimantan Timur	0	230	127	357
Kalimantan Utara	70	0	77	147
Sulawesi Utara	82	90	308	480
Sulawesi Tengah	157	180	222	559
Sulawesi Selatan	579	241	598	1.418
Sulawesi Tenggara	161	114	237	512
Gorontalo	91	160	176	427
Sulawesi Barat	275	0	105	380
Maluku	91	0	277	368
Maluku Utara	227	227	126	580
Papua	0	0	161	161
Papua Barat	82	74	190	346
Indonesia	7.740	13.251	11.670	32.661

Sumber: Aplikasi Penyediaan Perumahan Dalam Angka

Gambar 6.1 menunjukkan persentase tiga terbesar pembangunan rumah susun berdasarkan kegiatan pada tahun 2018. Sebanyak **31,42 %** merupakan pembangunan rumah susun yang diperuntukkan bagi pondok pesantren, **27,83 %** diperuntukkan bagi Mahasiswa dan **21,06 %** diperuntukkan bagi ASN. **Tabel 6.2** menyajikan jumlah rumah susun pada tahun 2018 berdasarkan kegiatan.



Gambar 6.1
Persentase Rumah Susun berdasarkan Kegiatan Tahun 2018

Tabel 6.2
Jumlah Rumah Susun berdasarkan Kegiatan Tahun 2018 (Semester 2)

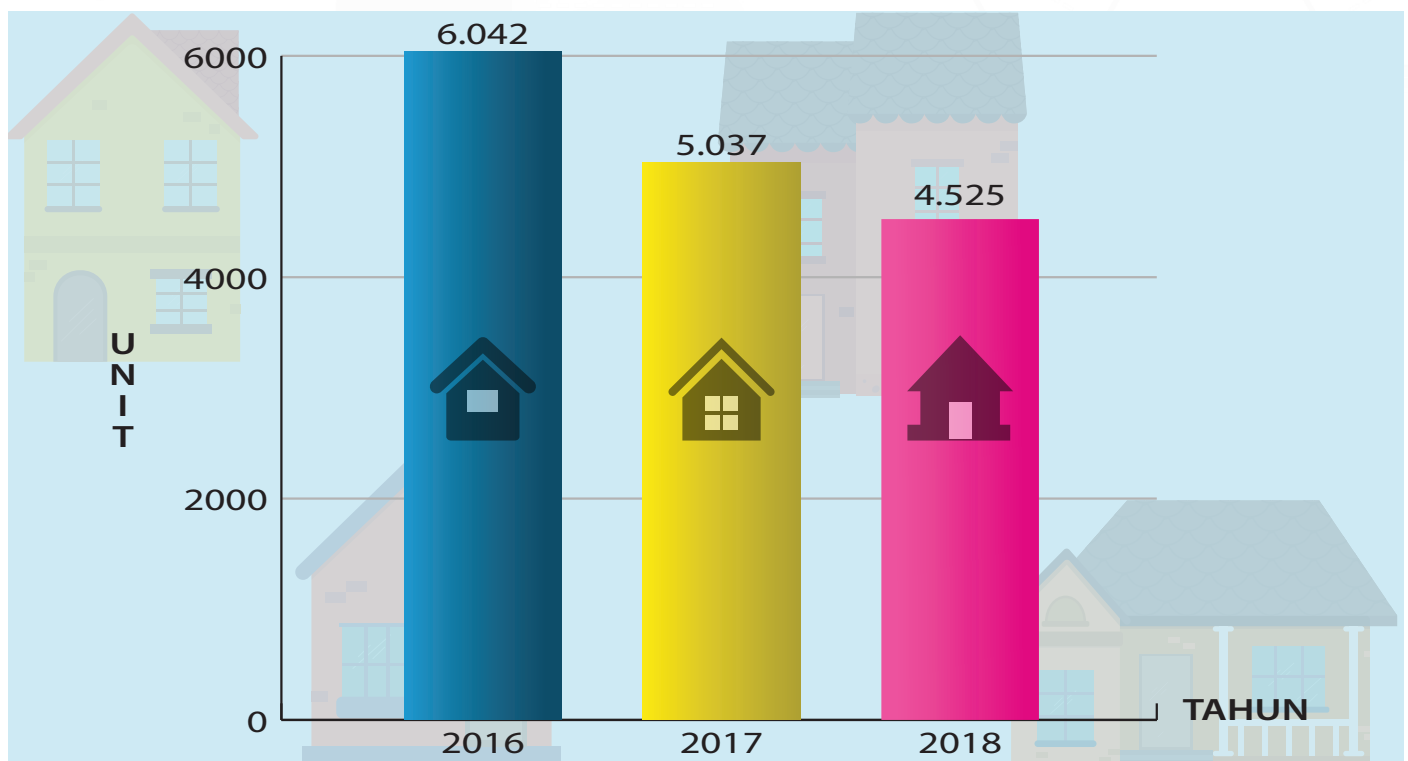
Kegiatan	Jumlah
ASN	2.458
Mahasiswa	3.248
MBR	1.781
Pekerja	432
Pondok Pesantren	3.667
Polri	84
Jumlah	11.670

Sumber: LAKIP Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2018

B. Rumah Khusus

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa, rumah khusus merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah peruntukan pembangunan rumah tersebut, seperti rumah untuk korban bencana, masyarakat di daerah terpencil, masyarakat di daerah perbatasan, tokoh, Polri, TNI, dan lainnya.

Gambar 6.2 menyajikan data jumlah rumah khusus dari tahun 2016-2018. Jumlah pembangunan rumah khusus menurun setiap tahunnya, seiring terpenuhinya kebutuhan rumah masyarakat. Dalam 3 tahun terakhir rumah khusus yang telah terbangun sebanyak **15.604 unit**. Jumlah rumah khusus menurut provinsi pada 3 tahun terakhir dapat dilihat **Tabel 6.3**



Gambar 6.2
Jumlah Rumah Khusus Tahun 2016-2018

Tabel 6.3
Jumlah Rumah Khusus menurut Provinsi Tahun 2016-2018

Provinsi	Tahun (unit)			Jumlah
	2016	2017	2018	
Aceh	52	342	100	494
Sumatera Utara	35	175	174	384
Sumatera Barat	401	331	365	1097
Riau	21	100	53	174
Jambi	13	150	130	293
Sumatera Selatan	29	100	50	179
Bengkulu	70	71	190	331
Lampung	137	100	100	337
Kepulauan Bangka Belitung	118	0	50	168
Kepulauan Riau	89	95	50	234
DKI Jakarta	16	0	0	16
Jawa Barat	140	200	87	427
Jawa Tengah	85	50	128	263
D.I. Yogyakarta	16	50	0	66
Jawa Timur	43	153	100	296
Banten	61	0	0	61
Bali	12	0	0	12
Nusa Tenggara Barat	208	205	271	684
Nusa Tenggara Timur	363	0	69	432
Kalimantan Barat	163	40	57	260
Kalimantan Tengah	13	0	100	113
Kalimantan Selatan	30	101	50	181
Kalimantan Timur	56	50	50	156
Kalimantan Utara	233	151	50	434
Sulawesi Utara	63	250	152	465
Sulawesi Tengah	119	208	210	537
Sulawesi Selatan	186	418	170	774
Sulawesi Tenggara	230	274	296	800
Gorontalo	281	130	150	561
Sulawesi Barat	215	100	160	475
Maluku	267	150	50	467
Maluku Utara	294	302	200	796
Papua	1.173	350	554	2.077
Papua Barat	810	391	359	1.560
Total	6.042	5.037	4.525	15.604

Sumber: Aplikasi Penyediaan Perumahan Dalam Angka

Tabel 6.4
Jumlah Rumah Khusus Menurut Kegiatan Tahun 2018 (Semester 2)

Kegiatan	Jumlah
Korban Bencana	190
Daerah tertinggal	1.126
MBR	545
Nelayan	1.951
Perbatasan	308
Petugas	405
Jumlah	4.525

Sumber: LAKIP Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2018

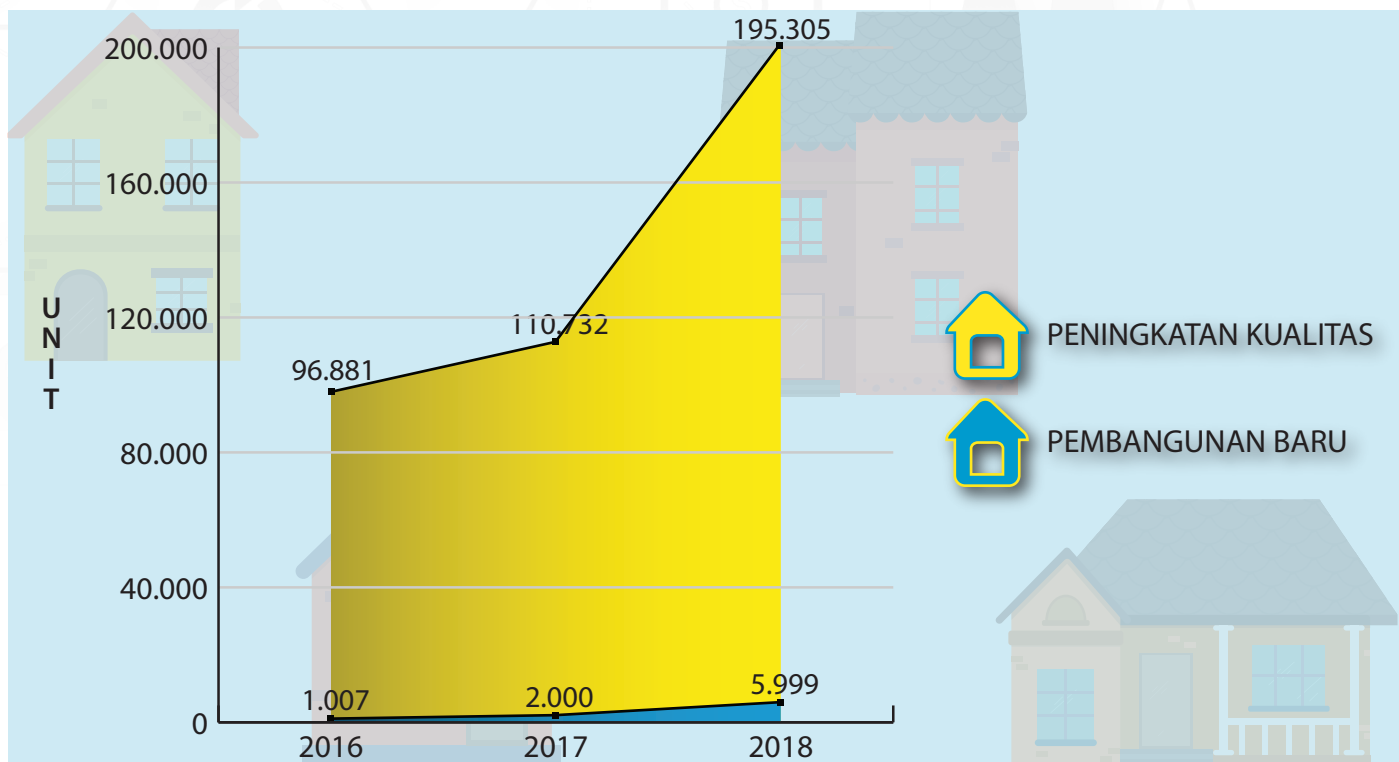
C. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Kegiatan pembangunan rumah secara swadaya sering kali belum memenuhi kualitas rumah layak huni seperti sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai. BSPS diberikan pada masyarakat berpenghasilan rendah. Sasaran BSPS adalah rumah tidak layak huni yang merupakan tanah milik sendiri, bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat atau terkena konsolidasi tanah, relokasi dalam rangka peningkatan perumahan dan permukiman kumuh, rumah yang terkena bencana, kerusakan sosial atau kebakaran. Kategori rumah tidak layak huni yang menjadi target kegiatan BSPS adalah sebagai berikut:

1. Bahan lantai berupa tanah atau kayu kelas IV,
2. Bahan dinding berupa bambu/kayu/rotan atau kayu kelas IV,
3. Tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan,
4. Bahan atap berupa daun atau genteng plentong yang sudah rapuh,
5. Rusak berat dan atau rusak sedang dan luas lantai bangunan tidak mencukupi.

Bentuk bantuan program BSPS dapat berupa uang atau barang. Uang yang didapat digunakan untuk membeli bahan bangunan. Namun apabila penerima bantuan tidak memiliki kemampuan (lanjut usia, dan penyandang disabilitas) bantuan uang tersebut dapat digunakan untuk upah kerja. Bantuan dalam bentuk barang berupa bahan bangunan untuk rumah, dan bahan bangunan untuk PSU.

Pada tahun 2018 jumlah rumah swadaya sebanyak **201.304 unit**. Pada **Tabel 6.5** memperlihatkan rincian jumlah BSPS menurut provinsi. Hingga tahun 2018 provinsi yang mendapat BSPS terbanyak adalah Provinsi Jawa Barat, yaitu sebanyak **20.450 unit**.



Gambar 6.3
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2016-2018

Tabel 6.5
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menurut Provinsi Tahun 2016-2018

Provinsi	2016		2017		2018		Jumlah
	PB	PK	PB	PK	PB	PK	
Aceh	0	1.946	57	2.663	177	4.658	9.501
Sumatera Utara	0	3.377	75	3.195	0	7.908	14.555
Sumatera Barat	59	2.558	60	4.044	150	11.221	18.092
Riau	0	1.959	0	2.484	0	3.519	7.962
Jambi	0	2.126	0	2.500	200	5.478	10.304
Sumatera Selatan	0	3.453	94	3.003	300	7.261	14.111
Bengkulu	0	2.201	0	2.204	50	4.845	9.300
Lampung	2	2.354	0	3.197	283	5.891	11.727
Kepulauan Bangka Belitung	0	1.183	0	1.988	0	2.000	5.171
Kepulauan Riau	0	1.735	0	1.479	0	2.000	5.214
DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0
Jawa Barat	198	8.632	448	7.562	175	20.275	37.290
Jawa Tengah	95	10.160	384	6.587	996	17.104	35.326
D.I. Yogyakarta	0	2.224	0	1.643	0	2.800	6.667
Jawa Timur	158	6.490	74	8.226	537	13.520	29.005
Banten	0	1.998	171	2.499	200	3.892	8.760

Provinsi	2016		2017		2018		Jumlah
	PB	PK	PB	PK	PB	PK	
Bali	0	1.758	0	2.112	136	3.200	7.206
Nusa Tenggara Barat	276	2.402	0	3.727	166	3.956	10.527
Nusa Tenggara Timur	0	2.457	96	4.707	0	7.348	14.608
Kalimantan Barat	0	2.396	78	4.268	70	6.185	12.997
Kalimantan Tengah	0	2.316	0	2.000	206	3.500	8.022
Kalimantan Selatan	0	2.215	0	2.859	61	3.500	8.635
Kalimantan Timur	0	2.208	0	2.627	0	3.000	7.835
Kalimantan Utara	0	2.510	0	1.574	0	2.000	6.084
Sulawesi Utara	1	2.434	0	3.613	0	3.995	10.043
Sulawesi Tengah	0	3.898	210	3.891	35	6.284	14.318
Sulawesi Selatan	23	4.040	81	5.381	0	8.219	17.744
Sulawesi Tenggara	4	3332	72	3340	189	7585	14522
Gorontalo	72	2220	0	1621	547	2750	7210
Sulawesi Barat	0	2.137	0	2.200	100	4.051	8.488
Maluku	0	2.389	100	3.340	151	3.500	9.480
Maluku Utara	119	2.242	0	3.169	270	3.560	9.360
Papua	0	1.534	0	3.529	1.000	5.550	11.613
Papua Barat	0	1.997	0	3.500	0	4.750	10.247
Total	1.007	96.881	2.000	110.732	5.999	195.305	411.924

Sumber: Aplikasi Penyediaan Perumahan Dalam Angka

D. Fasilitas Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Rumah Umum

Pengertian rumah Umum sesuai dengan **UU No.1 Tahun 2011** tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pembangunan rumah umum untuk MBR mengalami kendala pada aksesibilitas, dan harga rumah yang tidak sebanding dengan pendapatan/penghasilan masyarakat. Kendala tersebut di atas juga ditambah dengan masih buruknya pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Rumah yang layak huni tak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan yang sesuai standar namun aksesibilitas terhadap Prasarana, Sarana, serta Utilitas (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman tersebut pun harus terpenuhi sehingga kawasan permukiman tersebut dapat dikatakan layak huni. Oleh karena itu Kementerian PUPR memberi bantuan pembangunan PSU. Pemberian bantuan fasilitas pembangunan PSU perumahan diperuntukkan bagi rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun. Pemberian bantuan tersebut bersifat stimulan. Berdasarkan **Keputusan Menteri No. 896/KPTS/M/2016** bantuan PSU antara lain berupa bantuan pembangunan jalan, ruang terbuka non hijau, sanitasi, air minum, rumah ibadah, jaringan listrik, dan penerangan jalan umum. Pada **Tabel 6.6** disajikan data bantuan pembangunan PSU menurut provinsi pada tahun 2016 sampai tahun 2018.

Tabel 6.6
Jumlah Pembangunan PSU Rumah Umum Tahun 2016-2018

Provinsi	Tahun		
	2016	2017	2018
Aceh	0	354	220
Sumatera Utara	1162	360	420
Sumatera Barat	462	0	50
Riau	2.162	1.198	1.700
Jambi	559	519	510
Sumatera Selatan	1.883	296	420
Bengkulu	521	260	100
Lampung	560	360	200
Kep. Bangka Belitung	364	0	280
Kepulauan Riau	570	834	150
DKI Jakarta	0	0	0
Jawa Barat	2.656	1.052	5.738
Jawa Tengah	677	293	940
D.I. Yogyakarta	0	305	120
Jawa Timur	661	497	2260
Banten	3.443	374	1923
Bali	0	0	0
Nusa Tenggara Barat	710	425	1236
Nusa Tenggara Timur	330	0	640
Kalimantan Barat	616	1649	1.571
Kalimantan Tengah	907	886	1120
Kalimantan Selatan	2.571	2.508	2.121
Kalimantan Timur	789	188	50
Kalimantan Utara	0	0	0
Sulawesi Utara	802	644	980
Sulawesi Tengah	375	207	620
Sulawesi Selatan	2.568	2.636	3.457
Sulawesi Tenggara	375	0	340
Gorontalo	165	0	500
Sulawesi Barat	576	245	590
Maluku	0	0	0
Maluku Utara	0	0	0
Papua	225	783	1750
Papua Barat	195	393	400
Indonesia	26.884	17.266	30.406

Sumber: Aplikasi Penyediaan Perumahan Dalam Angka

E. Fasilitas Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP)

Dalam upaya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, pemerintah tak hanya mengeluarkan program pembangunan secara fisik, ada pula program bantuan pembiayaan pembelian rumah melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah. Program tersebut adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berdasarkan **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016** tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. FLPP menyediakan dana berupa Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSh) yang terdiri dari rumah sejahtera tapak dan satuan rumah sejahtera susun. **Tabel 6.7** menyajikan data jumlah penyaluran KPR-FLPP tahun 2010-2019.

Tabel 6.7
Data Penyaluran KPR Sejahtera FLPP Rumah Tapak dan Rumah Susun
Menurut Provinsi Tahun 2010-2019

Provinsi	Rumah Tapak	Rumah Susun	Total
Aceh	2.290	4	2.294
Sumatera Utara	33.499	5	33.504
Sumatera Barat	7.371	0	7.371
Riau	31.034	2	31.036
Jambi	15.327	0	15.327
Sumatera Selatan	30.404	2	30.406
Bengkulu	6.334	0	6.334
Lampung	7.368	0	7.368
Kepulauan Bangka Belitung	4.334	0	4.334
Kepulauan Riau	13.328	8	13.336
DKI Jakarta	12	383	395
Jawa Barat	220.159	69	220.228
Jawa Tengah	31.442	0	31.442
D.I. Yogyakarta	1.490	0	1.490
Jawa Timur	39.524	0	39.524
Banten	60.438	0	60.438
Bali	1.782	0	1.782
Nusa Tenggara Barat	3.983	0	3.983
Nusa Tenggara Timur	3.262	1	3.263
Kalimantan Barat	24.027	-1	24.026
Kalimantan Tengah	10.900	0	10.900
Kalimantan Selatan	37.233	-6	37.227
Kalimantan Timur	3.370	22	3.392
Kalimantan Utara	218	0	218
Sulawesi Utara	10.267	0	10.267

Provinsi	Rumah Tapak	Rumah Susun	Total
Sulawesi Tengah	4.621	0	4.621
Sulawesi Selatan	20.927	0	20.927
Sulawesi Tenggara	7.810	0	7.810
Gorontalo	2.631	0	2.631
Sulawesi Barat	2.999	-1	2.998
Maluku	81	0	81
Maluku Utara	312	0	312
PapuaBarat	6.077	0	6.077
Papua	6.697	1	6.698
Indonesia	651.551	489	652.040

Sumber : Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, update 9 Desember 2019



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**



BAB VII

INFORMASI STATISTIK
PEKERJAAN UMUM &
PERUMAHAN RAKYAT
2019

**STATISTIK
BINA
KONSTRUKSI**



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

Pembangunan infrastruktur tidak lepas dari kegiatan konstruksi. Konstruksi merupakan kegiatan yang menghasilkan bangunan yang menyatu dengan lahan kedudukannya. Hasil kegiatan konstruksi antara lain, gedung, jalan, jembatan, bangunan air dan drainase, sanitasi, dan lainnya.

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh BPS tahun 2015, kegiatan konstruksi terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Konstruksi Gedung meliputi semua jenis gedung/bangunan, baik pembangunan gedung baru, perbaikan, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara.
2. Konstruksi Bangunan Sipil mencakup kegiatan konstruksi berat seperti fasilitas industri, proyek infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga umum dan lain-lain.
3. Konstruksi Khusus merupakan kegiatan konstruksi yang dilakukan dengan keahlian khusus. Kegiatan konstruksi khusus mencakup penyelesaian gedung, instalasi seperti pipa-pipa ledeng, pemanas, pendingin ruangan, sistem alarm dan pekerjaan listrik lain, sistem penyiraman, lift dan tangga berjalan, dan lainnya.

A. Badan Usaha Jasa Konstruksi

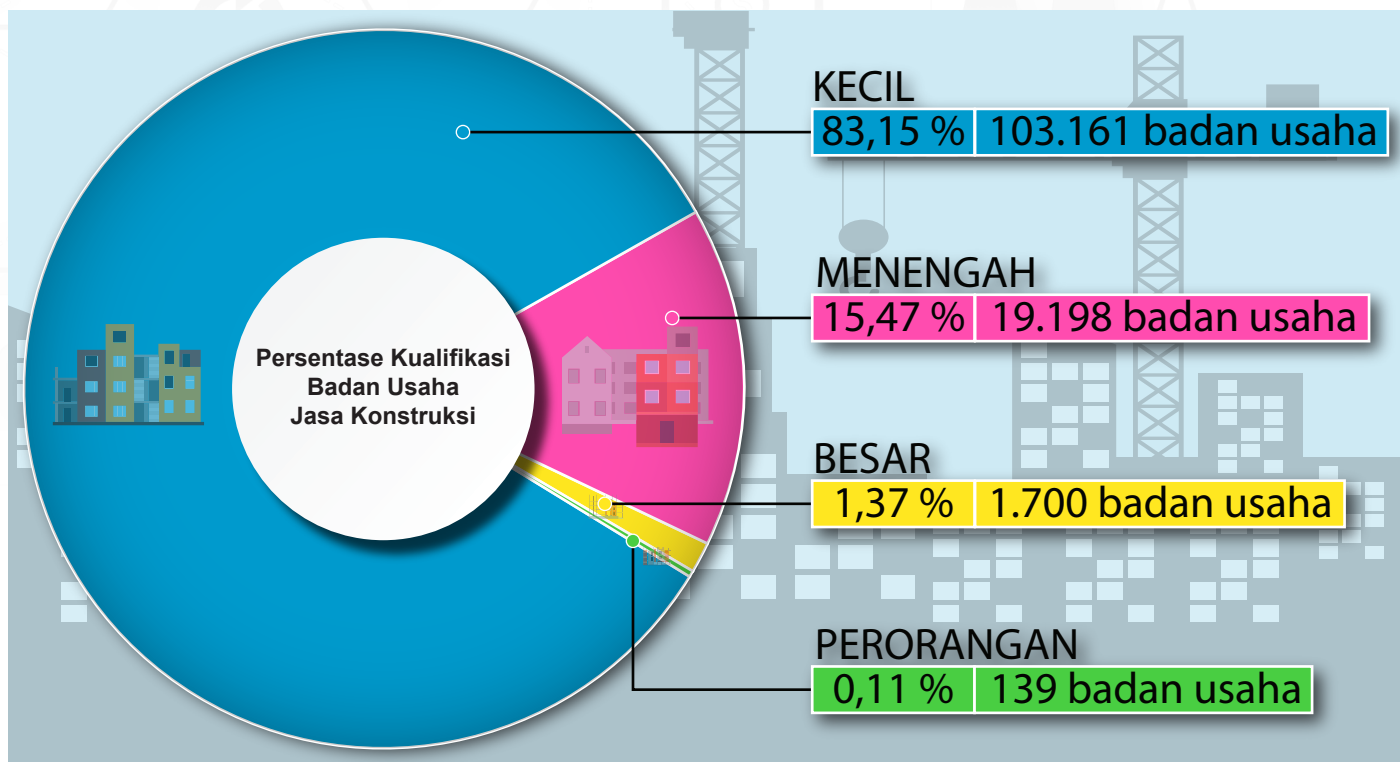
Seiring dengan pembangunan infrastruktur nasional yang semakin pesat, banyak perusahaan penyedia jasa konstruksi bermunculan, baik perseorangan atau badan usaha. Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan **UU No. 2 Tahun 2017** tentang Jasa Konstruksi, jenis usaha jasa konstruksi meliputi usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi, dan usaha perkerjaan konstruksi terintegrasi.

Badan usaha jasa konstruksi harus memiliki sertifikasi untuk dapat mengikuti tender pengadaan jasa konstruksi. Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) adalah bukti pengakuan formal tingkat kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor) dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (konsultan) sebagai perwujudan hasil sertifikasi dan registrasi badan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Usaha jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi bersifat umum dan spesialis. Usaha jasa konsultasi konstruksi umum diklasifikasi menjadi arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, dan arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Sedangkan klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi antara lain konsultasi ilmiah dan teknis, serta pengujian dan analisis teknis.

Penetapan kualifikasi usaha dilaksanakan melalui penilaian terhadap penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. Kualifikasi tersebut dibagi menjadi 4 yaitu, perorangan, kecil, menengah, dan besar.

Sebagian besar badan usaha jasa konsultan terqualifikasi sebagai badan usaha kecil terdapat sebesar **83,15%**. Kualifikasi menengah terdapat sebesar **15,47%**. Kualifikasi lainnya yaitu besar dan perorangan masing-masing sebesar **1,37%** dan **0,11%**.



Gambar 7.1
Persentase Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Tabel 7.1
Persebaran Badan Usaha Jasa Konsultan

Provinsi	Perorangan	Kecil		
		K1	K2	K3
Aceh	4	3.195	879	613
Sumatera Utara	6	3.723	690	803
Sumatera Barat	10	2.968	580	432
Riau	0	2.163	448	674
Jambi	16	1.054	231	216
Sumatera Selatan	0	2.028	386	569
Bengkulu	0	652	138	136
Lampung	0	1.570	411	356
Kepulauan Bangka Belitung	2	618	116	130
Kepulauan Riau	6	1190	159	299
DKI Jakarta	57	1.841	256	474
Jawa Barat	0	8.944	923	785
Jawa Tengah	2	6.521	1.057	1.142
D.I. Yogyakarta	0	584	108	188
Jawa Timur	0	7.561	1.656	1.354
Banten	17	3.358	381	291
Bali	0	805	183	247

Provinsi	Perorangan	Kecil		
		K1	K2	K3
Nusa Tenggara Barat	0	2.163	181	111
Nusa Tenggara Timur	0	1.670	419	479
Kalimantan Barat	0	3.180	508	338
Kalimantan Tengah	1	888	263	509
Kalimantan Selatan	0	1.640	374	272
Kalimantan Timur	6	1.962	352	353
Kalimantan Utara	0	185	77	63
Sulawesi Utara	0	682	182	569
Sulawesi Tengah	3	1.494	330	206
Sulawesi Selatan	0	3.386	593	515
Sulawesi Tenggara	0	1.111	305	532
Gorontalo	4	485	130	96
Sulawesi Barat	0	419	152	160
Maluku	0	497	219	379
Maluku Utara	0	612	147	255
Papua Barat	0	3.044	164	327
Papua	5	3.324	193	580
Indonesia	139	75.517	13.191	14.453

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Data Report LPJK - Per 29 Agustus 2019

Tabel 7.2
Persebaran Badan Usaha Jasa Konsultan (Lanjutan)

Provinsi	Menengah		Besar		Total
	M1	M2	B1	B2	
Aceh	536	137	15	3	5.382
Sumatera Utara	632	216	27	5	6.102
Sumatera Barat	257	66	6	0	4.319
Riau	505	134	23	6	3.953
Jambi	173	73	6	0	1.755
Sumatera Selatan	461	182	30	1	3.673
Bengkulu	80	31	0	0	1.037
Lampung	295	84	20	2	2.738
Kepulauan Bangka Belitung	46	16	4	0	932
Kepulauan Riau	221	60	6	4	1945
DKI Jakarta	2.603	673	378	465	6.747
Jawa Barat	1.896	306	70	46	12.970
Jawa Tengah	804	226	35	3	9.790
D.I. Yogyakarta	106	38	7	1	1.032
Jawa Timur	1.179	294	71	30	12.145
Banten	524	107	37	26	4.741

Provinsi	Menengah		Besar		Total
	M1	M2	B1	B2	
Bali	120	49	4	1	1.409
Nusa Tenggara Barat	113	30	9	2	2.609
Nusa Tenggara Timur	183	91	2	0	2.844
Kalimantan Barat	269	125	5	1	4.426
Kalimantan Tengah	205	74	14	1	1.955
Kalimantan Selatan	245	63	10	1	2.605
Kalimantan Timur	564	183	36	145	3.470
Kalimantan Utara	55	42	8	2	432
Sulawesi Utara	211	103	11	1	1.759
Sulawesi Tengah	179	44	8	0	2.264
Sulawesi Selatan	583	253	36	9	5.375
Sulawesi Tenggara	290	112	7	0	2.357
Gorontalo	96	18	1	0	830
Sulawesi Barat	81	20	1	0	833
Maluku	167	81	7	1	1.351
Maluku Utara	132	69	14	0	1.229
Papua Barat	361	156	8	0	4.060
Papua	643	227	22	6	5.000
Indonesia	14.815	4.383	938	762	124.069

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Data Report LPJK - Per 29 Agustus 2019

B. Tenaga Kerja

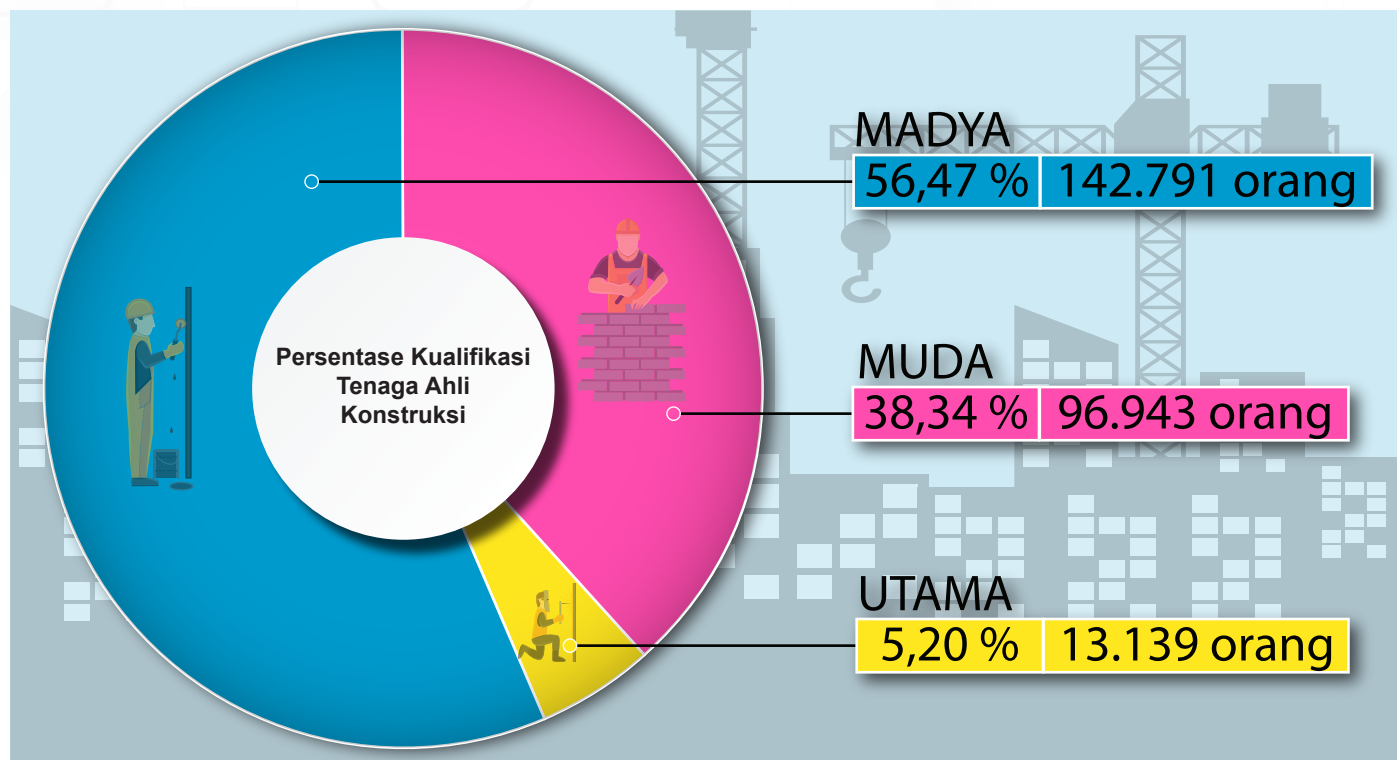
Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja dibagi berdasarkan kualifikasi tenaga kerja. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan penggolongan profesi dan keahlian atau keterampilan kerja orang perseorangan di bidang konstruksi menurut tingkat kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian. Kualifikasi tenaga kerja konstruksi terbagi menjadi 2 yaitu tenaga ahli dan tenaga terampil.

Kualifikasi tenaga ahli yaitu muda, madya, dan utama. Tenaga ahli yang sudah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dengan kualifikasi muda dapat ditingkatkan menjadi ahli madya, dan tenaga ahli madya dapat ditingkatkan menjadi ahli utama. Berdasarkan **Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2013** persyaratan khusus kualifikasi tenaga ahli adalah sebagai berikut:

- Utama : minimal D4 dengan pengalaman minimal 6 tahun lulusan S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun, atau S1 Terapan dengan pengalaman minimal 4 tahun.
- Madya : minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 5 tahun. Lulusan D4 pengalaman minimal 3 tahun, dan S1 pengalaman minimal 1 tahun.
- Muda : minimal lulusan D3 dengan pengalaman minimal 3 tahun. Lulusan D4 pengalaman minimal 1 tahun, dan S1 pengalaman minimal 1 tahun.

Tenaga ahli bersertifikat keahlian merupakan salah satu persyaratan utama untuk mengajukan permohonan sertifikasi dan registrasi SBU bidang jasa konstruksi golongan kecil (K1, K2, dan K3), dan ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK).

Pada tahun 2018 terdapat **252.873 orang** tenaga ahli konstruksi yang tersertifikasi. Pada **Gambar 7.1** dapat dilihat bahwa tenaga ahli madya merupakan yang terbanyak dari seluruh tenaga ahli bersertifikat di Indonesia dengan persentase sebesar **56,47%**. Sedangkan tenaga ahli muda dan utama masing-masing memiliki persentase sebesar **38,34%** dan **5,20%**. Rincian data tenaga ahli konstruksi berdasarkan provinsi disajikan pada **Tabel 7.2**.



Gambar 7.2
Persentase Kualifikasi Tenaga Ahli Konstruksi

Tabel 7.3
Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi

Provinsi	Kualifikasi (orang)			Total
	Utama	Madya	Muda	
Aceh	0	6.145	4041	10.186
Sumatera Utara	0	2.468	1777	4.245
Sumatera Barat	0	5.163	3382	8.545
Riau	0	28.094	16867	44.961
Jambi	0	1.798	989	2.787
Sumatera Selatan	0	2.727	1704	4.431
Bengkulu	0	384	380	764
Lampung	0	1072	680	1.752
Kepulauan Bangka Belitung	0	618	438	1.056
Kepulauan Riau	0	30.894	18538	49.432
DKI Jakarta	13.139	9.849	6.778	29.766

Provinsi	Kualifikasi (orang)			Total
	Utama	Madya	Muda	
Jawa Barat	0	7.295	4887	12.182
Jawa Tengah	0	2.972	3702	6.674
D.I. Yogyakarta	0	1.297	1268	2.565
Jawa Timur	0	4.628	6324	10.952
Banten	0	3.512	2840	6.352
Bali	0	1.036	1266	2.302
Nusa Tenggara Barat	0	594	975	1.569
Nusa Tenggara Timur	0	1.207	1429	2.636
Kalimantan Barat	0	2.640	1105	3.745
Kalimantan Tengah	0	967	983	1.950
Kalimantan Selatan	0	397	381	778
Kalimantan Timur	0	2.597	1971	4.568
Kalimantan Utara	0	14	65	79
Sulawesi Utara	0	9.038	4137	13.175
Sulawesi Tengah	0	1.812	1572	3.384
Sulawesi Selatan	0	5.623	2665	8.288
Sulawesi Tenggara	0	653	892	1.545
Gorontalo	0	3.051	1863	4.914
Sulawesi Barat	0	1507	939	2.446
Maluku	0	999	859	1.858
Maluku Utara	0	349	137	486
Papua Barat	0	567	595	1.162
Papua	0	824	514	1.338
Indonesia	13.139	142.791	96.943	252.873

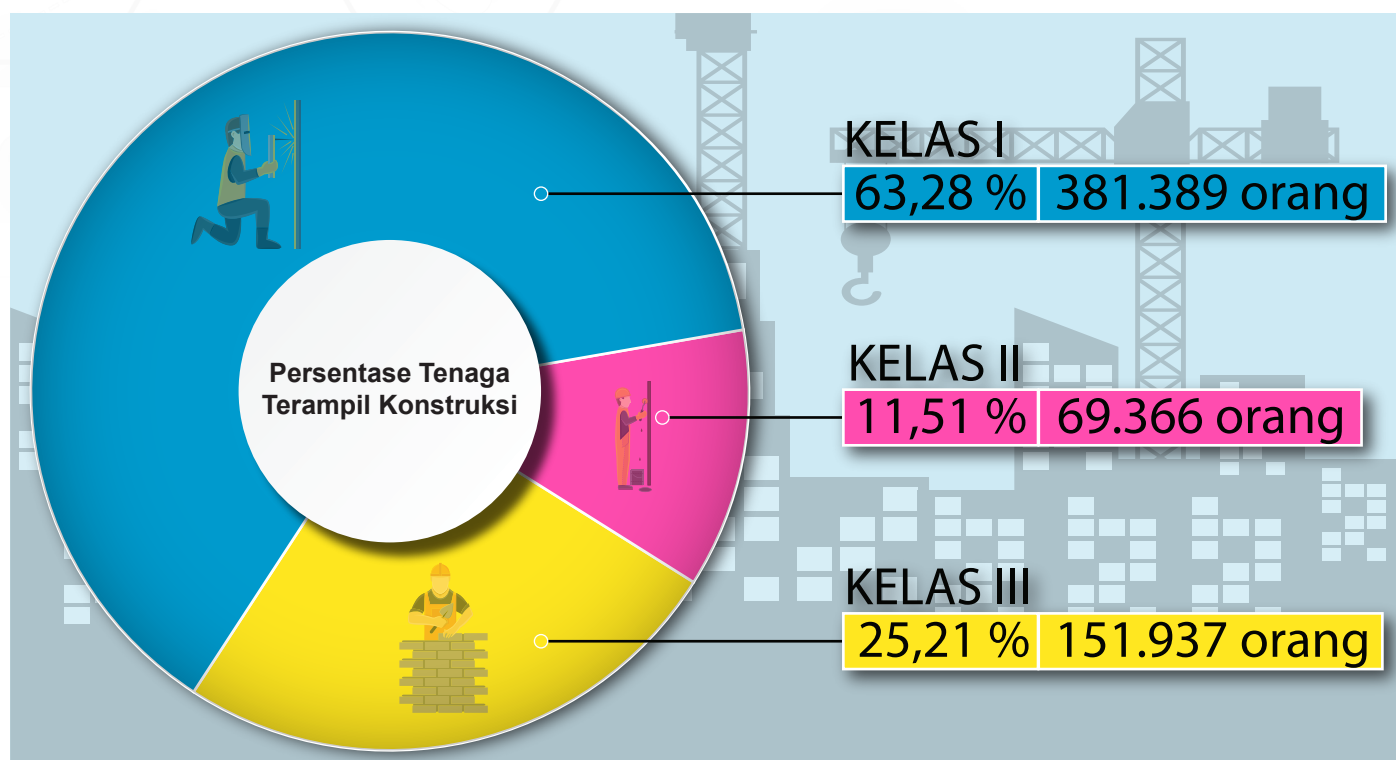
Sumber: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Data Report LPJK - Per 29 Agustus 2019

Kualifikasi tenaga terampil yaitu kelas III, kelas II, dan kelas I. Berdasarkan **Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2013** persyaratan khusus kualifikasi tenaga terampil adalah sebagai berikut:

- Kelas I : minimal lulusan D1 dengan pengalaman minimal 3 tahun.
- Kelas II : minimal lulusan SMK dengan pengalaman minimal 2 tahun atau SLTA dengan pengalaman minimal 3 tahun.
- Kelas III : minimal lulusan SD dengan pengalaman minimal 3 tahun atau SLTP dengan pengalaman minimal 2 tahun.

Sertifikat Keterampilan (SKT) adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsiannya dan/atau keterampilan tertentu. Setiap badan usaha jasa konstruksi golongan kecil (K1, K2, dan K3) yang akan mengajukan permohonan sertifikast dan registrasi badan usaha harus memiliki tenaga kerja terampil bersertifikat, sebagai persyaratan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT).

Indonesia memiliki **602.692 tenaga kerja** bersertifikat keterampilan. Sebanyak **63,28%** dari seluruh tenaga ber-SKT adalah kelas I. Sedangkan persentase kelas II dan kelas III sebesar **11,51%** dan **25,21%**. Pada **Tabel 7.3** tersaji rincian jumlah tenaga terampil bersertifikat keterampilan berdasarkan provinsi.



Gambar 7.3
Persentase Tenaga Terampil Konstruksi

Tabel 7.4
Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi

Provinsi	Kualifikasi (orang)			Total
	Kelas I	Kelas II	Kelas III	
Aceh	17.021	1030	2.226	20.277
Sumatera Utara	3.042	2.166	5.685	10.893
Sumatera Barat	16.563	1.826	3.619	22.008
Riau	96.826	8.558	11.294	116.678
Jambi	3.930	465	2.790	7.185
Sumatera Selatan	9.158	607	3.549	13.314
Bengkulu	1592	123	1.059	2.774
Lampung	2.092	1.317	3245	6.654
Kepulauan Bangka Belitung	3942	1139	2.147	7.228
Kepulauan Riau	94.720	13.947	16.524	125.191
DKI Jakarta	3.834	920	22.362	27.116
Jawa Barat	11.337	7.034	15.727	34.098

Provinsi	Kualifikasi (orang)			Total
	Kelas I	Kelas II	Kelas III	
Jawa Tengah	4.904	4.627	13.910	23.441
D.I. Yogyakarta	1.681	1.354	2.935	5.970
Jawa Timur	17.361	4.980	6.543	28.884
Banten	6.754	3.803	3.985	14.542
Bali	2447	406	2.619	5.472
Nusa Tenggara Barat	3.662	2.106	1.998	7.766
Nusa Tenggara Timur	4715	354	1.346	6.415
Kalimantan Barat	11.112	882	766	12.760
Kalimantan Tengah	3.996	105	562	4.663
Kalimantan Selatan	1.966	1081	2.179	5.226
Kalimantan Timur	5251	915	1.311	7.477
Kalimantan Utara	60	30	789	879
Sulawesi Utara	23.183	1243	2.726	27.152
Sulawesi Tengah	2.647	2.060	5.402	10.109
Sulawesi Selatan	6.466	1.065	4.697	12.228
Sulawesi Tenggara	1.086	479	2469	4.034
Gorontalo	9.058	1.181	2.071	12.310
Sulawesi Barat	1801	904	2.001	4.706
Maluku	2857	295	578	3.730
Maluku Utara	938	511	687	2.136
Papua Barat	2808	1032	873	4.713
Papua	2579	821	1.263	4.663
Total	381.389	69.366	151.937	602.692

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Data Report LPJK - Per 29 Agustus 2019

A construction worker in a hard hat and safety harness is seen from behind, looking out over a construction site. In the background, there are several vertical rebar structures and a large crane arm against a cloudy sky. The image is split diagonally into green and dark blue sections.

BABVIII

INFORMASI STATISTIK
PEKERJAAN UMUM &
PERUMAHAN RAKYAT
2019

**STATISTIK
SDM
KEMENTERIAN PUPR**

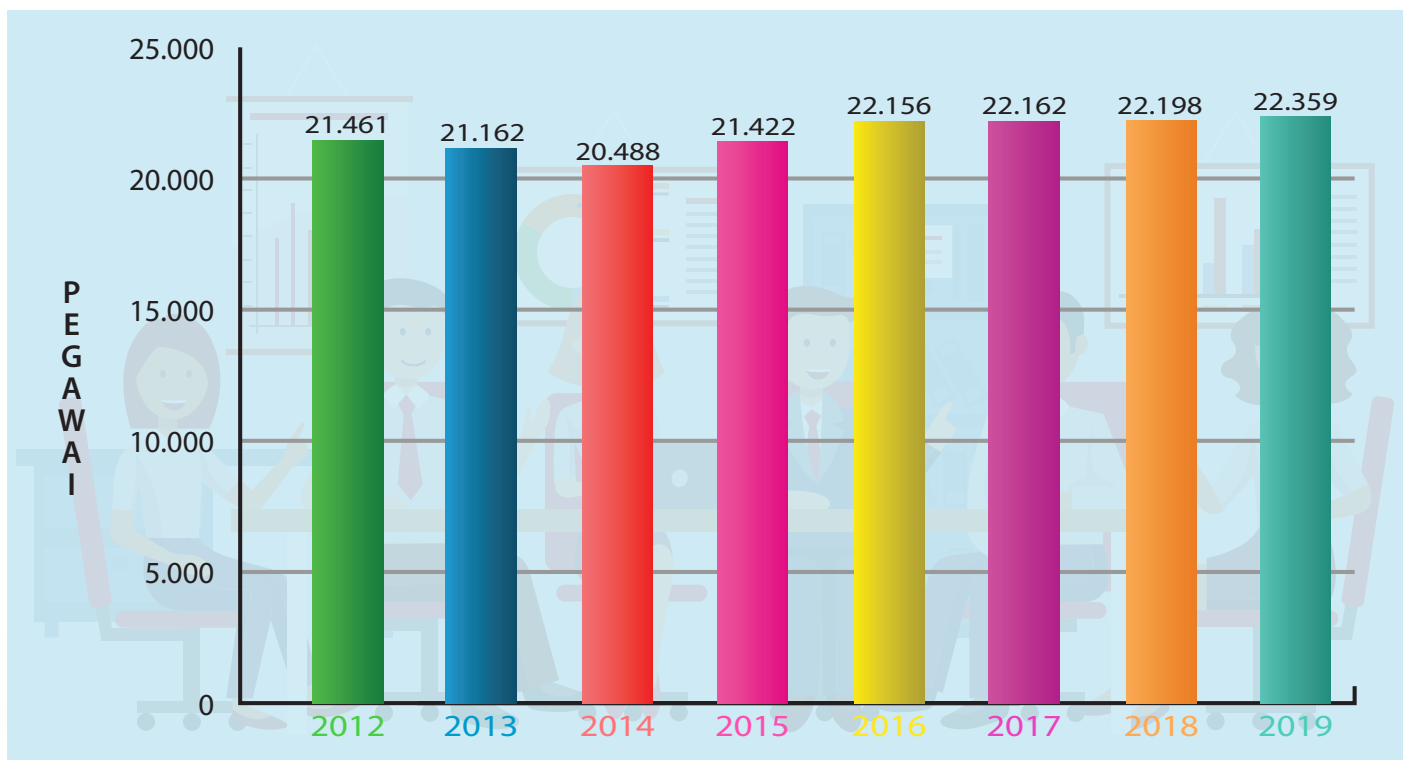


**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

A. Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PUPR

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Peran penting SDM dalam pembangunan infrastruktur adalah sebagai perancang, penyusun, pelaksana, serta pengawas. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM Kementerian PUPR dirasa perlu dilakukan guna menunjang pembangunan infrastruktur.

Jumlah pegawai Kementerian PUPR mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2010 ke 2011 terjadi peningkatan lebih dari **1.000 pegawai**. Hal ini terjadi karena adanya penerimaan pegawai secara *online*, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Peningkatan yang tertinggi terdapat pada tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan dikeluarkannya **Peraturan Presiden (Perpres) No. 165 Tahun 2014** tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, dalam Perpres tersebut ditetapkan penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Pada **Gambar 8.1** dapat dilihat perbedaan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan. Jumlah pegawai laki-laki dari tahun ke tahun selalu lebih banyak dibandingkan pegawai wanita.



Gambar 8.1
Perkembangan Jumlah SDM Kementerian PUPR Tahun 2012-2018

Tabel 8.1
Jumlah SDM Kementerian PUPR tahun 2012-2019

Tahun	Jumlah Pegawai		Total
	Laki-laki	Perempuan	
2012	15.970	5.491	21.461
2013	15.722	5.440	21.162
2014	15.130	5.358	20.488
2015	15.746	5.676	21.422
2016	16.334	5.822	22.156
2017	15.722	5.440	21.162
2018	15.916	6.282	22.198
2019	15.814	6.545	22.359

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Status 01 Desember 2019

Total jumlah SDM pada tahun 2019 sebanyak **172.408 pegawai**. Pada **Tabel 8.2** dapat dilihat jumlah SDM Kementerian PUPR pada tahun 2019 berdasarkan unit organisasi. Kementerian PUPR memiliki 11 unit organisasi. Unit organisasi yang memiliki jumlah pegawai terbanyak adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) sebanyak **35,29%** dari keseluruhan jumlah pegawai Kementerian PUPR. Direktorat Jenderal Bina Marga menempati posisi kedua dengan persentase jumlah pegawai mencapai **34,49%**. **Tabel 8.2** menyajikan data jumlah pegawai menurut unit organisasi yang jabarkan berdasarkan gender.

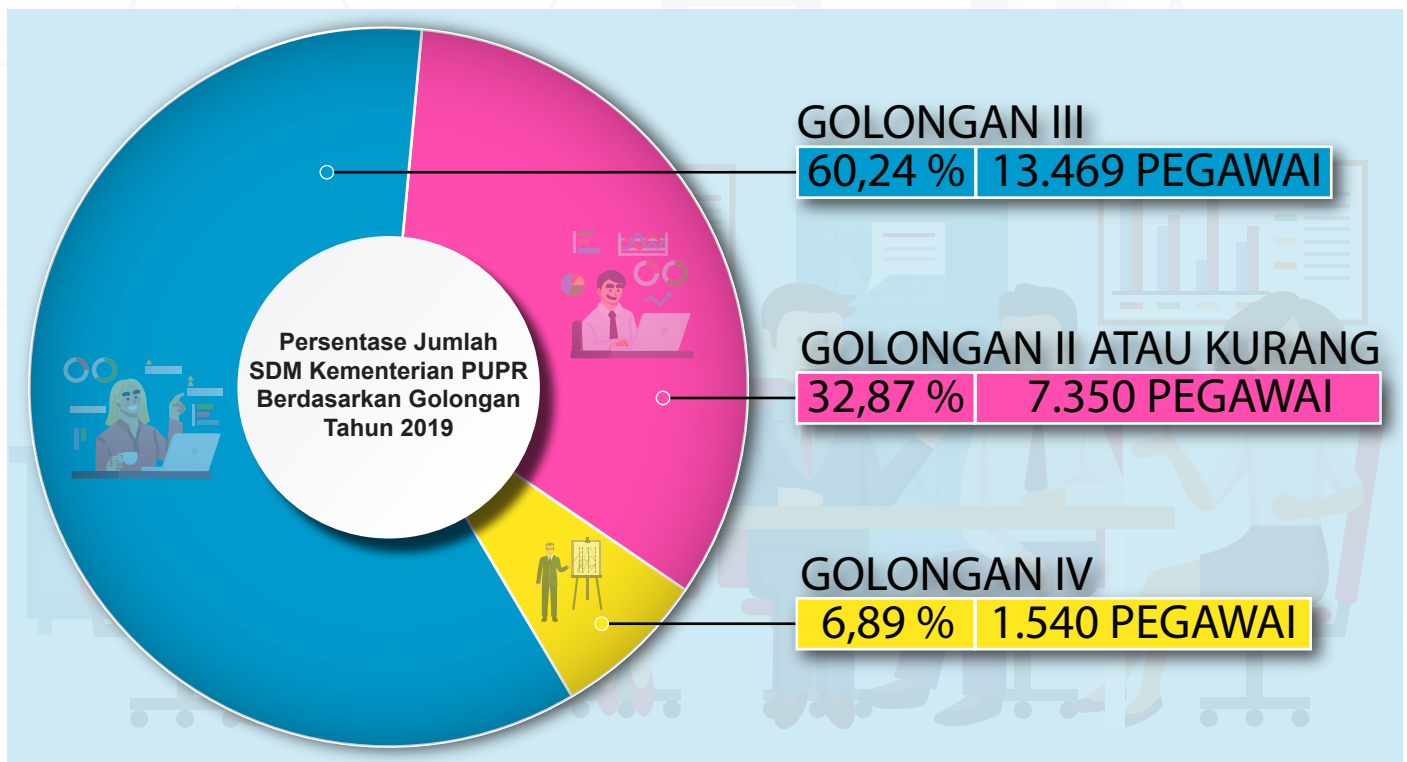
Tabel 8.2
Jumlah SDM Kementerian PUPR berdasarkan Unit Organisasi Tahun 2019

Unit Organisasi	Golongan IV		Golongan III		Golongan II dan Kurang		Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Sekretariat Jenderal	54	33	259	186	155	16	468	235
Inspektorat Jenderal	25	13	89	116	23	5	137	134
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	283	69	2.789	1.470	2.877	396	5.949	1.935
Direktorat Jenderal Bina Marga	331	57	3.027	1.429	2.283	577	5.641	2.063
Direktorat Jenderal Cipta Karya	126	47	1.011	834	488	144	1.625	1.025
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan	72	28	232	166	30	5	334	199
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	87	24	375	216	57	12	519	252

Unit Organisasi	Golongan IV		Golongan III		Golongan II dan Kurang		Jumlah	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	28	14	64	63	9	0	101	77
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	20	13	80	78	11	3	111	94
Badan Penelitian dan Pengembangan	80	41	422	283	123	23	625	347
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67	24	135	144	78	19	280	187
Total	1.173	363	8.483	4.985	6.134	1.200	15.790	6.548

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Status 01 Desember 2019

Dilihat dari golongan kepangkatan, jumlah pegawai kementerian PUPR tahun 2019 yang telah menjadi golongan IV sebesar **6,89%** atau sekitar **1.504 pegawai**. Pegawai yang termasuk golongan III terdapat sebanyak **13.469 pegawai** atau sekitar **60,24%** dari seluruh pegawai Kementerian PUPR. Pada golongan II dan kurang terdapat sebanyak **7.350 pegawai** atau sekitar **32,87%**. Pada **Tabel 8.3.0** disajikan data pegawai berdasarkan golongan untuk setiap unit organisasi yang ada di Kementerian PUPR.



Gambar 8.2

Persentase Jumlah SDM Kementerian PUPR Berdasarkan Golongan Tahun 2019

Tabel 8.3

Jumlah SDM menurut Golongan Tahun 2019

Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Golongan IV	1.176	364	1.540
Golongan III	8.488	4.981	13.469
Golongan II atau Kurang	6.150	1.200	7.350
Total	15.814	6.545	22.359

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Status 01 Desember 2019

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai Kementerian PUPR sebagian besar adalah lulusan S1 sebanyak **41,41%** atau sekitar **9.259 pegawai**. Sebanyak **19,45%** pegawai Kementerian PUPR merupakan lulusan S2 dan S3 atau sekitar **4.348 pegawai**. Kemudian **4,25%** pegawai lainnya merupakan lulusan diploma atau sebanyak **951 pegawai**. Pada **Tabel 8.5** menyajikan data pegawai Kementerian PUPR menurut jenjang pendidikan.

Tabel 8.4

Jumlah SDM menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2019

Pendidikan yang disematkan	Jumlah Pegawai		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
S3	80	14	94
S2	2.884	1.370	4.254
D4/S1	5.729	3.530	9.259
D1-D3	614	337	951
SLTA atau Kurang	6.507	1.294	7.801
Total	15.814	6.545	22.359

Sumber: Biro Kepegawaian dan Ortala, Status 01 Desember 2019

B. Pengarusutamaan Gender

Tujuan utama pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, lanjut usia, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus. Bila hasil pembangunan belum dirasakan manfaatnya oleh setiap lapisan masyarakat, hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan.

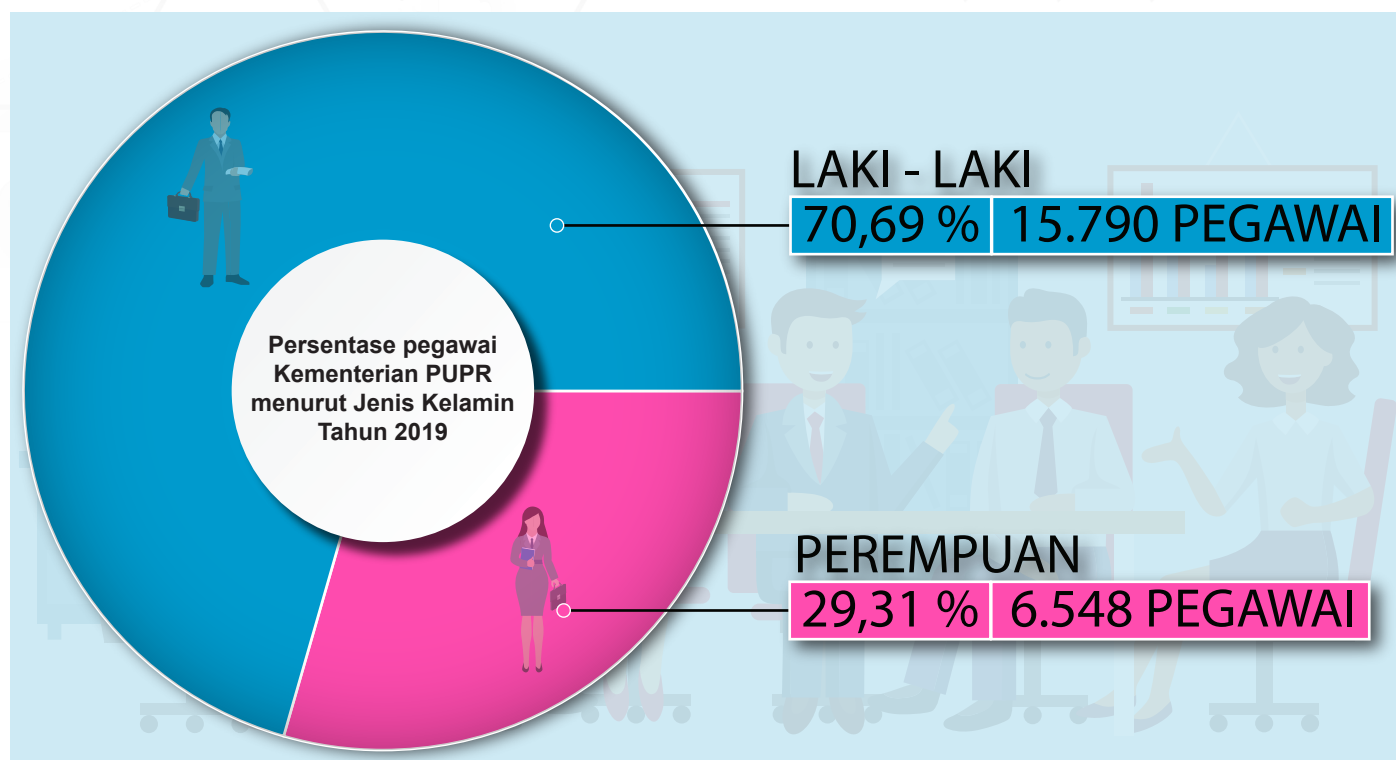
Gender merupakan perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Sementara Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam pemerataan pembangunan sesuai dengan **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000** Tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional. Pemerataan pembangunan tersebut tercipta apabila masyarakat memperoleh akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang sama. Secara umum PUG bukan merupakan konsep untuk memprioritaskan pemberdayaan perempuan saja, namun mengakomodasi seluruh kebutuhan semua gender, baik laki-laki, perempuan, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak-anak dan *difabel*. Formulasi mekanisme kebijakan yang tepat perlu dirancang, agar dapat mengakomodir kebutuhan seluruh masyarakat.

Sesuai dengan salah satu strategi dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR, pengarusutamaan gender telah menjadi komitmen Kementerian PUPR yang akan diterapkan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta implementasinya melalui program dan kegiatan.

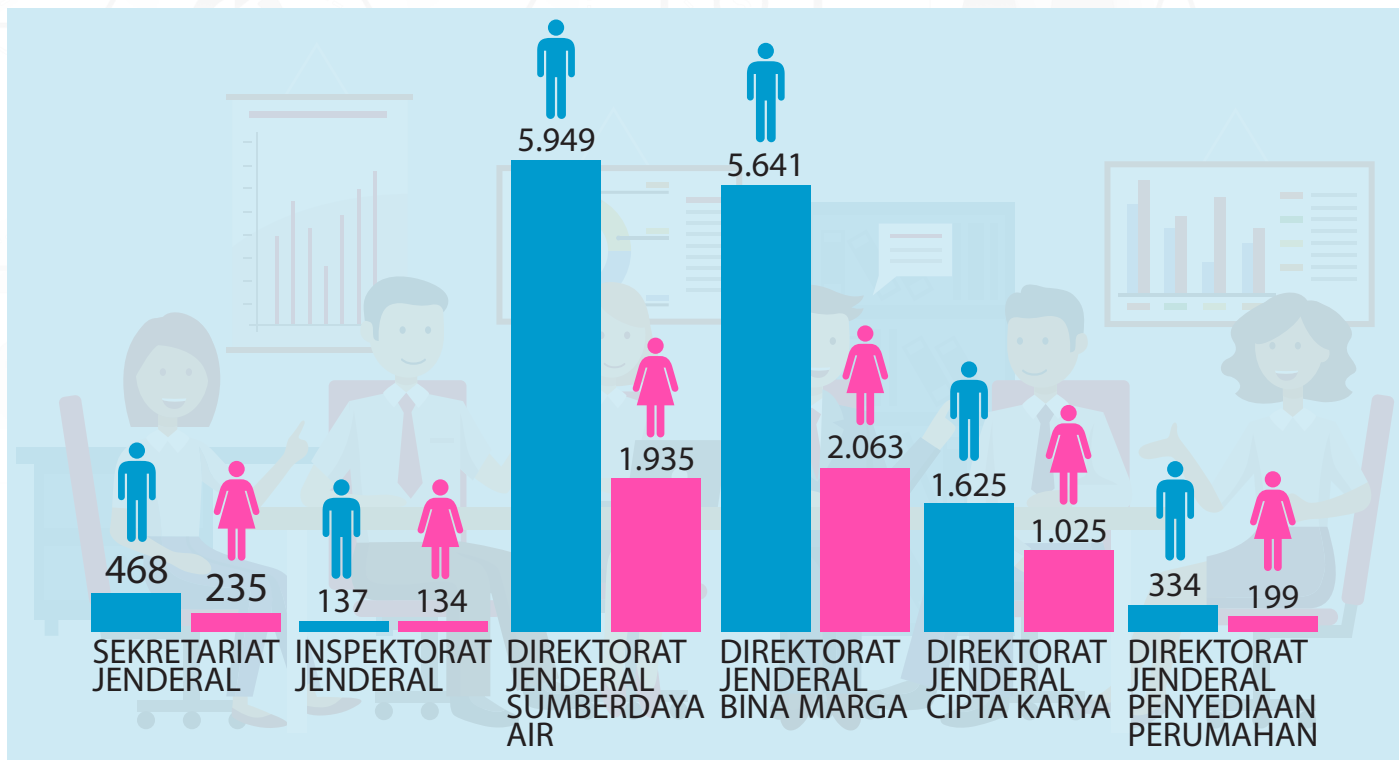
Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan khususnya dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat dilihat dari jumlah pegawai perempuan di Kementerian PUPR. Secara umum pegawai Kementerian PUPR didominasi pegawai laki-laki, yaitu sebesar **70,69%**. Sedangkan pegawai perempuan sebesar **29,31%** dari keseluruhan pegawai. Meskipun secara persentase jumlah pegawai perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai laki-laki, namun

hal tersebut tidak menutup kesempatan yang sama untuk dapat berkiprah dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

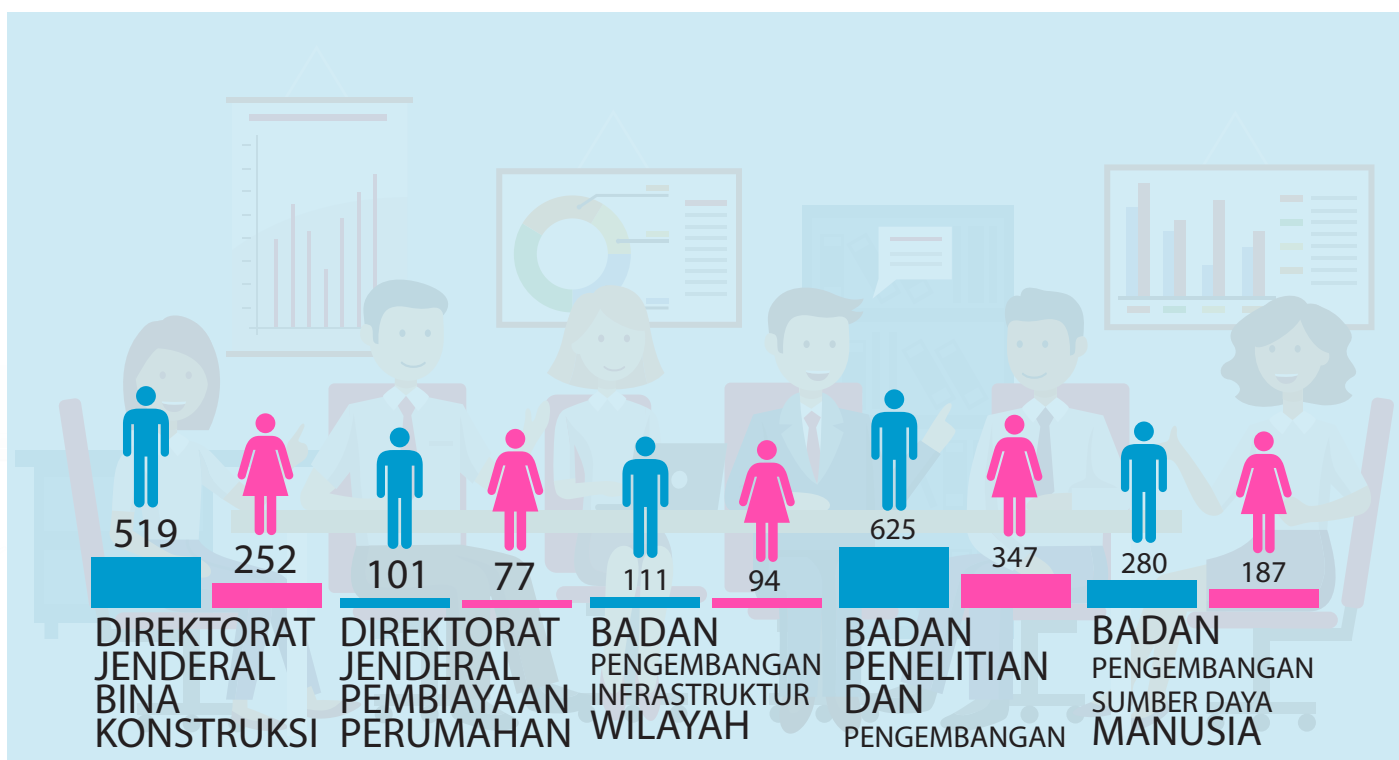


Gambar 8.3
Persentase pegawai Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

Dari total keseluruhan jumlah pegawai, jumlah pegawai perempuan terbanyak terdapat di Direktorat Jenderal Bina Marga yaitu sebanyak **2.063 pegawai**, kemudian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebanyak 1.935 pegawai, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya sebanyak **1.025 pegawai**. Sedangkan untuk jumlah pegawai laki-laki terbanyak berada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdapat sebanyak **5.949 pegawai**, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan **5.641 pegawai**, Direktorat Jenderal Cipta Karya **1.625 pegawai**.



Gambar 8.4
Jumlah Pegawai Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2019



Gambar 8.5
Jumlah Pegawai Kementerian PUPR menurut Jenis Kelamin dan Unit Organisasi Tahun 2019 (Lanjutan)



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**



BAB IX

INFORMASI STATISTIK
PEKERJAAN UMUM &
PERUMAHAN RAKYAT
2019

PENUTUP



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**

Rintisan Nama Buku Informasi Statistik :

2003	: Buku Penyediaan Informasi Statistik Prasarana Kimpraswil
2006	: Buku Induk Kestatistikan
2007	: Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
2012	: Buku Informasi Pekerjaan Umum (BIS-PU)

Yang dibuat dengan format yang berbeda dalam hal penekanan pada informasi mengenai objek hasil pembangunan infrastruktur ke-PU-an beserta beberapa dokumentasinya :

2013 & 2014	: Buku Informasi Pekerjaan Umum (BIS-PU)
-------------	--

Dibuat dengan format data agregat menurut provinsi :

2015	: Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BIS-PUPR) terjadi perubahan struktur organisasi pada Kementerian PU yang kemudian menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2016	: Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2017	: Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BIS-PUPR)
2018	: Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BIS-PUPR)

Dalam rangka menyebarkan data dan informasi pembangunan infrastruktur bidang PUPR, Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat digunakan sebagai data dan informasi pendukung dalam pengambilan keputusan bagi para pimpinan di lingkungan Kementerian PUPR untuk menyusun berbagai kebijakan program pembangunan. BIS diharapkan dapat melengkapi dan memberikan data dan informasi bidang PUPR tingkat nasional dalam sajian yang lebih mudah.

Rintisan Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimulai pada tahun 2003 dengan nama Buku Penyediaan Informasi Statistik Prasarana Kimpraswil. Pada tahun 2006 BIS-PU berubah nama menjadi Buku Induk Kestatistikan dan pada tahun 2007 menjadi Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum. Tahun 2012, terjadi perubahan nama kembali menjadi Buku Informasi Pekerjaan Umum (BIS-PU) yang dibuat dengan format yang berbeda dalam hal penekanan pada informasi mengenai objek hasil pembangunan infrastruktur ke-PU-an beserta beberapa dokumentasinya. Kemudian pada tahun 2013 dan 2014 BIS-PU dibuat dengan format data agregat menurut provinsi. Di tahun 2015 terjadi perubahan struktur organisasi pada Kementerian PU yang kemudian menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka BIS-PU pun berubah menjadi Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BIS-PUPR). Pada tahun 2016 kembali terjadi perubahan nama menjadi Buku Induk Statistik Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, dan kembali menjadi Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BIS-PUPR) pada tahun 2017, hingga tahun 2018 masih menggunakan nama Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BIS-PUPR). Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersedia dalam format buku dan buku digital (e-book) yang dapat dilihat melalui media website PU-net.

Pusdatin telah berupaya maksimal dalam menyediakan data dan informasi infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta pengembangan sistem informasi guna mendukung manajemen Kementerian PUPR untuk tingkat nasional secara lengkap. Namun demikian, upaya tersebut masih dirasakan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan akan data dan informasi yang senantiasa dinamis keragaman jenisnya dan meningkat jumlah pengguna informasinya.

Dengan diterbitkannya Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan dapat memberi manfaat tak hanya bagi pimpinan di lingkungan PUPR namun juga untuk masyarakat luas pada umumnya. Selain itu peningkatan kerjasama antar unit organisasi dapat ditingkatkan, sehingga pertukaran data dan informasi berjalan secara mutual dan dapat saling melengkapi untuk dapat dilakukan sebagai masukan kegiatan dan menghasilkan produk yang bermanfaat dalam mendukung pembangunan nasional.



**KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT**